

DRIVING THE FUTURE GROWTH ...

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITIES



Periode pelaporan yang disajikan pada Laporan Tahunan ini mencakup satu tahun buku dari 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

The reporting period presented in the Annual Report consists of one financial year from January 1, 2025, to December 31, 2025.

Laporan Tahunan ini memuat pernyataan berwawasan ke depan mengenai kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan serta tujuan Perusahaan. Pernyataan-pernyataan tersebut dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi mendatang Perusahaan dan informasi kondisi terkini di dalam lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usahanya. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual yang secara material berbeda dari yang diharapkan. Pernyataan-pernyataan ini memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai pandangan-pandangan yang dimiliki oleh Perusahaan yang menjadi dasar atas strategi dan kebijakan yang diambil Perusahaan. Pembaca Laporan Tahunan ini diperingatkan agar tidak bergantung hanya kepada pernyataan-pernyataan tersebut.

The Annual Report consists of forward-looking statements on financial conditions, operational results, projects, plans, strategies, policies as well as the Company's objectives. These statements are made based on assumptions about the Company's future positions and the most updated information on current conditions in the business settings where the Company operates. These statements are subject to prospective risks, and uncertainties, and can cause actual results to differ materially from expected results. These statements provide insights to the readers on opinions of the Company that are used to be the basis of the Company's strategies and policies. The readers of the Annual Reports are cautioned not to place undue reliance on these statements.

Angka-angka dalam Laporan Tahunan 2025 ini menggunakan denominasi Rupiah dan dinyatakan dalam aturan Bahasa Indonesia, kecuali bila dinyatakan sebaliknya. Beberapa angka telah dibulatkan ke dalam jutaan atau miliaran rupiah terdekat, sehingga mungkin terdapat perbedaan perhitungan persentase perubahan dengan perhitungan yang menggunakan angka-angka dalam Laporan Keuangan Tahunan yang telah Diaudit.

The numbers in the 2025 Annual Report are expressed in Rupiah and stated in standardized Indonesian language, unless stated otherwise. Some figures have been rounded to the nearest millions or billions of Rupiah, so there may be differences in the calculation of the percentage change with calculations using the figures in the Audited Annual Financial Statements.

Laporan Tahunan ini memuat kata "Perusahaan" atau "HCFI" yang semuanya mengacu pada **PT Hyundai Capital Finance Indonesia**, kecuali bila ada pernyataan sebaliknya.

The Annual Report uses words such as "The Company," "HCFI" that refer to **PT Hyundai Capital Finance Indonesia**, unless stated otherwise.

DRIVING THE FUTURE GROWTH ...

Tahun 2025 merupakan tonggak penting bagi **PT Hyundai Capital Finance Indonesia** sebagai tahun awal dimulainya perjalanan Perusahaan di industri pembiayaan otomotif di Indonesia. Pada tahun ini, Perusahaan memfokuskan upaya pada pembangunan fondasi bisnis yang kokoh, mulai dari penguatan struktur organisasi, pengembangan sistem operasional dan manajemen risiko, hingga pembentukan jaringan kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan.

Sebagai bagian dari ekosistem global Hyundai Motor Group, Perusahaan menghadirkan standar layanan dan praktik pembiayaan yang mengedepankan profesionalisme, inovasi, serta pemanfaatan teknologi. Melalui sinergi dengan mitra industri otomotif dan dukungan pemegang saham, Perusahaan mulai membangun kehadiran yang kredibel di pasar pembiayaan kendaraan di Indonesia.

Sepanjang tahun pertama operasionalnya, Perusahaan tidak hanya berfokus pada pencapaian target bisnis awal, tetapi juga pada penanaman prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penguatan kapabilitas sumber daya manusia, serta pengembangan proses bisnis yang berorientasi pada pelanggan.

Ke depan, Perusahaan memiliki visi untuk menjadi pemimpin dalam pembiayaan mobilitas di Indonesia, yang mampu mendukung pertumbuhan ekosistem mobilitas di Indonesia. Dengan fondasi yang telah dibangun pada tahun 2025, Perusahaan optimistis dapat melangkah ke tahap pertumbuhan berikutnya secara berkelanjutan, menciptakan nilai jangka panjang bagi pelanggan, mitra usaha, serta seluruh pemangku kepentingan.

2025 marks a significant milestone for **PT Hyundai Capital Finance Indonesia**, marking the beginning of the Company's journey in the Indonesian automotive financing industry. This year, the Company is focusing its efforts on building a solid business foundation, from strengthening its organizational structure, developing operational and risk management systems, to establishing a network of strategic partnerships with various stakeholders.

As part of the Hyundai Motor Group global ecosystem, the Company delivers service standards and financing practices that prioritize professionalism, innovation, and the use of technology. Through synergy with automotive industry partners and shareholder support, the Company is beginning to establish a credible presence in the Indonesian vehicle financing market.

Throughout its first year of operation, the Company has focused not only on achieving its initial business targets but also on instilling good corporate governance principles, strengthening human resource capabilities, and developing customer-centric business processes.

Going forward, the Company envisions becoming a leader in the mobility finance in Indonesia, capable of supporting the growth of the mobility ecosystem in Indonesia. With the foundation established in 2025, the Company is optimistic that it can move to the next stage of sustainable growth, creating long-term value for customers, business partners, and all stakeholders.

DAFTAR ISI

Table of Contents

...

Page. 2 - 5

2	Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab Disclaimer and Limitation of Liabilities
3	Tema Theme
4	Daftar Isi Table of Contents

01. IKHTISAR KINERJA

Performance Highlights

Page. 6 - 11

9	Ikhtisar Keuangan Financial Highlights
10	Ikhtisar Saham and Efek Lain Stock and Other Securities Highlights
11	Peristiwa Penting Event Highlights

02. LAPORAN KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN

Report to Stakeholders

Page. 12 - 27

14	Laporan Direksi Report of the Board of Directors
22	Laporan Dewan Komisaris Report of the Board of Commissioners
27	Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Tahun Buku 2025 Statement of the Board of Commissioners and Directors about the Responsibility of 2025 Annual Report

03. PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

Page. 28 - 49

30	Informasi Perusahaan Company Information
31	Bidang Usaha Line of Business
31	Riwayat Singkat Brief History
32	Jejak Langkah Milestones
32	Keanggotaan dalam Asosiasi Membership in Associations
33	Visi, Misi dan Nilai-nilai Perusahaan Vision, Mission and Corporate Values
34	Wilayah Operasional Operational Areas
34	Struktur Grup dan Kepemilikan Perusahaan Group Structure and Company Ownership
36	Profil Induk Usaha Holding Company Profile
37	Struktur Organisasi Organizational Structure
38	Profil Dewan Komisaris Profile of the Board of Commissioners
41	Profil Direksi Profile of the Board of Directors
46	Demografi Karyawan Employees Demographics
47	Entitas Anak, Entitas Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama Subsidiaries, Associates and Joint Ventures
48	Kronologi Pencatatan Saham dan Efek Lainnya Chronology of Shares and Other Securities Listing
48	Akuntan Publik Public Accountant
49	Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institutions and Professionals

04.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

Page. 50 - 69

52	Tinjauan Ekonomi dan Industri Analysis of Economics and Industry
53	Tinjauan Bisnis Business Analysis
54	Tinjauan Keuangan Financial Analysis
61	Tingkat Kolektabilitas Piutang dan Solvabilitas Receivables Collectability and Solvency
61	Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Struktur Modal Capital Structure and Its Management Policy
62	Investasi Barang Modal dan Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal Investment in Capital Goods and Its Material Commitment
62	Pengembangan Teknologi Informasi Development of Information Technology
63	Target dan Realisasi Kinerja 2025 Target and Actual Performance of 2025
63	Prospek Usaha dan Proyeksi 2026 2026 Business Prospects and Projections
65	Aspek Pemasaran Marketing Aspects
66	Dividen dan Kebijakan Dividen Dividends and Dividend Policy
66	Program Kepemilikan Saham Karyawan atau Manajemen Employee or Management Share Ownership Program
66	Informasi dan Fakta Material Setelah Tanggal Laporan Akuntan Material Information and Facts Subsequent to the Accountant's Report Date

67

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Uses of Public Offering Proceeds

67

Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau dengan Pihak Afiliasi
Material Transactions That Have Conflict of Interest and/or with Affiliated Parties

68

Perubahan Regulasi
Change in Regulation

69

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Signifikan
Significant Changes in Accounting Policies

05.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance

Page. 70 - 119

72

Landasan Tata Kelola Perusahaan
Foundation of Corporate Governance

74

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
General Meeting of Shareholders (GMS)

82

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

88

Direksi
Board of Directors

93

Kebijakan Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
Nomination and Remuneration Policy of the Board of Directors and Commissioners

94

Dewan Pengawasan Syariah (DPS) dan Komite Lain
Sharia Supervisory Board (SSB) and Other Committee

94

Komite di Bawah Dewan Komisaris
Committees Under the Board of Commissioners

99

Komite Pemantau Risiko
Risk Monitoring Committee

103

Komite Nominasi dan Remunerasi
Nomination and Remuneration Committee

107

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

107

Unit Audit Internal
Internal Audit Unit

110

Sistem Pengendalian Internal
Internal Control System

111

Sistem Manajemen Risiko
Risk Management System

113

Kode Etik
Code of Conduct

115

Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)
Implementation of Anti-Money Laundering (AML) and Counter Financing of Terrorism Financing (CFT) Program and Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (CPF)

116

Kebijakan Anti-Fraud
Anti-Fraud Policy

117

Perkara Hukum
Legal Cases

118

Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistle-blowing Policy

119

Penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan
Implementation of Corporate Governance Guidelines

LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIAUDIT

Audited Financial Statements

Page. 120 - End

01.

IKHTISAR KINERJA

Performance
Highlights

...

4:51 PM

Fri, 23/05

Car wash
mode

Weather

Calendar

Valet mode

Vehicle
diagnostics

Notifications



When Making Experiences, Attention to Detail Matters.

- Here at HCFI, we are thorough, comprehensive, and attentive to specific points. We describe information, plans, or reports that are complete and contain many particulars. We always develop, plan, and execute with great care. We always comprehensive to covering all aspects. We precise and extremely exact, dealing with the smallest details.

IKHTISAR KINERJA

Performance Highlights ...

Berikut adalah pencapaian HCFI dalam tahun pertama operasionalnya.

The following is HCFI's achievement in its first year of operation.

JUMLAH ASET

Total Assets

1.158

Dalam Rp miliar In Rp billion

JUMLAH EKUITAS

Total Equity

985

Dalam Rp miliar In Rp billion

GEARING RATIO

0,10

Kali Times

RASIO PERMODALAN

Capital Ratio

85,04%



IKHTISAR KEUANGAN

Financial Highlights ...

POSISI KEUANGAN (RP JUTA)	FINANCIAL POSITION (RP MILLION)	2025	2024
Aset	Assets		
Kas dan Setara Kas	Cash and Cash Equivalents	790.811	184.955
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	Consumer Financing Receivables - Net	120.356	0
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih	Finance Lease Receivables - Net	4.498	209
Piutang Pembiayaan Penyalur Kendaraan - Bersih	Dealer Financing Receivables - Net	3.678	0
Tagihan Anjak Piutang - Bersih	Factoring Receivables - Net	135.633	151.924
Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Bersih	Fixed Assets and Right-of-use Assets - Net	39.863	1.145
Lain-lain	Others	63.265	34.453
Jumlah Aset	Total Assets	1.158.106	372.686
Liabilitas	Liabilities		
Utang Terkait Pembiayaan	Financing Related Liabilities	5.468	0
Utang Bank	Bank Loan	100.000	0
Lain-lain	Others	67.801	668
Jumlah Liabilitas	Total Liabilities	173.269	668
Ekuitas	Equity		
Jumlah Ekuitas	Total Equity	984.836	372.018

LAPORAN LABA RUGI (RP JUTA)	FINANCIAL POSITION (RP MILLION)	2025	2024
Total Pendapatan	Total Revenues	20.602	107.498
Total Beban	Total Expenses	(139.632)	(34.377)
(Rugi) Laba Sebelum Pajak	(Loss) Profit Before Tax	(119.030)	73.120
(Rugi) Laba Bersih Tahun Berjalan	(Loss) Profit for the Year	(117.376)	65.278
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	Total Comprehensive Income for the Year	(117.182)	65.278

RASIO PENTING	SIGNIFICANT RATIO	2025	2024
Liabilitas terhadap Aset (x)	Liabilites to Assets (x)	0,15	0,00
Liabilitas terhadap Ekuitas (x)	Liabilites to Equity (x)	0,18	0,00
Marjin laba sebelum pajak	Profit before tax margin	-577,75%	68,02%
Marjin laba bersih	Net profit margin	-569,72%	60,73%
Imbal hasil atas Aset	Return on Assets	-26.99%	19.74%
Imbal hasil atas Ekuitas	Return on Equity	-29.46%	18.55%

IKHTISAR SAHAM DAN EFEK LAIN

Stock and Other Securities Highlights

Hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan, Perusahaan tidak mencatatkan saham maupun sekuritas lain untuk diperdagangkan.

As of the publication of this Annual Report, the Company has not listed any shares or other securities for trading.

PERISTIWA PENTING

Event Highlights ...



...

SEPTEMBER SEPTEMBER

Layanan Pembiayaan Kendaraan Auto Financing Services

Layanan pembiayaan kendaraan bagi konsumen Hyundai di pasar domestik mulai tersedia secara luas dengan beberapa skema pembiayaan.

Auto financing services for Hyundai consumers in the domestic market are starting to be widely available with several financing schemes.



...

NOVEMBER NOVEMBER

HCFI Hadirkan Promo Menarik, Memberi Kesempatan Menjadi Pemilik Mobil Hyundai HCFI Presented Interesting Offers, Giving Opportunities to be a Hyundai Vehicle Owner

HCFI hadir di ajang GJAW (Gaikindo Jakarta Auto Week) 2025, salah satu pameran mobil utama di Indonesia, memperkuat merek Hyundai di pasar. HCFI menawarkan banyak produk pembiayaan yang memudahkan untuk menjadi pemilik mobil Hyundai dan meningkatkan aktivitas brand Hyundai di pasar.

HCFI was present GJAW (Gaikindo Jakarta Auto Week) 2025, one of Indonesia's major auto shows, to improve Hyundai brand in the market. HCFI offered a wide range of financing products to make it easier to own a Hyundai cars.



...

DESEMBER DECEMBER

Tanggung Jawab Sosial Corporate Social Responsibility

Mendonasikan tempat sampah pilah kepada MI Sekolah Cinta Ilmu, Bandung serta pemasangan poster mengenai proses pemilahan sampah yang benar.

Donated separate trash cans to Islamic School Cinta Ilmu, Bandung, and installed posters on the right way to process waste.

02.

LAPORAN KEPADA PEMANGKU KEPENTINGAN

Report to
the Stakeholders

...



Management is About Ordering People to Do Things, While Leadership is About Inspiring People with Combines Vision and Character Onto Action.

- Powerful leadership focuses on action, empathy, and empowering others. Leadership is about results, not just attributes. True leaders define their success by fostering growth in others rather than taking credit, inspiring action rather than giving orders. Leading by example is the only true form of leadership, and that's HCFl's striving for.



KUK JOO JANG

Direktur Utama
President Director

Tahun ini menjadi tahun Perusahaan memulai perjalanannya untuk menjadi pemimpin dalam pembiayaan mobilitas di Indonesia.

- This year is the beginning of the Company's journey to become a leader in mobility financing in Indonesia.

...

LAPORAN DIREKSI

Report of the Board of Directors

Para Pemegang Saham yang kami hormati,

Melalui Laporan Tahunan ini, Direksi PT Hyundai Capital Finance Indonesia ("**Direksi**") hendak menyampaikan laporan kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Tahun 2025 merupakan periode penting bagi Perusahaan dalam memperkuat fondasi bisnis sebagai perusahaan pembiayaan otomotif berbasis *captive finance* yang berfokus pada pembiayaan kendaraan Hyundai di Indonesia. Tahun ini menjadi tahun pertama PT Hyundai Capital Finance Indonesia ("**HCFI**") atau ("**Perusahaan**") memulai perjalanannya untuk menjadi pemimpin dalam pembiayaan mobilitas di Indonesia. Untuk itu, Perusahaan telah mengembangkan berbagai solusi pembiayaan yang inovatif, berfokus pada kebutuhan pelanggan serta didukung oleh teknologi digital dan analisis data.

Direksi pun hendak menyampaikan sukacita seiring dengan peluncuran produk-produk Perusahaan yang telah diterima oleh pasar. Peluncuran produk-produk tersebut dilaksanakan setelah menyelesaikan konsolidasi internal pasca akuisisi. Hingga akhir tahun 2025, piutang pembiayaan konsumen tercatat mencapai Rp120,36 miliar, didukung oleh piutang sewa pembiayaan sebesar Rp4,49 miliar serta piutang pembiayaan dealer sebesar Rp3,68 miliar dan Tagihan anjak piutang sebesar Rp 135,63 miliar, yang secara keseluruhan menghasilkan pendapatan pembiayaan sebesar Rp13,53 miliar. Ke depan, Perusahaan berharap dapat terus meningkatkan pencapaian kinerja guna memberikan nilai yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tinjauan Kinerja Tahun 2025

Sepanjang tahun 2025, perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakpastian ekonomi global dan tingkat suku bunga yang relatif tinggi.

Our Respected Shareholders,

Through this Annual Report, the Board of Directors of PT Hyundai Capital Finance Indonesia ("**the Board of Directors**") would like to report on the Company's performance for the financial year ending December 31, 2025. The year 2025 was a crucial period for the Company in strengthening its business foundation as a captive finance-based automotive financing company focused on financing Hyundai vehicles in Indonesia. This year is the first year of PT Hyundai Capital Finance Indonesia's ("**HCFI**") or ("**the Company**") journey to become a leader in mobility financing in Indonesia. To this end, the Company has developed various innovative financing solutions, focused on customer needs and supported by digital technology and data analytics.

The Board of Directors would also like to express joy as the Company's product launches have been well received by the market. The product launches were conducted following the completion of post-acquisition internal consolidation. By the end of 2025, financing receivables had reached Rp120.36 billion, supported by finance lease receivables of Rp4.49 billion, dealer financing receivables of Rp3.68 billion, and factoring receivables of Rp135.63 billion, which collectively generated financing income of Rp13.53 billion. Going forward, the Company hopes to continue improving its performance to deliver optimal value to all stakeholders.

2025 Performance Review

Throughout 2025, the global economy continued to face various challenges, including global economic uncertainty and relatively high interest rates. Despite these conditions,

Di tengah kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2025 mencapai sekitar 5,11%, didukung oleh konsumsi domestik yang stabil, inflasi yang terkendali, serta aktivitas investasi yang terus meningkat. Tingkat inflasi yang relatif rendah, 2,92%, turut menjaga daya beli masyarakat. Tingkat itu pun memberi ruang penurunan suku bunga acuan hingga dua kali, menjadi 4,75% di akhir tahun, meski masih cukup tinggi sebagai biaya pendanaan (*cost of fund*).

Kondisi ini menjadi landasan sektor jasa keuangan sehingga tetap stabil dan adaptif, didukung oleh kondisi permodalan yang kuat serta pengelolaan risiko yang semakin baik. Meski demikian, tekanan pada daya beli masyarakat tetap menjadi tantangan dalam pertumbuhan industri pembiayaan. Pada tahun 2025, nilai piutang pembiayaan industri multifinance tercatat sekitar Rp506,5 triliun, dengan pertumbuhan 0,61% secara tahunan. Kualitas aset masih terjaga pada 2,51%, bahkan sedikit lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Tekanan ini juga tampak pada industri otomotif nasional yang masih menjadi tulang punggung industri pembiayaan. Total penjualan mobil tahun 2025 turun menjadi 803.687 unit secara *wholesales* dan 833.692 unit ritel, menurut Gaikindo, yang mencerminkan penurunan masing-masing 7,2% dan 6,3%. Sejalan dengan penurunan tersebut, pembiayaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) baru oleh industri multifinance juga mengalami kontraksi sekitar 4,56% secara tahunan menjadi Rp142 triliun.

Di sisi lain, ada peluang pertumbuhan khususnya pada segmen kendaraan baru dan kendaraan listrik (*Electric Vehicle/EV*). Dukungan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan kendaraan listrik serta besarnya jumlah penduduk Indonesia memberikan potensi pasar yang signifikan bagi industri pembiayaan otomotif.

Menghadapi ini, kami menangkap peluang sebagai perusahaan *captive finance* dengan fokus pada pembiayaan kendaraan Hyundai sebagai bisnis inti. Kami telah mengidentifikasi dan melakukan *leveraging* atas kekuatan-kekuatan kami, termasuk dukungan Hyundai Group dan kemitraan dengan grup keuangan terbesar, untuk mengoptimalkan kesempatan kami.

Tahun ini, HCFI memperkenalkan dua produk perdananya, yaitu pembiayaan ritel mobil baru bagi pengguna dan pembiayaan *wholesale* bagi *dealer*. Pembiayaan ritel mobil baru ditawarkan dengan berbagai skema pembayaran termasuk skema *balloon payment* dan pembayaran ditangguhkan 50:50 (*deferred payment*) yang dirancang untuk meringankan cicilan bulanan. Melalui skema *balloon payment*, konsumen dapat membayar angsuran ringan tiap bulan dan melunasi sisa pembayaran di akhir periode.

national economic growth in 2025 was projected to reach approximately 5.11%, supported by stable domestic consumption, controlled inflation, and increasing investment activity. The relatively low inflation rate of 2.92% will help maintain public purchasing power. This level also provides room for two cuts in the benchmark interest rate, to 4.75% by the end of the year, although this remains quite high due to the cost of funds.

These conditions serve as the foundation for the financial services sector, ensuring its stability and adaptability, supported by strong capital and improved risk management. However, pressure on consumer purchasing power remains a challenge to be the growth of the financing industry. In 2025, the value of financing receivables in the multifinance industry was recorded at approximately Rp506.5 trillion, with an annual growth of 0.61%. Asset quality remained at 2.51%, slightly better than the previous year.

This pressure is also evident in the national automotive industry, which remains the backbone of the financing industry. Total car sales in 2025 were projected to fall to 803,687 units wholesale and 833,692 units retail, according to Gaikindo, reflecting declines of 7.2% and 6.3%, respectively. Inline with this decline, new four-wheeled vehicle financing by the multifinance industry also contracted by around 4.56% annually, to Rp142 trillion.

On the other side, there were growth opportunities, particularly in the new vehicle and electric vehicle (EV) segments. Government policy support for electric vehicle development, with Indonesia's large population, provides significant market potential for the automotive financing industry.

Facing this, we are seizing opportunities as a captive finance company, focusing on Hyundai Motor Group vehicle financing as our core business. We have identified and leveraged our strengths, including support from the Hyundai Group and partnerships with major financial groups, to optimize our opportunities.

This year, HCFI introduced its first two products, namely new car retail financing for consumers and wholesale financing for dealers. New car retail financing was offered with various payment schemes, including balloon payments and 50:50 deferred payments, designed to reduce monthly installments. With the balloon payment scheme, consumers can make low monthly installments and pay off the remaining balance at the end of the term. Meanwhile, the 50:50 deferred payment scheme allows

Sementara skema 50:50 *deferred payment* memungkinkan konsumen melunasi separuh harga mobil di awal dan sisanya pada akhir periode.

Sementara itu, bagi *dealer*, HCFI menawarkan pembiayaan *wholesale* menggunakan proses digital yang terintegrasi dan penawaran harga yang kompetitif. Untuk memperluas akses, HCFI menempatkan *Credit Marketing Officer* (CMO) di seluruh jaringan dealer Hyundai Motors Indonesia (HMID) di Pulau Jawa yang siap memberikan konsultasi finansial. Konsumen juga bisa mengakses layanan *Customer Direct* secara daring untuk melihat penawaran harga dan mengajukan pembiayaan langsung.

Untuk mendukung penerimaan produk, HCFI membuka kantor cabang di sejumlah kota besar, memperkuat *branding* di jaringan *dealer* Hyundai, bekerjasama dengan vendor IT untuk membuat sistem pembiayaan yang terdiferensiasi (*core system*, *Apps*, dll) untuk program pembiayaan yang lebih inovatif agar konsumen dapat menggunakan pembiayaan dengan mudah. HCFI juga bekerjasama dengan mitra untuk memudahkan konsumen mendapatkan produk pembiayaan.

Upaya-upaya ini telah membuahkan hasil yang nyata di akhir tahun 2025. Piutang pembiayaan konsumen telah mencapai Rp120,36 miliar (2024: nihil), dengan total aset kelolaan Rp264,17 miliar (2024: Rp 152,13 miliar). Pendapatan pembiayaan konsumen tercatat Rp2,89 miliar (2024: nihil), sementara pendapatan total adalah Rp20,60 miliar (2024:107,50 miliar). Tahun ini HCFI masih mencatatkan rugi Rp117,38 miliar (2024: laba Rp65,28 miliar), karena biaya-biaya yang diperlukan untuk persiapan peluncuran produk dan bisnis.

Direksi juga telah membangun landasan keuangan yang kuat, didukung oleh para pemegang saham. Total aset dan ekuitas HCFI pada akhir tahun 2025 masing-masing adalah Rp1,16 triliun dan Rp984,84 miliar, naik 210% dan 164% berkat injeksi modal para pemegang saham sebesar Rp730 miliar. Utang bank Rp100 miliar yang digunakan untuk modal kerja awal, telah dilunasi di tanggal 19 Januari 2026.

Prospek ke Depan dan Target 2026

Memasuki tahun 2026, industri perusahaan pembiayaan di Indonesia diperkirakan akan mengalami pemulihan dan kembali mencatatkan pertumbuhan yang lebih positif dibandingkan tahun sebelumnya. Optimisme tersebut didukung oleh Hyundai Motor Group *collaboration*.

consumers to pay half the car price upfront and the remainder at the end of the term.

Meanwhile, for dealers, HCFI offers wholesale financing using an integrated digital process and competitive pricing. To expand access, HCFI has placed Credit Marketing Officers (CMOs) throughout the Hyundai Motors Indonesia (HMID) dealer network in Java Island, ready to provide financial consultations. Consumers can also access the online Customer Direct service to view pricing offers and apply for financing directly.

To support product acceptance, HCFI has opened branch offices in several major cities, strengthened branding within the Hyundai dealer network, and collaborated with IT vendors to create differentiated financing systems (core systems, Apps, etc.) for more innovative financing programs to facilitate consumer financing. HCFI also collaborate with partners to make it easier for consumers to access financing products.

These efforts have yielded tangible results by the end of 2025. Consumer financing receivables reached Rp120.36 billion (2024:nil), with total assets under management Rp264.17 billion (2024: Rp152.13 billion). Consumer financing income was recorded at Rp2.89 billion (2024: nil), while total revenue was Rp20.60 billion (2024: 107.50 billion). This year, HCFI still recorded a loss of Rp117.38 billion (2024: profit of Rp65.28 billion), due to costs required to prepare for product launches and business operations.

The Board of Directors has also built a strong financial foundation, supported by our shareholders. HCFI's total assets and equity at the end of 2025 were Rp1.16 trillion and Rp984.84 billion, respectively, up 210% and 164%, respectively, thanks to a Rp730 billion capital injection from shareholders. The Rp100 billion bank loan, used for initial working capital, was repaid on January 19, 2026.

Future Prospects and 2026 Targets

Entering 2026, the Indonesian financing industry was expected to recover and record more positive growth than the previous year. This optimism was supported by a Hyundai Motor Group collaboration.

Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2026 berada di kisaran 5,3%, dengan tingkat inflasi yang diperkirakan tetap terjaga di sekitar 2,6%. Stabilitas makroekonomi tersebut diharapkan dapat mendorong aktivitas konsumsi rumah tangga dan investasi, yang pada akhirnya turut meningkatkan permintaan pembiayaan di sektor jasa keuangan.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi tersebut, industri perusahaan pembiayaan juga diproyeksikan mengalami pertumbuhan yang lebih baik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan piutang pembiayaan industri *multifinance* pada tahun 2026 dapat tumbuh sekitar 6%–8% secara tahunan (*year-on-year*). Proyeksi ini mencerminkan optimisme regulator terhadap kemampuan industri untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan seiring dengan membaiknya permintaan dari sektor konsumsi maupun dunia usaha.

Perkembangan pembiayaan kendaraan listrik (*electric vehicle/EV*) diperkirakan menjadi salah satu sumber pertumbuhan bagi industri *multifinance*. Transformasi industri otomotif menuju kendaraan ramah lingkungan, serta dukungan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan ekosistem kendaraan listrik, membuka peluang bagi perusahaan pembiayaan untuk mengembangkan produk pembiayaan baru yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Selain itu, perkembangan digitalisasi di sektor jasa keuangan juga diperkirakan akan mempercepat pertumbuhan industri pembiayaan. Implementasi teknologi digital dalam proses pengajuan kredit, analisis risiko, hingga layanan pelanggan memungkinkan perusahaan pembiayaan meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat.

Meskipun prospek industri dinilai positif, beberapa tantangan tetap perlu diantisipasi oleh pelaku industri. Ketidakpastian kondisi ekonomi global, fluktuasi suku bunga, serta potensi peningkatan risiko kredit dapat mempengaruhi kualitas aset dan pertumbuhan pembiayaan. Oleh karena itu, regulator menekankan pentingnya penerapan manajemen risiko yang *prudent* serta penguatan tata kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usaha.

Memandang perkembangan ini, Direksi akan meningkatkan kapabilitas dan efisiensi HCFI dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, telah menetapkan target sebagai panduan bagi kerja dan inisiatif Direksi, yaitu fokus pada peningkatan penyaluran pembiayaan melalui penguatan kapasitas *sales*, perluasan *coverage* dan jaringan, serta optimalisasi *channel dealer* dan digital. Hal ini didukung oleh ekspansi cabang,

Bank Indonesia projects Indonesia's economic growth in 2026 to be around 5.3%, with inflation expected to remain stable at around 2.6%. This macroeconomic stability was expected to encourage household consumption and investment activity, which would ultimately increase demand for financing in the financial services sector.

In line with these economic developments, the multifinance industry was also projected to experience stronger growth. The Financial Services Authority (OJK) estimates that the multifinance industry's financing receivables will grow by around 6% - 8% year-on-year in 2026. This projection reflects the regulator's optimism about the industry's ability to increase financing distribution in line with improving demand from both the consumer and business sectors.

The development of electric vehicle (EV) financing was expected to be a source of growth for the multifinance industry. The automotive industry's transformation toward environmentally friendly vehicles, coupled with government policy support for the development of the electric vehicle ecosystem, opens up opportunities for finance companies to develop new, more innovative, and sustainable financing products.

Furthermore, the development of digitalization in the financial services sector was also expected to accelerate the growth of the financing industry. The implementation of digital technology in the credit application process, risk analysis, and customer service enables financing companies to improve operational efficiency while expanding access to financing for the public.

While the industry's outlook was considered positive, several challenges remain that industry players must anticipate. Uncertainty in global economic conditions, interest rate fluctuations, and the potential for increased credit risk can impact asset quality and financing growth. Therefore, regulators emphasize the importance of implementing prudent risk management and strengthening corporate governance in conducting business activities.

In light of these developments, the Board of Directors will improve HCFI's capabilities and efficiency in carrying out its business activities. The Board of Directors, with the approval of the Board of Commissioners, has established targets to guide the Board of Directors work and initiatives, namely to focus on increasing financing distribution by strengthening sales capacity, expanding coverage and networks, and optimizing dealer and digital channels. This is supported

peningkatan kemampuan eksekusi, serta diversifikasi pendanaan melalui fasilitas perbankan untuk mendukung pertumbuhan portofolio.

Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Direksi menyadari bahwa tata kelola yang baik akan membawa HCFI menjadi perusahaan pembiayaan yang terpercaya dan mencapai visinya sebagai pemimpin dalam pembiayaan mobilitas di Indonesia. Karena itu sepanjang tahun 2025, kami memastikan semua landasan untuk tata kelola telah dibangun dengan baik. Direksi menyusun dan menetapkan piagam-piagam bagi setiap organ struktur tata kelola, pedoman kerja bagi setiap unit dan jabatan. Direksi juga menetapkan panduan untuk mencegah penyelewengan serta penyimpangan dalam kegiatan operasional Perusahaan.

Direksi telah menyusun dan mensosialisasikan Kode Etik yang berlaku bagi setiap orang tanpa kecuali, termasuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Direksi telah membentuk sistem pelaporan pelanggaran yang memastikan keamanan dan pelaporan bagi pelapor, serta menetapkan tindakan yang adil bagi pelaku pelanggaran.

Direksi juga menyadari bahwa pengelolaan dan pengendalian risiko merupakan bagian krusial di dalam keberlanjutan Perusahaan sebagai perusahaan pembiayaan. Maka, tahun ini Perusahaan fokus pada pembangunan fondasi manajemen risiko yang kuat, dengan cara melakukan (1) pengembangan kebijakan dan kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif, (2) penguatan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko di seluruh aktivitas operasional, (3) pengembangan sistem pendukung proses pembiayaan, (4) penguatan fungsi pengawasan dan tata kelola risiko melalui pembentukan komite dan struktur organisasi yang mendukung implementasi manajemen risiko secara independen, dan (5) pengembangan budaya sadar risiko di seluruh unit kerja melalui pelatihan dan sosialisasi kebijakan manajemen risiko.

Untuk memastikan persiapan dilakukan dengan sebaik-baiknya dan penyelenggaraan dapat berjalan sesuai dengan praktik-praktik terbaik, HCFI telah mengangkat para profesional yang telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan OJK (*fit and proper test*). Berikut adalah susunan Direksi HCFI pada 31 Desember 2025:

by branch expansion, enhanced execution capabilities, and funding diversification through banking facilities to support portfolio growth.

Corporate Governance Implementation

The Board of Directors recognizes that good governance will enable HCFI to become a trusted financing company and achieve its vision as a leader in mobility financing in Indonesia. Therefore, throughout 2025, the Board of Directors ensured that all foundations for governance were well established. the Board of Directors developed and established charters for each organ of the governance structure, as well as work guidelines for each unit and position. the Board of Directors also established guidelines to prevent fraud and irregularities in our activities.

The Board of Directors have developed and disseminated a Code of Conduct that applies to everyone without exception, including members of the Board of Directors and Commissioners. The Board of Directors have established a whistleblowing system that ensures the safety and reporting of whistleblowers and establishes fair action for perpetrators.

The Board of Directors also recognize that risk management and control are crucial to the Company's sustainability as a financing company. Therefore, this year we are focusing on building a strong risk management foundation, by (1) developing a comprehensive risk management policy and framework; (2) strengthening in the process of identifying, measuring, monitoring, and controlling risk across all operational activities; (3) developing a financing process support system; (4) strengthening the risk oversight and governance function through the establishment of committees and organizational structures that support the independent implementation of risk management; and (5) developing a risk-aware culture across all work units through training and the dissemination of risk management policies.

To ensure the best possible preparation and that the event runs according to best practices. HCFI has appointed professionals who have passed the OJK's fit and proper test. The following is the composition of the HCFI's Board of Directors as of December 31, 2025:

Direktur Utama	President Director	Kuk Joo Jang
Direktur Keuangan	Finance Director	Soon Sang Kwon
Direktur	Director	Nicole Oesman
Direktur	Director	Cahaya Gutama Sarwono

Nicole Oesman dan Cahaya Gutama Sarwono saat ini telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan tanggal 15 Desember 2025 dan diangkat berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 9 Januari 2026.

Nicole Oesman and Cahaya Gutama Sarwono have now passed the Fit and Proper test on December 15, 2025, and had been appointed based on Deed Number 17 dated January 9, 2026.

Penutup dan Apresiasi

Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dewan Komisaris atas arahan dan pengawasannya, kepada para pemegang saham atas dukungan yang berkelanjutan, serta kepada seluruh karyawan atas kerja kerasnya.

Closing and Appreciation

We take this opportunity to express our deepest appreciation to the Board of Commissioners for their guidance and supervision, to our shareholders for their continued support, and to all our employees for their hard work.

Direksi juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelanggan, mitra bisnis, serta pemangku kepentingan atas kepercayaan yang diberikan kepada HCFI untuk membangun masa depan *mobility finance* di Indonesia.

The Board of Directors also extend our gratitude to all our customers, business partners, and stakeholders for their trust in HCFI to build the future of mobility finance in Indonesia.

Atas nama Direksi,
On behalf of the Board of Directors,



KUK JOO JANG

Direktur Utama | President Director

**NICOLE
OESMAN**

Direktur
Director

KUK JOO JANG

Direktur Utama
President Director

**WOOCHAN
YOON**

Presiden Komisaris
President
Commissioner

DAVID WIBAWA

Komisaris Independen
Independent
Commissioner

**CAHAYA
GUTAMA
SARWONO**

Direktur
Director

**SOON SANG
KWON**

Direktur Keuangan
Finance Director





WOOCHAN YOON

Presiden Komisaris
President Commissioner

Dewan Komisaris mendukung strategi pertumbuhan yang berfokus pada penguatan kapabilitas operasional, peningkatan kualitas layanan, serta perluasan jaringan distribusi pembiayaan melalui jaringan *dealer* dan *platform* digital.

- The Board of Commissioners supports the growth strategy focused on strengthening operational capabilities, improving service quality, and expanding the financing distribution network through dealer networks and digital platforms.

...

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Report of the Board of Commissioners

Para Pemegang Saham yang kami hormati,

Tahun 2025 merupakan periode yang penting bagi Perusahaan dalam membangun fondasi operasional dan memulai kegiatan bisnis sebagai perusahaan pembiayaan otomotif berbasis *captive finance* yang berfokus pada pembiayaan kendaraan Hyundai di Indonesia. Untuk memastikan keberlanjutan usaha, Dewan Komisaris memberikan perhatian khusus terhadap kesiapan organisasi, penguatan struktur tata kelola, serta pengembangan sistem dan infrastruktur bisnis yang diperlukan untuk mendukung peluncuran produk dan ekspansi usaha Perusahaan.

Penilaian terhadap Kinerja Direksi

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menjalankan fungsi pengelolaan Perusahaan dengan baik sepanjang tahun 2025, khususnya dalam membangun fondasi bisnis dan mempersiapkan peluncuran produk pembiayaan Perusahaan.

Pada tahun ini, Perusahaan berhasil meluncurkan produk pembiayaan ritel kendaraan Hyundai serta pembiayaan *wholesale* bagi jaringan *dealer*. Inisiatif tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Perusahaan sebagai perusahaan pembiayaan *captive* yang mendukung ekosistem bisnis Hyundai di Indonesia.

Meskipun saat ini biaya Perusahaan masih lebih tinggi daripada pendapatan, Dewan Komisaris memahami bahwa kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari investasi awal yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur bisnis, sistem teknologi informasi, serta pengembangan organisasi. Perusahaan juga berhasil menunjukkan pertumbuhan awal

Our Respected Shareholders,

2025 was a crucial period for the Company in building its operational foundation and launching its business activities as a captive finance-based automotive financing company focused on financing Hyundai vehicles in Indonesia. To ensure business sustainability, the Board of Commissioners is paying special attention to organizational readiness, strengthening the governance structure, and developing the business systems and infrastructure necessary to support the Company's product launches and business expansion.

Assessment of the Board of Directors' Performance

The Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has performed its management functions effectively throughout 2025, particularly in building the business foundation and preparing for the launch of the Company's financing products.

This year, the Company successfully launched retail financing products for Hyundai vehicles and wholesale financing for its dealer network. These initiatives represent a strategic step in strengthening the Company's position as a captive financing company supporting the Hyundai business ecosystem in Indonesia.

Although currently, the Company's expenses were higher than the revenues, the Board of Commissioners understands that this is a consequence of significant initial investments in business infrastructure development, information technology systems, and organizational development. The Company also demonstrated initial

portofolio pembiayaan dengan piutang pembiayaan konsumen yang mencapai Rp120,36 miliar pada akhir tahun 2025.

Selain itu, Dewan Komisaris menilai Direksi telah berhasil memperkuat struktur permodalan Perusahaan melalui dukungan pemegang saham, sehingga Perusahaan memiliki basis keuangan yang solid untuk mendukung ekspansi usaha di masa mendatang. Total aset Perusahaan pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp1,16 triliun dengan ekuitas sebesar Rp984,84 miliar.

Pengawasan terhadap Implementasi Strategi

Dewan Komisaris secara berkala melakukan penelaahan terhadap implementasi strategi bisnis yang dijalankan oleh Direksi.

Sepanjang tahun 2025, Dewan Komisaris memberikan arahan kepada Direksi untuk memanfaatkan kekuatan Perusahaan sebagai bagian dari ekosistem Hyundai Motor Group serta memaksimalkan sinergi dengan jaringan *dealer* Hyundai di Indonesia. Dewan Komisaris juga mendukung pengembangan berbagai program pembiayaan yang inovatif dan kompetitif guna meningkatkan daya tarik produk Perusahaan di pasar.

Selain itu, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk mempercepat digitalisasi proses pembiayaan melalui pengembangan sistem pembiayaan yang terintegrasi serta pemanfaatan teknologi dalam proses analisis kredit dan layanan pelanggan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap produk pembiayaan Perusahaan.

Pengawasan terhadap Tata Kelola Perusahaan

Dewan Komisaris memberikan perhatian yang besar terhadap penerapan prinsip *Good Governance* sebagai fondasi bagi keberlanjutan usaha Perusahaan.

Sepanjang tahun 2025, Perusahaan telah melakukan berbagai inisiatif untuk membangun kerangka tata kelola yang kuat, termasuk penyusunan piagam bagi organ tata kelola, pedoman kerja bagi unit organisasi, serta penetapan kode etik yang berlaku bagi seluruh insan Perusahaan.

Dewan Komisaris juga menilai bahwa Direksi telah mengambil langkah-langkah penting dalam membangun sistem manajemen risiko yang komprehensif. Upaya tersebut antara lain melalui pengembangan kebijakan dan kerangka kerja manajemen risiko, penguatan proses identifikasi dan pengendalian risiko, serta pembangunan sistem pendukung pembiayaan.

growth in its financing portfolio, with consumer financing receivables reaching Rp120.36 billion by the end of 2025.

Furthermore, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has successfully strengthened the Company's capital structure through shareholder support, providing the Company with a solid financial base to support future business expansion. The Company's total assets at the end of 2025 were recorded at Rp1.16 trillion, with equity of Rp984.84 billion.

Oversight of Strategy Implementation

The Board of Commissioners regularly reviews the implementation of the business strategy implemented by the Board of Directors.

Throughout 2025, the Board of Commissioners provides guidance to the Board of Directors to leverage the Company's strengths as part of the Hyundai Motor Group ecosystem and maximize synergies with the Hyundai dealer network in Indonesia. The Board of Commissioners also supports the development of various innovative and competitive financing programs to enhance the Company's product appeal in the market.

In addition, the Board of Commissioners is encouraging the Board of Directors to accelerate the digitalization of the financing process by developing an integrated financing system and utilizing technology in credit analysis and customer service. This step was expected to improve operational efficiency while expanding public access to the Company's financing products.

Corporate Governance Oversight

The Board of Commissioners places significant emphasis on the implementation of Good Governance principles as a foundation for the Company's business sustainability.

Throughout 2025, the Company has undertaken various initiatives to build a robust governance framework, including the development of a charter for its governance organs, work guidelines for its organizational units, and the establishment of a code of conduct applicable to all Company personnel.

The Board of Commissioners also assesses that the Board of Directors has taken important steps in establishing a comprehensive risk management system. These efforts include developing risk management policies and frameworks, strengthening risk identification and control processes, and developing financing support systems.

Selain itu, Dewan Komisaris mendukung penguatan fungsi pengawasan internal melalui pembentukan struktur organisasi dan komite yang mendukung implementasi manajemen risiko secara independen, serta pengembangan budaya sadar risiko di seluruh unit kerja.

Untuk membantu tugas pengawasan ini, Dewan Komisaris memiliki tiga komite, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Nominasi dan Remunerasi.

Berikut adalah susunan Dewan Komisaris Perusahaan pada akhir tahun 2025, sesuai dengan keputusan RUPS dan persetujuan OJK:

Presiden Komisaris	President Commissioner	Woochan Yoon
Komisaris Independen	Independent Commissioner	David Wibawa

Pandangan atas Prospek Usaha

Dewan Komisaris memandang bahwa industri pembiayaan di Indonesia masih memiliki prospek pertumbuhan yang baik, seiring dengan potensi pasar otomotif nasional serta perkembangan kendaraan listrik yang semakin pesat.

Transformasi industri otomotif menuju kendaraan ramah lingkungan serta meningkatnya digitalisasi layanan keuangan akan membuka peluang baru bagi perusahaan pembiayaan untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif. Dalam konteks ini, posisi Perusahaan sebagai perusahaan pembiayaan *captive* bagi kendaraan Hyundai memberikan peluang strategis untuk memanfaatkan pertumbuhan tersebut.

Dewan Komisaris mendukung langkah Direksi dalam menetapkan strategi pertumbuhan yang berfokus pada penguatan kapabilitas operasional, peningkatan kualitas layanan, serta perluasan jaringan distribusi pembiayaan melalui jaringan *dealer* dan *platform* digital. Dengan mempertimbangkan kondisi yang dihadapi, Dewan Komisaris telah menyetujui target-target yang ditetapkan oleh Direksi.

Untuk mencapai target-target tersebut, Dewan Komisaris telah memberikan nasihat-nasihat berikut:

- Memperkuat penetrasi pasar pembiayaan kendaraan Hyundai Motor Group melalui pengembangan program pembiayaan yang kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan konsumen.
- Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi proses pembiayaan serta kualitas layanan kepada pelanggan.

Furthermore, the Board of Commissioners supports strengthening the internal oversight function through the establishment of an organizational structure and committees that support the implementation of independent risk management, as well as fostering a risk-aware culture across all work units.

To assist in this oversight task, the Board of Commissioners has established three committees, namely the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee.

The following is the composition of the Company's Board of Commissioners at the end of 2025, in accordance with the resolutions of the GMS and approval by the OJK:

Business Prospects

The Board of Commissioners believes that the financing industry in Indonesia still has good growth prospects, in line with the potential of the national automotive market and the increasingly rapid development of electric vehicles.

The transformation of the automotive industry toward environmentally friendly vehicles and the increasing digitalization of new opportunities for financing companies to develop more innovative products and services. In this context, the Company's position as a captive financing company for Hyundai vehicles provides a strategic opportunity to capitalize on this growth.

The Board of Commissioners supports the Board of Directors' steps in establishing a growth strategy focused on strengthening operational capabilities, improving service quality, and expanding the financing distribution network through dealer networks and digital platforms. Taking into account the current conditions, the Board of Commissioners has approved the targets set by the Board of Directors.

To achieve these targets, the Board of Commissioners has provided the following recommendations:

- Strengthening Hyundai Motor Group's vehicle financing market penetration by developing competitive financing programs tailored to consumer needs.
- Optimizing the use of digital technology to improve the efficiency of the financing process and the quality of customer service.

- Memperkuat implementasi manajemen risiko dan sistem pengendalian internal seiring dengan pertumbuhan portofolio pembiayaan Perusahaan.
- Mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional guna mendukung pertumbuhan bisnis Perusahaan.
- Menjaga penerapan tata kelola yang baik secara konsisten sesuai dengan peraturan yang berlaku dan praktik terbaik di industri.

- Strengthening the implementation of risk management and internal control systems in line with the growth of the Company's financing portfolio.
- Develop competent and professional human resources to support the Company's business growth.
- Maintain the consistent implementation of good governance in accordance with applicable regulations and industry best practices.

Penutup

Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kepada Direksi dan seluruh karyawan Perusahaan atas dedikasi dan kerja keras yang telah ditunjukkan sepanjang tahun 2025 dalam membangun fondasi bisnis Perusahaan.

Dewan Komisaris juga menyampaikan terima kasih kepada para pemegang saham, mitra bisnis, regulator, serta seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada PT Hyundai Capital Finance Indonesia.

Dengan fondasi bisnis yang semakin kuat serta dukungan pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan, Dewan Komisaris optimistis bahwa Perusahaan akan mampu tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan industri pembiayaan di Indonesia.

Closing

The Board of Commissioners expresses its appreciation to the Board of Directors and all employees of the Company for their dedication and hard work throughout 2025 in building the Company's business foundation.

The Board of Commissioners also expresses its gratitude to the shareholders, business partners, regulators, and all stakeholders for their support and trust in PT Hyundai Capital Finance Indonesia.

With an increasingly strong business foundation and the support of shareholders and all stakeholders, the Board of Commissioners is optimistic that the Company will be able to grow sustainably and make a greater contribution to the development of the financing industry in Indonesia.

Atas nama Dewan Komisaris,
On behalf of the Board of Commissioners,



WOOCHAN YOON

Presiden Komisaris | President Commissioner

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2025

Statement of the Board of Commissioners and Directors about the Responsibility of 2025 Annual Report

...

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan tahun buku 2025 PT Hyundai Capital Finance Indonesia adalah benar dan lengkap. Kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi laporan ini.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report of PT Hyundai Capital Finance Indonesia for the fiscal year of 2025 have been true and complete. We are responsible for the accuracy of this report.

DEWAN KOMISARIS | THE BOARD OF COMMISSIONERS



WOOCHAN YOON
Presiden Komisaris
President Commissioner



DAVID WIBAWA
Komisaris Independen
Independent Commissioner

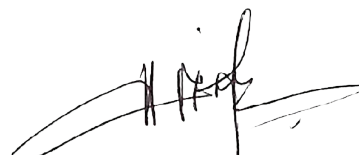
DIREKSI | THE BOARD OF DIRECTORS



KUK JOO JANG
Direktur Utama
President Director



SOON SANG KWON
Direktur Keuangan
Finance Director



NICOLE OESMAN
Direktur
Director



**CAHAYA GUTAMA
SARWONO**
Direktur Director

03.

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

...



Confidence Builds Success, Embrace Your Power, and Drive Fearlessly into the Future.



HCFL's company identity is the core personality, values, and reputation of our business, acting as a promise to customers and a guide for culture. The key insights emphasize that our Company brands are built on authenticity, consistent experiences, and emotional connections, rather than just products, often defined by reputation.

INFORMASI PERUSAHAAN

Company Information

Nama Perusahaan
Company Name

PT Hyundai Capital Finance Indonesia

Pada 19 Juni 2024, sehubungan dengan proses akuisisi Perusahaan dan perubahan komposisi pemegang saham pada tahun 2024, maka nama Perusahaan diubah dari PT Paramitra Multifinance menjadi PT Hyundai Capital Finance Indonesia untuk mencerminkan identitas kepemilikan yang baru.

On June 19, 2024, in connection with the Company's acquisition process and changes in the composition of shareholders in 2024, the Company's name was changed from PT Paramitra Multifinance to PT Hyundai Capital Finance Indonesia to reflect the new ownership identity.

Alamat Kantor Pusat
Head Office Address

Sequis Tower, 23rd Floor, Unit 1 - 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 71, Senayan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan *South Jakarta* 12190

Kantor Cabang
Branch Offices

Ruko Plaza 5 Pondok Indah, Jl. Margaguna Blok A Kav. 1, Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan *South Jakarta* 12140

Ruko Northridge Business Center Blok B1 No.21, BSD City, Lengkong Kulon, Pagedangan, Tangerang, Banten 15331

Ruko Topaz TC B-21 Summarecon, Jl. Bulevar Barat, Harapan Mulya Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat *West Java* 17143

Ruko Pakuwon Town Square Blok AA2-029, Kejawaan Putih Tamba, Kec. Mulyorejo Surabaya, Jawa Timur 60112

Situs Web *Website*

hyundaicapital.co.id

Customer Care

1500 708

Telepon *Phone*

08111 500 708

Email

contactus@hyundaicapital.co.id

Pemegang Saham
Shareholders

Hyundai Capital Services	75,1%
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	15,0%
PT Bank Shinhan Indonesia	9,9%

Jumlah Karyawan
Number of Employees

141 orang *employees*

BIDANG USAHA

Line of Business

Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-072/KM.11/1985 tentang Pemberian Izin Usaha Dalam Bidang *Leasing* Kepada PT Patria Nusa Mulia Leasing Indonesia yang telah diubah terakhir berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-068/KM.5/2005 tanggal 14 Februari 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-072/KM.11/1985 tentang Pemberian Izin Usaha Dalam Bidang Leasing Kepada PT Patria Nusa Mulia Leasing Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.013/1990, memberlakukan izin usaha di bidang Perusahaan Pembiayaan yang diberikan kepada PT Paramitra Multifinance kepada Perusahaan. Dengan keputusan tersebut, Perusahaan yang telah mengganti nama menjadi PT Hyundai Capital Finance Indonesia memiliki izin usaha dalam bidang perusahaan pembiayaan.

Decree of the Minister of Finance Number KEP-072/KM.11/1985 concerning Granting of Business License in the Field of Leasing to PT Patria Nusa Mulia Leasing Indonesia which has been last amended by Decree of the Minister of Finance Number KEP-068/KM.5/2005 dated February 14, 2005 concerning Amendments to Decree of the Minister of Finance Number KEP-072/KM.11/1985 concerning Granting of Business License in the Field of Leasing to PT Patria Nusa Mulia Leasing Indonesia as Last Amended by Decree of the Minister of Finance Number 302/KMK.013/1990, applies the business license in the field of Financing Companies granted to PT Paramitra Multifinance to the Company. By this decision, the Company, which replaced its name into PT Hyundai Capital Finance Indonesia, owns the license in financing industry.

RIWAYAT SINGKAT

Brief History

PT Hyundai Capital Finance Indonesia merupakan perusahaan pembiayaan yang berdiri sebagai hasil transformasi dari PT Paramitra Multifinance ("**PMF**"), yang telah beroperasi sejak tahun 1984.

PT Hyundai Capital Finance Indonesia is a financing company established as a result of the transformation of PT Paramitra Multifinance ("**PMF**"), which has been operating since 1984.

Pada tahun 2024, Hyundai Capital Services yang merupakan anak perusahaan dari Hyundai Motor Group, secara resmi mengakuisisi PMF sebagai bagian dari strategi ekspansi globalnya, khususnya untuk memperkuat kehadiran di pasar Asia Tenggara.

In 2024, Hyundai Capital Services, a subsidiary of Hyundai Motor Group, officially acquired PMF as part of its global expansion strategy, specifically to strengthen its presence in the Southeast Asian market.

Proses akuisisi ini juga diikuti dengan perubahan nama Perusahaan menjadi PT Hyundai Capital Finance Indonesia dan telah memperoleh izin usaha baru dari Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut sebagai "OJK") sebagaimana dalam Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-281/PL.02/2024 tentang Pemberlakuan Izin Usaha di Bidang Perusahaan Pembiayaan Sehubungan Perubahan Nama PT Paramitra Multifinance menjadi PT Hyundai Capital Finance Indonesia tertanggal 19 Juni 2024.

This acquisition process was also accompanied by a change in the Company's name to PT Hyundai Capital Finance Indonesia (hereinafter referred to as "HCFI") and the acquisition of a new business license from the Financial Services Authority (hereinafter referred to as "OJK") as stipulated in the Decree of the Board of Commissioners of OJK Number KEP-281/PL.02/2024 concerning the Implementation of Business Licenses in the Financing Company Sector in Connection with the Name Change of PT Paramitra Multifinance to PT Hyundai Capital Finance Indonesia, dated June 19, 2024.

Perubahan tersebut menandai dimulainya langkah baru dalam operasional HCFI di bawah struktur kepemilikan yang baru. Kini, sebagai bagian dari Hyundai Motor Group, HCFI memiliki visi untuk menjadi pemimpin dalam pembiayaan mobilitas di Indonesia, khususnya kendaraan bermotor roda 4 (empat) dengan mengedepankan solusi pembiayaan yang inovatif, digital dan terintegrasi dengan ekosistem otomotif Hyundai Motor Group.

This change marked the beginning of a new phase in HCFI's operations under a new ownership structure. Now, as part of the Hyundai Motor Group, HCFI has a vision to be an Indonesian leader in mobility finance, especially in the 4-wheeled motor vehicle financing sector by prioritizing innovative, digital and integrated financing solutions with the Hyundai Motor Group automotive ecosystem.

JEJAK LANGKAH

Milestones ...

Hyundai Capital

2025

Peluncuran produk Hyundai Finance bagi pasar Indonesia.

Hyundai Finance product launch for the Indonesian market.

HYUNDAI
MOTOR GROUP

2024

- Diakuisisi oleh Hyundai Capital Services dan menjadi bagian dari Hyundai Motor Group.
- Mendapatkan izin usaha baru dari OJK.
- Acquired by Hyundai Capital Services and became part of the Hyundai Motor Group.
- Obtained a new business license from the OJK.

1984 - 2023

Didirikan dengan nama PT Patria Nusa Mulia Leasing lalu berganti menjadi PT Paramitra Multifinance.

Founded under the name PT Patria Nusa Mulia Leasing then changed to PT Paramitra Multifinance.

KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI

Membership in Associations

Perusahaan telah menjadi anggota pada Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI).

The Company is a member in Indonesia Finance Services Association (APPI).

VISI • VISION

Pemimpin dalam Pembiayaan Mobilitas di Indonesia.

Indonesia Leader in Mobility Finance.



MISI • MISSION

- Menjadi mitra "Captive Finance" terkemuka di Indonesia.
- Menyediakan solusi keuangan yang dioptimalkan untuk mobilitas masa depan dengan bisnis yang berfokus pada pelanggan.
- Menginovasikan model bisnis melalui analisis data dan digitalisasi.
- Mengamankan mesin pertumbuhan baru melalui kemitraan strategis, pengembangan SDM, dan investasi teknologi.
- Be an Indonesia top-tier captive finance partner.
- Provide financial solutions optimized for future mobility with customer-centered business.
- Innovate the business model through data analytics and digitalization
- Secure new growth engines through strategic partnerships, HR development and technology investments.





VISI, MISI & NILAI-NILAI PERUSAHAAN

Vision, Mission & Corporate Values



NILAI-NILAI PERUSAHAAN CORPORATE VALUES

HCFI percaya bahwa "Bersama-sama, semua orang dapat mencapai hasil yang luar biasa." Karena itu HCFI menyadari pentingnya budaya Perusahaan sebagai fondasi dalam mencapai kinerja Perusahaan yang dirangkum dalam 6 Nilai Inti sebagai berikut:

HCFI believes that "Together, ordinary people can achieve extraordinary results." Therefore, HCFI recognize the importance of corporate culture as a foundation in achieving the Company's performance, which is summarized in the following 6 Core Values:

SEMANGAT SATU TIM

ONE TEAM SPIRIT

Bagikan informasi secara bebas dan menyeluruh
Share information freely and completely

FOKUS PADA ESENSIAL

FOCUS ON ESSENTIALS

Hilangkan pekerjaan yang tidak perlu untuk fokus pada inti
Eliminate unnecessary work to focus on the core

PETUALANGAN TANPA RASA TAKUT

FEARLESS ADVENTURE

Hadapi tantangan besar dengan berani dan belajar dari kesalahan
Embrace bold challenges and learn from mistakes

BERPIKIR DI LUAR KEBIASAAN

THINK OUTSIDE THE BOX

Tunjukkan keberanian untuk mengambil jalan yang tidak dikenal dan mengusulkan ide-ide baru
Show courage to take the unfamiliar path and propose new ideas

BERTANGGUNG JAWAB DENGAN PENUH DAN CEPAT

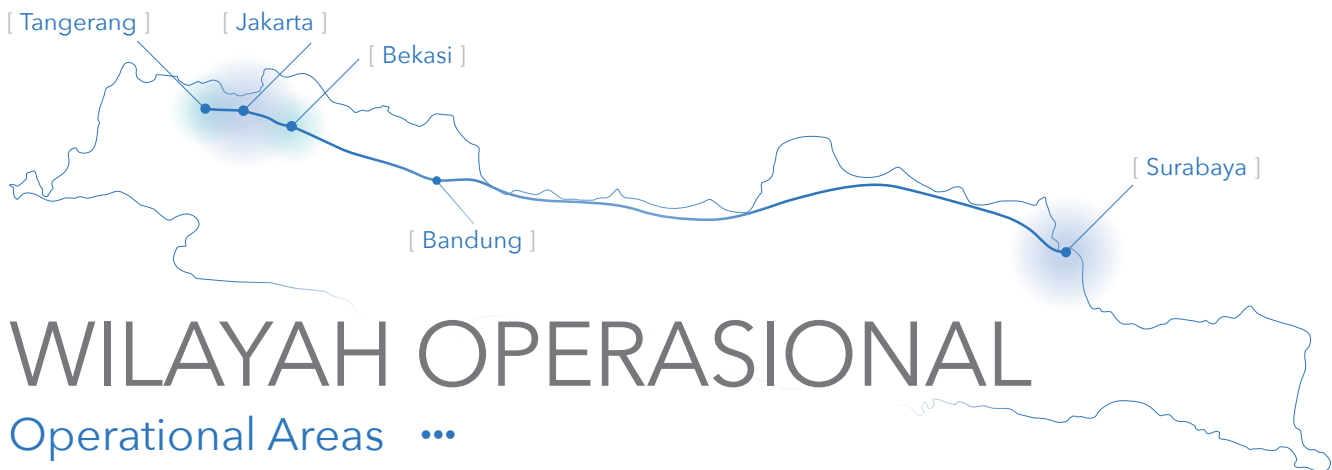
FAST OWNER

Bertanggung jawab penuh dari awal hingga akhir dan mencapai tujuan dengan cepat
Take end-to-end ownership and achieve the goal with speed

PRIORITAS PADA PELANGGAN

CUSTOMER FIRST

Berkomitmen untuk memahami dan memprioritaskan pelanggan
Commit to understanding and prioritizing the customer

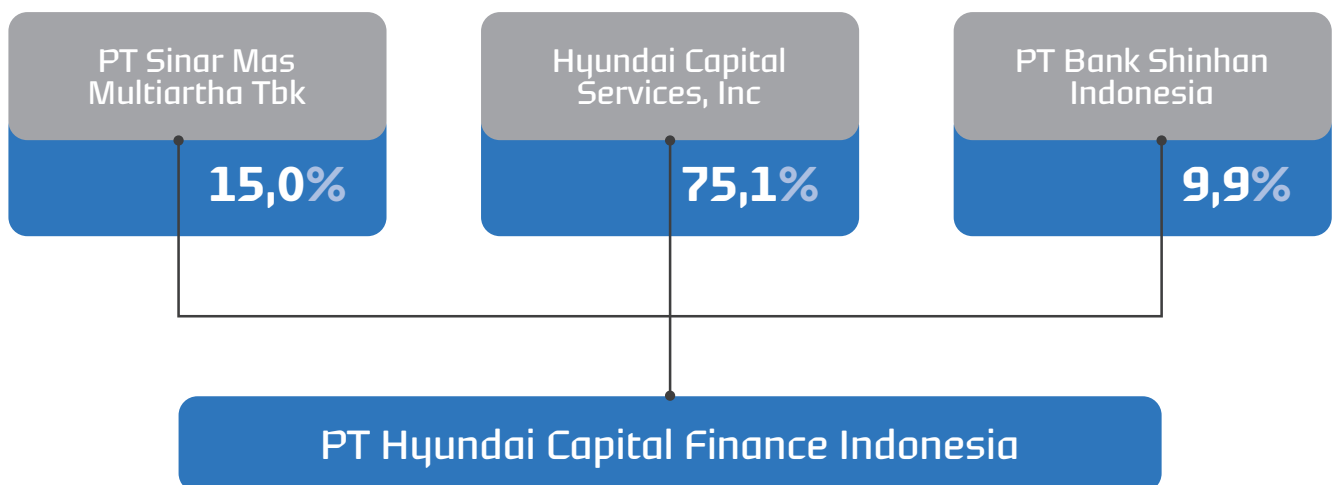


Pada tahun 2025, HCFI telah hadir di kantor-kantor cabang Perusahaan di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi serta rencana pembukaan Kantor Cabang Bandung. Pada awal tahun 2026, Perusahaan juga telah mendapatkan ijin OJK untuk membuka cabang di Surabaya.

In 2025, HCFI is present at the Company's branch offices in Jakarta, Tangerang, and Bekasi as well as the plan to open Bandung Branch Office. At the beginning of 2026, the Company obtained OJK's license to open its branch in Surabaya.

STRUKTUR GRUP DAN KEPEMILIKAN PERUSAHAAN

Group Structure and Company Ownership ...



KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM BERDASARKAN BATAS KEPEMILIKAN 5% COMPOSITION OF SHARE OWNERSHIP BASED ON 5% OWNERSHIP THRESHOLD	Kepemilikan Saham pada 1 Januari 2025 Share Ownership on January 1, 2025		Kepemilikan Saham pada 31 Desember 2025 Share Ownership on December 31, 2025	
	Jumlah Saham Number of Shares	Kepemilikan Ownership (%)	Jumlah Saham Number of Shares	Kepemilikan Ownership (%)
Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Shareholders with 5% (five percent) share ownership or more				
Hyundai Capital Service, Inc*	300.000.000	75%	848.404.700	75,1%
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	60.000.000	15%	169.455.000	15,0%
PT Bank Shinhan Indonesia	39.700.000	10%	111.840.300	9,9%
Total	399.700.000	100%	1.129.700.000	100,0%

Keterangan • Notes

*) Merupakan pemegang saham pengendali Perusahaan
Controlling shareholder of the Company

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM BERDASARKAN KLASIFIKASI COMPOSITION OF SHARE OWNERSHIP BASED CLASSIFICATION	Kepemilikan Saham pada 31 Desember 2025 Share Ownership on December 31, 2025		
	Jumlah Pemegang Saham Total Shareholders	Jumlah Saham Number of Shares	Kepemilikan Ownership (%)
Pemodal Nasional National Investors			
Perorangan Individual	-	-	-
Institusi Institutions	1	169.455.000	15,0%
Pemodal Asing Foreign Investors			
Perorangan Individual	-	-	-
Institusi Institutions	2	960.245.000	85,0%
Total	3	1.129.700.000	100,0%

Kepemilikan Saham oleh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan tidak memiliki saham Perusahaan.

Share Ownership by Members of the Board of Directors and Commissioners

Members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners do not own shares in the Company.

PROFIL INDUK USAHA

Holding Company Profile ...



Hyundai Capital Services, Inc. ("**HCS**"), perusahaan pembiayaan *captive* terkemuka di pasar, adalah pelopor dalam bisnis pembiayaan kredit di Korea, yang kokoh berada di posisi pertama di pasar pembiayaan otomotif Korea sejak diluncurkan pada tahun 1996.

Kami menyediakan layanan keuangan untuk Hyundai Motors, Kia, dan Genesis, dengan visi untuk menjadi "Pemimpin Global dalam Pembiayaan Mobilitas". Berkantor pusat di Korea Selatan, bisnis kami tersebar di 17 entitas/cabang di 14 negara di seluruh dunia, termasuk AS, Inggris, Tiongkok, dan Jerman. HCS adalah mitra aktif yang mendukung pertumbuhan Hyundai Motor Group di pasar Eropa dan ASEAN.

Sebagai bagian dari pembiayaan *captive* dari Hyundai Motor Group, kami menawarkan produk dan layanan pembiayaan yang berbeda untuk *dealer* dan pelanggan otomotif, mulai dari pembiayaan *wholesale/retail* hingga bisnis biaya asuransi dan pembiayaan mobil bekas, seperti pembiayaan Hyundai/Kia *Certificated Pre-Owned*. Untuk menghadapi perubahan dalam lingkungan mobilitas global yang berkembang pesat, Hyundai Capital telah melakukan diversifikasi model bisnis, mengembangkan produk mobilitas seperti layanan berlangganan/sewa, dan memperluas bisnis *leasing* otomotif ke luar negeri.

Kami telah memperkuat posisi kami sebagai perusahaan keuangan global dengan 5.500 karyawan di seluruh dunia.

Hyundai Capital Services, Inc., a market-leading captive financing company, is a pioneer in the credit financing business in Korea, firmly holding the number one position in the Korean automotive financing market since its launch in 1996.

We provide financial services for Hyundai Motors, Kia, and Genesis, with the vision of becoming a "Global Leader in Mobility Finance". Headquartered in South Korea, our business stretches across 17 entities/branches in 14 countries around the world, including the US, the UK, China, and Germany. We are an active partner supporting Hyundai Motor Group's growth in the European and ASEAN markets.

As the captive finance arm of the Hyundai Motor Group, we offer differentiated finance products and services for automotive dealers and customers, ranging from wholesale/retail finance to insurance fee biz and used car finance, such as Hyundai/Kia *Certificated Pre-Owned* financing. In order to embrace the changes in the rapidly evolving global mobility environment, Hyundai Capital has been diversifying the business models, developing mobility products such as subscription/rental services, and expanding automotive leasing businesses overseas.

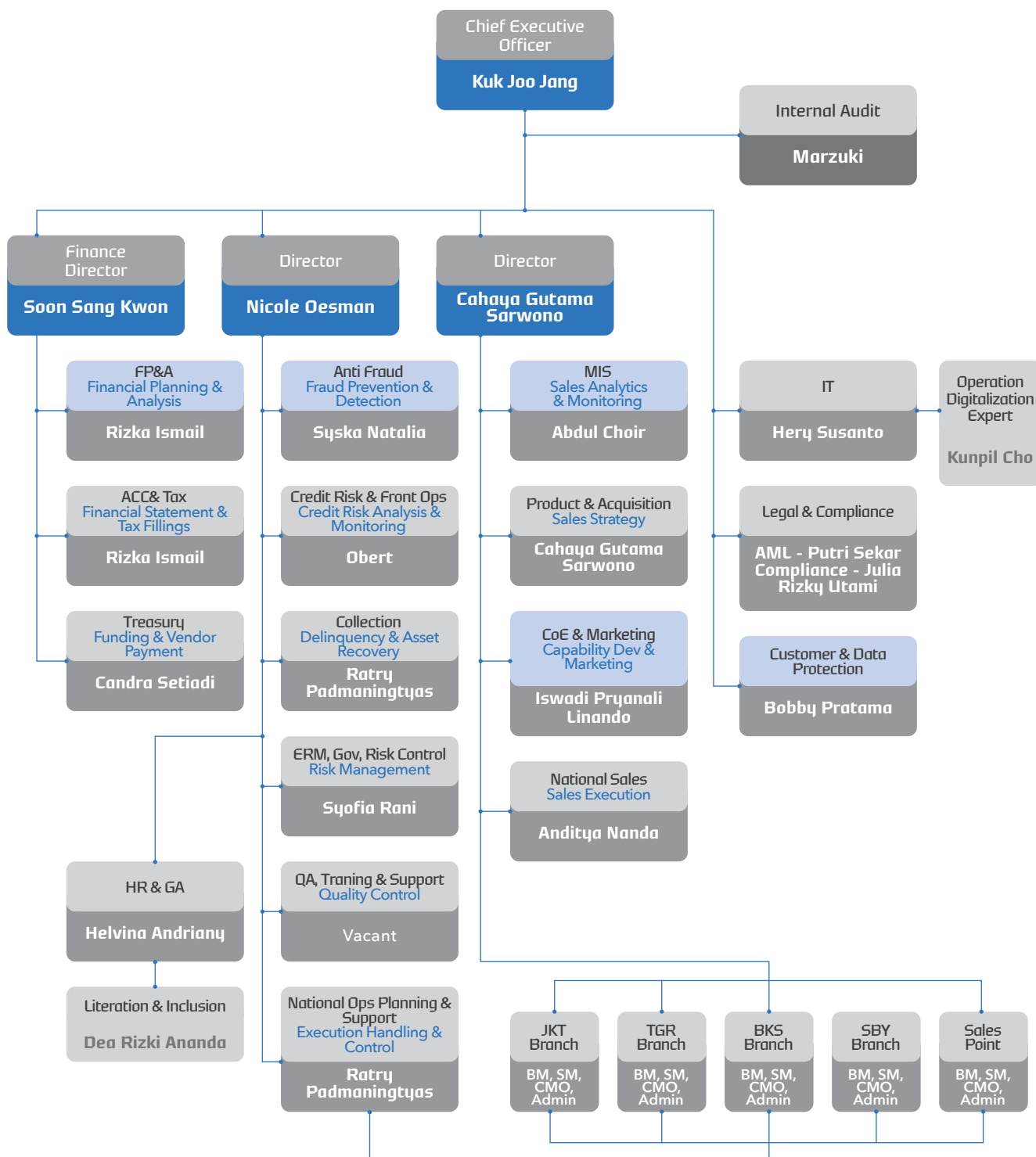
We have solidified our position as a global finance company with 5,500 employees worldwide.

STRUKTUR ORGANISASI

Organizational Structure ...

Berikut adalah struktur organisasi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025.

The following is the Company's organizational structure as of December 31, 2025.



PROFIL DEWAN KOMISARIS

Profile of the Board of Commissioners ...



Susunan Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:
The composition of the Company's Board of Commissioners as of December 31, 2025, is as follows:

Presiden Komisaris	President Commissioner	Woochan Yoon	Susunan ini tidak berubah hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan. Berikut adalah profil masing-masing anggota. This composition remains unchanged as of the date of this Annual Report. The following is a profile of each member.
Komisaris Independen	Independent Commissioner	David Wibawa	



WOOCHAN YOON

Presiden Komisaris ••• President Commissioner

Masa Jabatan Serving Period

2025 - sekarang present

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Akta Nomor 24 tanggal 14 Januari 2025
Deed Number 24 dated January 14, 2025

Kewarganegaraan Citizenship Korea Selatan South Korean

Domisili Domicile Korea Selatan South Korea

Gender Laki-laki • Male

Sertifikasi Certification

Sertifikasi Dasar Komisaris
Basic Certification for Commissioners

Pengalaman Profesional Professional Experience

Beliau memiliki pengalaman luas di industri jasa keuangan, khususnya di Hyundai Capital Services, Korea. Sejak tahun 2015, beliau menjabat sebagai Global Business Senior Manager. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Auto Business Senior Manager (2014 - 2015), Finance Manager (2011 - 2014), Personal Loan Manager (2006 - 2011), serta Collection Manager (2001 - 2006).

Dengan pengalaman lebih dari dua dekade di industri pembiayaan, beliau memiliki keahlian dalam pengembangan bisnis global, manajemen keuangan, serta pengelolaan portofolio pembiayaan.

He has extensive experience in the financial services industry, particularly at Hyundai Capital Services, Korea. He has served as Global Business Senior Manager since 2015. Previously, he served as Auto Business Senior Manager (2014 - 2015), Finance Manager (2011 - 2014), Personal Loan Manager (2006 - 2011), and Collection Manager (2001 - 2006).

With over two decades of experience in the financing industry, he has expertise in global business development, financial management, and financing portfolio management.

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak ada • None

Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship

Tidak ada • None

Kepemilikan Saham Share Ownership

Tidak ada • None



DAVID WIBAWA

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Masa Jabatan Serving Period

2016 - sekarang present

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Akta Nomor 9 tanggal 24 Oktober 2016
Deed Number 9 dated October 24, 2016

Kewarganegaraan Citizenship Indonesia Indonesian

Domisili Domicile Jakarta

Gender Laki-laki • Male

Sertifikasi Certification

- Sertifikasi Manajemen Risiko
Risk Management Certification
- Sertifikasi Dasar Komisaris
Basic Certification for Commissioners

Pengalaman Profesional Professional Experience

Beliau memiliki pengalaman luas di bidang manajemen dan keuangan, termasuk sebagai Direktur di PT Surya Kencana Cipta Semesta dan PT Trias Mitra Jaya Manunggal, serta berbagai posisi strategis di PT Bank Sinarmas Tbk. Telah mengikuti berbagai pelatihan dan sertifikasi di bidang manajemen risiko, tata kelola, dan kepemimpinan.

He has extensive experience in management and finance, including serving as Director at PT Surya Kencana Cipta Semesta and PT Trias Mitra Jaya Manunggal, as well as holding various strategic positions at PT Bank Sinarmas Tbk. He has also completed various training programs and certifications in risk management, corporate governance, and leadership.

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak ada • None

Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship

Tidak ada • None

Kepemilikan Saham Share Ownership

Tidak ada • None

PROFIL DIREKSI

Profile of the Board of Directors



Susunan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Board of Directors as of December 31, 2025, is as follows:

Direktur
Utama

Direktur
Keuangan

Direktur

President
Director

Finance
Director

Director

Kuk Joo Jang

Soon Sang Kwon

Nicole Oesman*
Cahaya Gutama
Sarwono*

Susunan ini tidak berubah hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan. Berikut ini adalah profil dari masing-masing anggota.

This composition remains unchanged as of the date of this Annual Report. The following is a profile of each member.

Keterangan • Notes

*) Telah diangkat melalui akta pada bulan Januari 2026 dan dicatatkan pada Kementerian Hukum Republik Indonesia pada bulan Februari 2026. Has been appointed by deed in January 2026 and registered with the Ministry of Law of the Republic of Indonesia in February 2026.



KUK JOO JANG
Direktur Utama ••• President Director

Masa Jabatan Serving Period	
2025 - sekarang present	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	
Akta Nomor 24 tanggal 14 Januari 2025 Deed Number 24 dated January 14, 2025	
Kewarganegaraan Citizenship	Korea Selatan South Korean
Domisili Domicile	Indonesia
Gender	Laki-laki • Male

Sertifikasi Certification
Sertifikasi Ahli Pembiayaan Financing Expert Certification
Pengalaman Profesional Professional Experience
Beliau memiliki pengalaman luas di Hyundai Capital Services, termasuk sebagai Branch Manager of Hyundai Capital Services Singapore Branch (2019 - 2020), General Manager Hyundai Capital Services, Korea (2018 - 2019), General Manager Beijing Hyundai Auto Finance Co. (2016 - 2018), serta Chief Representative of Hyundai Capital Services Beijing Office (2012 - 2016). Beliau juga sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Hyundai Capital Indonesia (November 2020 hingga Desember 2024).
Dengan pengalaman internasional di industri pembiayaan, beliau memiliki keahlian dalam pengembangan strategi bisnis, ekspansi pasar, dan pengelolaan layanan keuangan.
He has extensive experience at Hyundai Capital Services, including serving as Branch Manager of Hyundai Capital Services Singapore Branch (2019 - 2020), General Manager of Hyundai Capital Services, Korea (2018 - 2019), General Manager of Beijing Hyundai Auto Finance Co. (2016 - 2018), and Chief Representative of Hyundai Capital Services Beijing Office (2012 - 2016). He also previously served as President Director of PT Hyundai Capital Indonesia (November 2020 to December 2024).
With international experience in the financing industry, he possesses expertise in business strategy development, market expansion, and financial services management.
Rangkap Jabatan Concurrent Position
Tidak ada • None
Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship
Tidak ada • None
Kepemilikan Saham Share Ownership
Tidak ada • None



SOON SANG KWON
Direktur Keuangan ••• Finance Director

Masa Jabatan Serving Period	
2025 - sekarang present	
Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment	
Akta Nomor 24 tanggal 14 Januari 2025 Deed Number 24 dated January 14, 2025	
Kewarganegaraan Citizenship	Korea Selatan South Korean
Domisili Domicile	Indonesia
Gender	Laki-laki • Male

Sertifikasi Certification

Sertifikasi Ahli Pembiayaan
Financing Expert Certification

Pengalaman Profesional Professional Experience

Sebelum bergabung dengan Perusahaan, beliau memiliki pengalaman yang luas dengan Hyundai Capital Group di berbagai negara. Beliau pernah menjabat sebagai Asia Pacific Support Senior Manager pada Hyundai Capital Services, Korea, dari 2020 hingga 2024. Sebelumnya, beliau juga bekerja di Hyundai Capital America sebagai Financial Planning & Analysis Manager (2012 - 2016) dan bekerja di Hyundai Capital Services sebagai Treasury Senior Manager (2016 - 2019). Karirnya di Hyundai Capital Group dimulai dari Treasury Manager di Hyundai Capital Services, Korea, dari 2001 hingga 2011.

Beliau memiliki pengalaman dalam perencanaan keuangan, treasuri, dan strategi.

Prior to joining the Company, he had extensive experience with Hyundai Capital Services in various countries. He served as Asia Pacific Support Senior Manager at Hyundai Capital Services, Korea, from 2020 to 2024. Previously, he also worked at Hyundai Capital Service as Treasury Senior Manager (2016 - 2019) and Hyundai Capital America as Financial Planning & Analyst Manager (2012 - 2016). His career at Hyundai Capital Services began as Treasury Manager at Hyundai Capital Services, Korea, from 2001 to 2011.

He has expertise in financial management, treasury, as well as financing planning and strategy.

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak ada • None

Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship

Tidak ada • None

Kepemilikan Saham Share Ownership

Tidak ada • None



NICOLE OESMAN

Direktur ••• Director

Masa Jabatan Serving Period

2026 - sekarang present

*) Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK pada 15 Desember 2025 dan diangkat berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 9 Januari 2026. Passed the OJK's Fit and Proper Test on December 15, 2025 and appointed based on Deed No.17 dated January 9, 2026.

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Pada tanggal 15 Desember 2025, OJK telah menyetujui penunjukan beliau sebagai Direktur Perusahaan dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-367/PL.02/2025. Saat ini beliau telah diangkat melalui Akta Nomor 17 tanggal 9 Januari 2026 dan dicatatkan pada Kementerian Hukum pada tanggal 5 Februari 2026 berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.09-0032526 Tahun 2026.

On December 15, 2025, the OJK approved her appointment as Director of the Company through the Decree of the OJK Board of Commissioners Number KEP-367/PL.02/2025. She has been appointed by Deed Number 17 dated January 9, 2026 and registered with the Ministry of Law on February 5, 2026 pursuant to Decree Number AHU-AH.01.09-0032526 Year 2026.

Kewarganegaraan Citizenship Indonesia Indonesian

Domisili Domicile Jakarta

Gender Perempuan • Female

Pengalaman Profesional Professional Experience

Beliau menjabat sebagai Regional Credit Risk Officer di Abdul Latif Jameel Finance (2023 - 2024), serta SVP Credit Risk and Fraud Management di GoTo Financial & Tokopedia (2019 - 2023). Beliau juga pernah menjabat sebagai Risk Director di PT Home Credit Indonesia (2014 - 2019) serta memegang berbagai posisi di GE Money Indonesia dan Citibank N.A. di bidang manajemen risiko kredit, *fraud risk*, dan pengendalian keuangan.

Beliau memiliki pengalaman lebih dari dua dekade di bidang manajemen risiko, kredit, dan pengendalian *fraud* di industri jasa keuangan.

She served as Regional Credit Risk Officer at Abdul Latif Jameel Finance (2023 - 2024), and SVP of Credit Risk and Fraud Management at GoTo Financial & Tokopedia (2019 - 2023). She also served as Risk Director at PT Home Credit Indonesia (2014 - 2019) and held various positions at GE Money Indonesia and Citibank N.A. in credit risk management, fraud risk, and financial control.

She has over two decades of experience in risk management, credit, and fraud control in the financial services industry.

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak ada • None

Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship

Tidak ada • None

Kepemilikan Saham Share Ownership

Tidak ada • None



CAHAYA GUTAMA SARWONO

Direktur •• Director

Masa Jabatan Serving Period

2026 - sekarang present

- *1) Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK pada 15 Desember 2025 dan diangkat berdasarkan Akta Nomor 17 tanggal 9 Januari 2026. Passed the OJK's Fit and Proper Test on December 15, 2025 and appointed based on Deed No.17 dated January 9, 2026.

Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment

Pada tanggal 15 Desember 2025, OJK telah menyetujui penunjukan beliau sebagai Direktur Perusahaan dengan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-368/PL.02/2025. Saat ini beliau telah diangkat melalui Akta Nomor 17 tanggal 9 Januari 2026 dan dicatatkan pada Kementerian Hukum pada tanggal 5 Februari 2026 berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.09-0032526 Tahun 2026.

On December 15, 2025, the OJK approved his appointment as Director of the Company through the Decree of the OJK Board of Commissioners Number KEP-368/PL.02/2025. He has been appointed Deed Number 17 dated January 9, 2026 and registered with the Ministry of Law on February 5, 2026 pursuant to Decree Number AHU-AH.01.09-0032526 Year 2026.

Kewarganegaraan Citizenship Indonesia Indonesian

Domisili Domicile Jakarta

Gender Laki-laki • Male

Pengalaman Profesional Professional Experience

Sebelum menjabat sebagai Direktur Perusahaan, Beliau menjabat sebagai National Sales Head New Car (2021 - 2025) dan berbagai posisi di PT CIMB Niaga Auto Finance (2019 - 2021). Beliau juga pernah memegang berbagai posisi strategis di PT Bank CIMB Niaga Tbk (2013 - 2019) sebagai Direct Auto Business Head, Personal Loan Acquisition Head, dan Direct Auto Product Head. Beliau mengawali karier di PT. Nissan Motor Indonesia sebagai Sales Area Manager.

Beliau memiliki pengalaman luas lebih dari dua dekade di industri pembiayaan, perbankan, dan otomotif dengan fokus pada pengembangan bisnis, strategi penjualan, dan manajemen produk.

Before serving as the Director of the Company, he was the National Sales Head New Car (2021 - 2025) and in various position in PT CIMB Niaga Auto Finance (2019 - 2021). He also held several various positions in PT Bank CIMB Niaga Tbk (2013 - 2019) namely the Direct Auto Business Head, Personal Loan Acquisition Head, dan Direct Auto Product Head. He started his career at PT. Nissan Motor Indonesia as a Sales Area Manager.

He has over two decades of extensive experience in the financing, banking, and automotive industries, with a focus on business development, sales strategy, and product management.

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak ada • None

Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship

Tidak ada • None

Kepemilikan Saham Share Ownership

Tidak ada • None

DEMOGRAFI KARYAWAN

Employees Demographics ...

Pada akhir tahun 2025, Perusahaan memiliki 141 karyawan, naik signifikan dibandingkan tahun 2024 yang berjumlah 48 orang. Kenaikan ini seiring dengan dimulainya aktivitas bisnis Perusahaan pada tahun ini pasca akuisisi perubahan komposisi kepemilikan.

Berikut adalah komposisi karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

By the end of 2025, the Company will have 141 employees, a significant increase compared to 48 in 2024. This increase is in line with the commencement of the Company's business activities this year.

The following is the Company's employee composition as of December 31, 2025, and 2024.

KOMPOSISI KARYAWAN MENURUT GENDER EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON GENDER	Satuan Units	2024	2025
Laki-laki Male	Orang Employee	3	106
Perempuan Female	Orang Employee	18	35
Total	Orang Employee	48	141

KOMPOSISI KARYAWAN MENURUT LEVEL JABATAN EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON POSITION LEVEL	Satuan Units	2024	2025
Entry Level	Orang Employee	21	100
Mid Level	Orang Employee	17	30
Senior Level	Orang Employee	6	9
Executive Level	Orang Employee	4	2
Total	Orang Employee	48	141

KOMPOSISI KARYAWAN MENURUT STATUS KETENAGAKERJAAN EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON EMPLOYMENT STATUS	Satuan Units	2024	2025
Tetap Permanent	Orang Employee	32	77
Kontrak Contractual	Orang Employee	16	64
Total	Orang Employee	48	141

KOMPOSISI KARYAWAN MENURUT PENDIDIKAN EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON EDUCATION	Satuan Units	2024	2025
S2- S3 <i>Advanced Degree</i>	Orang <i>Employee</i>	3	4
S1 <i>Bachelor's Degree</i>	Orang <i>Employee</i>	35	130
D1 - D3 <i>Diploma</i>	Orang <i>Employee</i>	3	5
<= SMU <= <i>Highschool</i>	Orang <i>Employee</i>	7	2
Total	Orang <i>Employee</i>	48	141

KOMPOSISI KARYAWAN MENURUT USIA EMPLOYEE COMPOSITION BASED ON AGE	Satuan Units	2024	2025
18-24 tahun <i>year-old</i>	Orang <i>Employee</i>	0	10
25-34 tahun <i>year-old</i>	Orang <i>Employee</i>	23	93
35-44 tahun <i>year-old</i>	Orang <i>Employee</i>	14	30
45-54 tahun <i>year-old</i>	Orang <i>Employee</i>	11	8
>55 <i>year-old</i>	Orang <i>Employee</i>	0	0
Total	Orang <i>Employee</i>	48	141

ENTITAS ANAK, ENTITAS ASOSIASI DAN PERUSAHAAN VENTURA BERSAMA

Subsidiaries, Associates and Joint Ventures ...

Hingga 31 Desember 2025, Perusahaan tidak memiliki entitas anak, entitas asosiasi maupun perusahaan ventura bersama.

As of December 31, 2025, the Company does not have any subsidiaries, associates or joint ventures.

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM DAN EFEK LAINNYA

Chronology of Shares and Other Securities Listing ...

Hingga 31 Desember 2025, Perusahaan tidak melakukan pencatatan atas saham maupun efek lainnya.

Until December 31, 2025, the Company has not registered any shares or other securities.



AKUNTAN PUBLIK

Public Accountant ...

HCFI telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Liana Ramon Xenia dan Rekan sebagai penyedia jasa audit Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2025. Untuk jasa audit ini, Perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp515 juta (sebelum PPN).

HCFI has appointed Public Accounting Firm (KAP) Liana Ramon Xenia and Associates to provide audit services for the Company's Financial Statements for the 2025 fiscal year. For this audit, the Company incurred a fee of Rp515 million (before VAT).

KAP tidak menyediakan jasa lain kepada Perusahaan selain jasa audit Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2025.

The KAP did not provide any other services to the Company other than the audit services for the 2025 fiscal year.

Alamat KAP Address of the KAP

The Plaza Office Tower, 32nd Floor
Jl. M.H. Thamrin Kav. 28-30 Jakarta 10350

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Capital Market Supporting Institutions and Professionals ...



Notaris
Notary

Yulia

Multivision Tower 3rd Suite 05
Jl. Kuningan Mulia Kav.9B
Menteng Atas, Kecamatan
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan
Indonesia



Firma Hukum
Law Firm

Lasut Pane & Partners

Jl. Hang Tuah Raya No.29
RT.3/RW.6, Gunung
Kec. Kebayoran Baru
Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12120
Indonesia

04.

ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management
Discussion
& Analysis
...



Design must be functional, and functionality must be translated into visual aesthetics with the purpose of communicate.

- Functions are essential because they define precise relationships between variables. Function performs specific tasks to simplify complex processes, and each has a vital role. With each function, HCPI's will be able to analyze how the whole company can run better.

TINJAUAN EKONOMI DAN INDUSTRI

Analysis of Economics and Industry ...

Pada tahun 2025, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang relatif stabil di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat di 5,11% secara tahunan, didukung oleh konsumsi rumah tangga, investasi, serta aktivitas manufaktur yang tetap ekspansif. Stabilitas makroekonomi juga tercermin dari tingkat inflasi yang terkendali sekitar 2,7 - 2,9% serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus.

Namun demikian, perekonomian global masih diwarnai oleh berbagai faktor risiko, seperti ketegangan geopolitik, perlambatan perdagangan internasional, dan volatilitas pasar keuangan akibat perubahan kebijakan moneter di negara maju. Tekanan global tersebut berpengaruh pada nilai tukar rupiah, arus modal, serta daya beli masyarakat, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja sektor riil termasuk industri otomotif dan pembiayaan. Selain itu, potensi tarif perdagangan dan dinamika geopolitik juga menjadi faktor eksternal yang menimbulkan ketidakpastian bagi aktivitas ekspor dan investasi.

Dalam industri pembiayaan, khususnya pembiayaan kendaraan bermotor baru, tahun 2025 menghadapi tantangan dari melemahnya penjualan kendaraan secara umum. Pasar kendaraan ringan di Indonesia mengalami penurunan sekitar 6-7%, menurut Gaikindo, yang mencerminkan tekanan pada daya beli masyarakat serta meningkatnya persaingan di industri otomotif. Kondisi ini berpotensi menahan pertumbuhan pembiayaan kendaraan bermotor konvensional yang selama ini menjadi kontributor utama portofolio perusahaan pembiayaan.

Sebaliknya, pasar kendaraan listrik *battery electric vehicle* dan *plug-in hybrid* menunjukkan pertumbuhan 49%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh kebijakan insentif pemerintah, meningkatnya kesadaran terhadap kendaraan ramah lingkungan, serta investasi produsen global dalam ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Sejalan dengan tren tersebut, penyaluran pembiayaan kendaraan listrik oleh sektor *multifinance* juga terus meningkat dan telah mencapai sekitar Rp16,63 triliun, mencerminkan potensi pertumbuhan yang besar pada segmen pembiayaan kendaraan berbasis energi yang dapat diperbarui.

In 2025, the Indonesian economy demonstrated relatively stable performance amidst global uncertainty. National economic growth was recorded at 5.11% annually, supported by household consumption, investment, and continued expansionary manufacturing activity. Macroeconomic stability was also reflected in a controlled inflation rate of around 2.7 - 2.9% and a trade balance that continues to record a surplus.

However, the global economy remains characterized by various risk factors, such as geopolitical tensions, slowing international trade, and financial market volatility due changes in monetary policy in developed countries. These global pressures impact the rupiah exchange rate, capital flows, and public purchasing power, which can ultimately impact the performance of the real sector, including the automotive and financing industries. Furthermore, potential trade tariffs and geopolitical dynamics are also external factors that create uncertainty for export and investment activities.

The financing industry, particularly new motor vehicle financing, faces challenges in 2025 from weakening vehicle sales in general. According to Gaikindo, the Indonesian light vehicle market is experiencing a decline of around 6-7%, reflecting pressure on consumer purchasing power and increased competition in the automotive industry. This situation has the potential to hinder the growth of conventional motor vehicle financing, which has been a major contributor to financing companies' portfolios.

In contrast, the battery electric vehicle and plug-in hybrid electric vehicle market showed 49% growth. This growth was driven by government incentive policies, increasing awareness of environmentally friendly vehicles, and investment by global manufacturers in the Indonesian electric vehicle ecosystem.

In line with this trend, electric vehicle financing disbursed by the multifinance sector has also continued to increase, reaching approximately Rp16.63 trillion, reflecting the significant growth potential in the renewable energy vehicle financing segment.

TINJAUAN BISNIS

Business Analysis ...

Perkembangan pasar Hyundai Motor Group di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang relatif stabil namun menghadapi tekanan persaingan yang semakin kuat di industri otomotif nasional. Sepanjang 2025, penjualan Hyundai di Indonesia tercatat sekitar 19.007 unit secara wholesales dan 19.664 unit secara retail, menurun dibandingkan tahun 2024 yang mencapai masing-masing 22.361 unit dan 22.097 unit. Penurunan ini sejalan dengan melemahnya permintaan kendaraan baru di beberapa segmen serta meningkatnya kompetisi di pasar otomotif domestik.

Dari sisi pangsa pasar, Hyundai Motor Group mampu mempertahankan pangsa pasar sekitar 2,7-2,8% di tengah kondisi pasar yang fluktuatif. Strategi tahun 2025 tidak berfokus pada peningkatan volume penjualan secara agresif, tetapi lebih pada menjaga stabilitas pangsa pasar, memperkuat layanan purna jual, dan mempertahankan loyalitas pelanggan.

HCFI hadir untuk menangkap peluang *captive finance* di pasar Hyundai Motor Group, sebagai perusahaan keuangan yang dimiliki sepenuhnya oleh produsen mobil yang memberikan pinjaman dan layanan keuangan lainnya kepada *customer*. Untuk itu, HCFI mengembangkan strategi bisnis yang berorientasi pada konsumen seperti menyediakan berbagai produk pembiayaan otomotif melalui pengembangan produk baru dan meningkatkan kenyamanan konsumen melalui pengenalan proses berbasis mobilitas. Selain itu, HCFI menyediakan konsumen dengan suku bunga yang lebih rendah atau layanan yang berbeda melalui sinergi dengan vendor, dan berdasarkan strategi bisnis ini.

HCFI memiliki keunggulan-keunggulan yang dapat ditampilkan, termasuk permodalan kuat dari pemegang saham, jaringan *dealer* di kota-kota besar di Indonesia, kemitraan dengan grup keuangan terbesar di Indonesia, serta dukungan dari Hyundai Motor Group.

Tahun ini, HCFI memperkenalkan dua produk perdananya, yaitu pembiayaan ritel mobil baru bagi konsumen dan pembiayaan *wholesale* bagi *dealer*. Pembiayaan ritel mobil baru ditawarkan dengan berbagai skema pembayaran termasuk skema *balloon payment* dan pembayaran

Hyundai Motor Group in Indonesia market development in 2025 showed relatively stable performance, but faced increasing competitive pressure in the national automotive industry. Throughout 2025, Hyundai sales in Indonesia were recorded at approximately 19,007 wholesales units and 19,664 retail units, a decrease compared to 22,361 units and 22,097 units, respectively, in 2024. This decline was in line with weakening demand for new vehicles in several segments and increased competition in the domestic automotive market.

In terms of market share, Hyundai Motor Group was able to maintain a market share of around 2.7 - 2.8% amid fluctuating market conditions. The 2025 strategy does not focus on aggressively increasing sales volume, but rather on maintaining market share stability, strengthening after sales service, and maintaining customer loyalty.

HCFI exists to capture captive finance opportunities in the Hyundai Motor Group market, as financial companies wholly owned by automakers that provide loans and other financial services to customers. To that end, HCFI develops a consumer-oriented business strategy such as providing various automotive financing products through new product development and increasing consumer convenience through the introduction of mobility-based processes. Furthermore, HCFI provides consumers with lower interest rates or differentiated services through synergies with vendors, and based on this business strategy.

HCFI boasts several key strengths, including strong shareholder capital, a dealer network in major cities across Indonesia, partnerships with Indonesia's largest financial groups, and support from Hyundai Motor Group.

This year, HCFI introduced its first two products: new car retail financing for consumers and wholesale financing for dealers. New car retail financing was offered with various payment schemes, including balloon payments and 50:50 deferred payments, designed to reduce

ditanggihkan 50:50 (*deferred payment*) yang dirancang untuk meringankan cicilan bulanan. Melalui skema *balloon payment*, konsumen dapat membayar angsuran ringan tiap bulan dan melunasi sisa pembayaran di akhir periode. Sementara skema 50:50 *deferred payment* memungkinkan konsumen melunasi separuh harga mobil di awal dan sisanya pada akhir periode.

Sementara itu, bagi *dealer*, HCFI menawarkan pembiayaan *wholesale* menggunakan proses digital yang terintegrasi dan penawaran harga yang kompetitif. Untuk memperluas akses, HCFI menempatkan *Credit Marketing Officer* (CMO) di seluruh jaringan *dealer* Hyundai Motors Indonesia (HMID) di Jabodetabek dan akan diperluas ke Surabaya dan Bandung, yang siap memberikan konsultasi finansial. Konsumen juga bisa mengakses layanan *Customer Direct* secara daring untuk melihat penawaran harga dan mengajukan pembiayaan langsung.

Untuk mendukung penerimaan produk, HCFI membuka kantor cabang di sejumlah kota besar, memperkuat *branding* di jaringan *dealer* Hyundai Motor Group, bekerjasama dengan vendor IT untuk membuat sistem pembiayaan yang terdiferensiasi (*core system*, *Apps*, dll) untuk program pembiayaan yang lebih inovatif agar konsumen dapat menggunakan pembiayaan dengan mudah. HCFI juga bekerjasama dengan mitra untuk memudahkan konsumen mendapatkan produk pembiayaan.

monthly installments. With the balloon payment scheme, consumers can make low monthly installments and pay off the remaining balance at the end of the term. The 50:50 deferred payment scheme allows consumers to pay half the car price upfront and the remainder at the end of the term.

Meanwhile, for dealers, HCFI offers wholesale financing using an integrated digital process and competitive pricing. To expand access, HCFI has placed Credit Marketing Officers (CMOs) throughout the Hyundai Motors Indonesia (HMID) dealer network in Greater Jakarta and will expand to Surabaya and Bandung, ready to provide financial consultations. Consumers can also access the online Customer Direct service to view pricing offers and apply for financing directly.

To support product acceptance, HCFI has opened branch offices in several major cities, strengthened branding within the Hyundai Motor Group dealer network, and collaborated with IT vendors to create differentiated financing systems (core systems, apps, etc.) for more innovative financing programs to facilitate consumer financing. HCFI also collaborate with partners to make it easier for consumers to access financing products.

TINJAUAN KEUANGAN

Financial Analysis ...

Tinjauan keuangan berikut harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan PT Hyundai Capital Finance Indonesia untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan dengan surat Nomor 00081/2.1460/AU.1/091549-1/1/III/2026 tanggal 25 Maret 2026, dan telah mendapatkan opini wajar dalam semua hal yang material.

The following financial analysis should be read together with the Financial Statements of PT Hyundai Capital Finance Indonesia for the year ended December 31, 2025, which was audited by the Public Accounting Firm Liana Ramon Xenia & Associates with letter Number 00081/2.1460/AU.1/091549-1/1/III/2026 dated March 25, 2026, and has obtained a fair opinion in all material respects.

POSISI KEUANGAN

Financial Position

Jumlah Aset

Jumlah aset bertambah Rp785,42 miliar menjadi Rp1,16 triliun, khususnya karena peningkatan kas dan setara kas.

Total Assets

Total assets increased by Rp785.42 billion to Rp1.16 trillion, primarily due to an increase in cash and cash equivalents.

POSISI KEUANGAN (RP JUTA) FINANCIAL POSITION (RP MILLION)	2025	2024	Perubahan Changes	
			Rp	%
Aset Assets				
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	790.811	184.955	605.856	327,57%
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih Consumer Financing Receivables - Net	120.356	0	120.356	-
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih Finance Lease Receivables - Net	4.498	209	4.289	2049,38%
Piutang Pembiayaan Penyalur Kendaraan - Bersih Dealer Financing Receivables - Net	3.678	0	3.678	-
Tagihan Anjak Piutang - Bersih Factoring Receivables - Net	135.633	151.924	(16.291)	-10,72%
Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Bersih Fixed Assets and Right-of-use Assets - Net	39.863	1.145	38.718	3382,50%
Lain-lain Others	63.265	34.453	28.813	83,63%
Jumlah Aset Total Assets	1.158.106	372.686	785.420	210,75%

Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas meningkat Rp605,86 miliar menjadi Rp790,81 miliar khususnya dari penambahan modal disetor sebesar Rp730 miliar.

Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents increased by Rp605.86 billion to Rp790.81 billion, primarily due to additional paid-in capital of Rp730 billion.

Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih

Piutang pembiayaan konsumen - bersih meningkat Rp120,36 miliar dari sebelumnya nihil, seiring dengan dimulainya kegiatan operasi. Kenaikan ini mencerminkan awal pembentukan portofolio serta ekspansi bisnis secara bertahap.

Consumer Financing Receivables - Net

Consumer financing receivables - net increased by Rp120.36 billion from zero, primarily due to the starting of operation. The increase reflects the gradual portfolio building and business expansion.

Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih

Piutang sewa pembiayaan juga meningkat Rp4,29 miliar menjadi Rp4,50 miliar. Peningkatan ini menunjukkan tahap awal pengembangan portofolio sewa pembiayaan secara bertahap.

Finance Lease Receivables - Net

Finance lease receivables also increased by Rp4.29 billion to Rp4.50 billion. The increase shows the early stage of gradual portfolio building in finance lease.

Piutang Pembiayaan Penyalur Kendaraan - Bersih

Piutang pembiayaan penyalur kendaraan meningkat Rp3,68 miliar dari sebelumnya nihil, peningkatan yang pesat ini merupakan respon yang positif dari *dealers* serta penguatan kemitraan dengan jaringan *dealer*.

Dealer Financing Receivables - Net

Dealer financing receivables increased by Rp3.68 billion from zero due to the rapid acceptance from the dealers and stronger partnership in the dealer network.

Tagihan Anjak Piutang

Tagihan anjak piutang turun Rp16,29 miliar menjadi Rp135,63 miliar, dan pada 12 Februari 2026, seluruh saldo anjak piutang telah dilunasi.

Factoring Receivables

Factoring receivables decreased by Rp16.29 billion to Rp135.63 billion, and on February 12, 2026, the outstanding balance of the factoring receivables had been fully repaid.

Aset Tetap dan Aset Hak Guna - Bersih

Aset tetap dan aset hak guna meningkat Rp38,72 miliar menjadi Rp39,86 miliar. Peningkatan terjadi di semua aset, khususnya pada aset hak guna dan aset dalam proses.

Fixed Assets and Right-of-Use Assets - Net

Fixed assets and right-of-use assets increased by Rp38.72 billion to Rp39.86 billion. The increase occurred across all assets, particularly right-of-use assets and assets in progress.

POSISI KEUANGAN (RP JUTA) FINANCIAL POSITION (RP MILLION)	2025	2024	Perubahan Rp	Changes %
Liabilitas Liabilities				
Utang Terkait Pembiayaan Financing Related Liabilities	5.468	0	5.468	-
Utang Bank Bank Loan	100.000	0	100.000	-
Lain-lain Others	67.801	668	67.133	10048,18%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	173.269	668	172.601	25834,12%
Ekuitas Equity				
Jumlah Ekuitas Total Equity	984.836	372.018	612.818	164,73%

Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas naik Rp172,60 miliar menjadi Rp173,27 miliar, khususnya karena utang bank Rp100 miliar dan biaya yang masih harus dibayar Rp48,71 miliar.

Total Liabilities

Total liabilities increased by Rp172.60 billion to Rp173.27 billion, primarily due to bank loans of Rp100 billion and accrued expenses of Rp48.71 billion.

Utang Terkait Pembiayaan

Utang terkait pembiayaan meningkat Rp5,47 miliar, dari sebelumnya nihil, seiring dengan mulai dilakukannya penyaluran pembiayaan oleh Perusahaan.

Financing-Related Liabilities

Financing-related liabilities increased by Rp5.47 billion, from zero, as the Company started to disburse financing.

Utang Bank

Utang bank meningkat Rp100 miliar dari sebelumnya nihil, di mana pada tanggal 6 Agustus 2025, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek tanpa agunan dari Standard Chartered Bank dengan plafon fasilitas sebesar Rp300 miliar yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2026.

Bank Loan

Bank loan increased by Rp100 billion from the previous zero. On August 6, 2025, the Company obtained a short-term, unsecured loan facility from Standard Chartered Bank with a maximum limit of Rp300 billion, valid until July 31, 2026.

Biaya bunga dari fasilitas ini sejumlah Rp438,12 juta pada tahun 2025. Pada tanggal 19 Januari 2026, saldo pinjaman yang terutang atas fasilitas tersebut telah dilunasi seluruhnya.

Interest expense on this facility amounted to Rp438.12 million in 2025. On January 19, 2026, the outstanding loan balance under this facility was fully repaid.

Jumlah Ekuitas

Jumlah ekuitas meningkat Rp612,82 miliar menjadi Rp984,84 miliar karena peningkatan modal disetor menjadi Rp1,13 triliun.

Total Equity

Total equity increased by Rp612.82 billion to Rp984.84 billion due to an increase in paid-in capital to Rp1.13 trillion.

LABA RUGI

Profit and Loss

LAPORAN LABA RUGI (RP JUTA) PROFIT AND LOSS STATEMENTS (RP MILLION)	2025	2024	Perubahan Changes	
			Rp	%
Total Pendapatan Total Revenues	20.602	107.498	(86.896)	-80,83%
Total Beban Total Expenses	(139.632)	(34.377)	(105.255)	306,17%
(Rugi) Laba sebelum Pajak (Loss) Profit before Tax	(119.030)	73.120	(192.150)	-262,79%
(Rugi) Laba Bersih Tahun Berjalan (Loss) Profit for the Year	(117.376)	65.278	(182.654)	-279,81%
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	(117.182)	65.278	(182.460)	-279,51%

Pendapatan

Pendapatan tercatat Rp20,60 miliar, disebabkan oleh penurunan kontribusi dari pendapatan anjak piutang dan pendapatan lain-lain yang tidak lagi menjadi fokus bisnis HCFI. Sementara itu, pembiayaan konsumen, sewa pembiayaan, dan pembiayaan *dealer* mulai memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp3,22 miliar, seiring dengan peluncuran produk-produk tersebut yang baru dilakukan pada pertengahan tahun.

Revenue

Revenues was at Rp20.60 billion, especially due to a decrease in factoring income and other income, which are no longer a focus for HCFI. Meanwhile, consumer financing, leasing, and dealer financing contributed total revenue of Rp3.22 billion, as these products were only launched in the second half of the year.

Kinerja ini mencerminkan bahwa sepanjang tahun 2025, Perusahaan masih berada dalam tahap *set up* dan pengembangan bisnis, dengan fokus pada pembentukan portofolio pembiayaan serta pembangunan fondasi operasional untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan ke depan.

The performance reflects that throughout 2025, the Company was still in business setup and development stage, with focus on financing portfolio building and the construction of operational foundation to support the ongoing growth in the future.

Beban

Beban pada tahun ini tercatat sebesar Rp139,63 miliar, dengan porsi terbesar berasal dari beban operasional dan beban gaji serta imbalan karyawan, masing-masing sebesar Rp78,96 miliar dan Rp55,47 miliar. Secara keseluruhan, beban meningkat sebesar Rp105,22 miliar dibandingkan periode sebelumnya.

Peningkatan ini sejalan dengan kondisi tahun berjalan yang masih berada dalam tahap *set up* dan pengembangan bisnis, di mana Perusahaan melakukan investasi awal yang signifikan, termasuk penguatan struktur organisasi, perekrutan sumber daya manusia, pengembangan sistem dan infrastruktur, serta aktivitas pendukung operasional lainnya guna membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan di masa mendatang.

(Rugi) Laba Sebelum Pajak

Tahun ini, Perusahaan mencatatkan rugi sebelum pajak Rp119,03 miliar.

(Rugi) Laba Bersih Tahun Berjalan

Tahun ini, Perusahaan mencatatkan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp117,38 miliar, setelah memperoleh manfaat pajak penghasilan Rp1,65 miliar.

Capaian ini mencerminkan kondisi tahun berjalan yang masih berada dalam fase *set up* dan pengembangan bisnis, di mana Perusahaan masih melakukan investasi awal secara signifikan untuk membangun portofolio pembiayaan, memperkuat infrastruktur operasional, serta mengembangkan organisasi guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di periode mendatang.

Jumlah Penghasilan Komprehensif

Penghasilan komprehensif tahun berjalan adalah Rp117,18 miliar setelah disesuaikan dengan pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti.

Expenses

Expenses for the year were recorded at Rp139.63 billion, the majority of which were operating expenses and employee salaries and benefits, amounting to Rp78.96 billion and Rp55.47 billion, respectively. Overall, the expenses increased by Rp105.22 billion from the previous period.

This increase is in line with the current year's conditions which were still in the business setup and development stage, where the Company was making significant initial investments, including strengthening the organizational structure, recruiting human resources, developing systems and infrastructure, and other operational support activities to build a strong foundation for future growth.

(Loss) Profit Before Tax

This year, the Company recorded a loss before tax of Rp119.03 billion.

Net Profit (Loss) for the Year

This year, the Company recorded a net loss for the year of Rp117.38 billion, after receiving an income tax benefit of Rp1.65 billion.

This achievement reflects the current year's conditions, which were still in the business setup and development phase, where the Company is still making significant initial investments to build a financing portfolio, strengthen operational infrastructure, and develop the organization to support sustainable growth in the coming period.

Total Comprehensive Income

Comprehensive income was Rp117.18 billion, after adjusting for the remeasurement of defined benefit obligations.

ARUS KAS**Cash Flow**

ARUS KAS (RP JUTA) CASH FLOWS (RP MILLION)	2025	2024	Perubahan Changes	
			Rp	%
Arus Kas (digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Operasi Cash (used in) Provided by Operating Activities	(170.729)	239.278	(410.007)	-171,35%

ARUS KAS (RP JUTA) CASH FLOWS (RP MILLION)	2025	2024	Perubahan Changes	
			Rp	%
Arus Kas (digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Investasi Cash (used in) Provided by Investing Activities	(50.778)	13.077	(63.855)	-488,29%
Arus Kas (digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Cash (used in) Provided by Financing Activities	827.363	(115.286)	942.649	-817,66%
Kenaikan (penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (decrease) of Cash and Cash Equivalents	605.856	137.069	468.787	342,01%

Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Operasi

Tahun ini, Perusahaan menggunakan arus kas untuk aktivitas operasi sebesar Rp170,73 miliar, khususnya untuk pembayaran kepada *dealer* dan tagihan anjak piutang. Sementara itu, penerimaan kas dari sumber-sumber pendapatan adalah Rp183,79 miliar.

Cash (for) from Operating Activities

This year, the Company used Rp170.73 billion in cash flow for operating activities, primarily for payments to dealers and factoring receivables. Meanwhile, cash receipts from other revenue sources amounted to Rp183.79 billion.

Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Investasi

Arus kas untuk aktivitas investasi tahun ini sebesar Rp50,78 miliar digunakan untuk perolehan aset tetap, aset hak-guna, dan aset tak berwujud.

Cash (for) from Investing Activities

Cash flow for investing activities this year amounted to Rp50.78 billion used for the acquisition of fixed assets, right-of-use assets, and intangible assets.

Pengeluaran ini mencerminkan komitmen Perusahaan dalam tahap *set up* dan pengembangan bisnis, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur operasional, penguatan sistem, serta penyediaan fasilitas penunjang kegiatan usaha guna memastikan kesiapan *platform* bisnis secara berkelanjutan.

This uses reflects the Company's commitment to the business setup and development phase, particularly to support the development of operational infrastructure, system strengthening, and the provision of supporting facilities for business activities to ensure the readiness of the business platform on an ongoing basis.

Arus Kas (untuk) dari Aktivitas Pendanaan

Tahun ini, Perusahaan menerima arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp827,36 miliar. Sebesar Rp730 miliar adalah dari penambahan modal disetor, sementara Rp100 miliar adalah penerimaan dari pinjaman bank.

Cash (for) from Financing Activities

This year, the Company received cash flow from financing activities of Rp827.36 billion. An amount of Rp730 billion came from additional paid-in capital, while another Rp100 billion came from bank loans.

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

Tahun ini Perusahaan mencatatkan kenaikan bersih kas dan setara kas sebesar Rp605,86 miliar.

Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents

This year, the Company recorded a net increase in cash and cash equivalents of Rp605.86 billion.

RASIO-RASIO

Ratios

Rasio-rasio yang menyangkut posisi keuangan menunjukkan solidnya keuangan Perusahaan saat ini, yang memampukannya untuk menangkap peluang-peluang di masa depan. Sementara itu rasio profitabilitas masih negatif karena baru meluncurkan produk-produk baru pada tengah tahun kedua.

The ratios relating to the Company's financial position demonstrate the Company's current financial strength, enabling it to seize future opportunities. Meanwhile, the profitability ratio remained negative due to the launch of new products only in the second half of the year.

RASIO PENTING	SIGNIFICANT RATIOS	2025	2024
<i>Financing to Asset Ratio</i>	Financing to Asset Ratio	22,81%	40,89%
Rasio Saldo Piutang Pembiayaan Neto terhadap Total Pendanaan yang Diterima	Net Financing Receivables to Funding Ratio	2,64	-
Rasio Saldo Piutang Pembiayaan untuk Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja Dibandingkan dengan Jumlah Saldo Piutang Pembiayaan	Net Financing Receivables for Investment and Working Capital Financing to Total Financing Receivables Ratio	64.31%	100%
Rasio Piutang Pembiayaan Bermasalah (NPF) - Gross	Non-Performing Financing (NPF) Ratio - Gross	-	-
Rasio Piutang Pembiayaan Bermasalah (NPF) - Neto	Non-Performing Financing (NPF) Ratio - Net	-	-
Rasio Permodalan	Capital Ratio	402.42%	326,32%
<i>Gearing Ratio</i>	Gearing Ratio	0,10	0
Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor	Equity to Paid Up Capital Ratio	87,18%	93,07%
Liabilitas terhadap Aset (x)	Liabilities to Assets (x)	0,15	0,00
Liabilitas terhadap Ekuitas (x)	Liabilities to Equity (x)	0,18	0,00
Imbal Hasil atas Aset	Return on Assets	-26,99%	17,52%
Imbal Hasil atas Ekuitas	Return on Equity	-29.46%	18.55%

TINGKAT KOLEKTABILITAS PIUTANG DAN SOLVABILITAS

Receivables Collectability and Solvency ...

Kolektabilitas Piutang

Sebagian besar piutang Perusahaan adalah pada piutang pembiayaan konsumen dan tagihan anjak piutang. Tagihan anjak piutang telah dilunasi seluruhnya di awal tahun 2026. Manajemen berkeyakinan jumlah kerugian kredit ekspektasian yang telah dicadangkan untuk piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan dan piutang pembiayaan penyalur kendaraan, cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang-piutang tersebut.

Receivables Collectability

The majority of the Company's receivables consist of consumer financing receivables and factoring receivables. Factoring receivables were fully repaid in early 2026. Management believes that the amount of expected credit losses provided for consumer financing receivables, finance lease receivables, and vehicle dealer financing receivables is sufficient to cover potential losses arising from uncollectible receivables.

Solvabilitas

Perusahaan memiliki rasio liabilitas terhadap aset dan terhadap ekuitas yang masih kecil, terutama dengan dilunasinya utang bank pada awal tahun 2026. Jadi, posisi solvabilitas Perusahaan masih sangat sehat.

Solvency

The Company maintained a low liability-to-asset and equity ratio, particularly with the repayment of bank loan in early 2026. Therefore, the Company's solvency position remains very healthy.

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN STRUKTUR MODAL

Capital Structure and Its Management Policy ...

Pada saat ini, Perusahaan memiliki struktur modal yang lebih besar di ekuitas. Ke depannya, sejalan dengan perkembangan bisnis, Perusahaan akan memantau struktur modal agar tetap sehat dan sesuai dengan regulasi yang memayunginya.

Currently, the Company has a capital structure predominantly based on equity. Going forward, as the business evolves, the Company will monitor its capital structure to ensure it remains healthy and in compliance with applicable regulations.

INVESTASI BARANG MODAL DAN IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Investment in Capital Goods and Its Material Commitment ...

Pada tahun ini, Perusahaan tidak memiliki ikatan material untuk investasi barang modal.

This year, the Company has no material commitments for capital goods investments.

Perusahaan melakukan investasi barang modal sebesar Rp46,81 miliar, di mana sebagian besar adalah pada aset dalam proses dan aset hak-guna masing-masing Rp22,24 miliar dan Rp17,69 miliar.

The Company invested Rp46.81 billion in capital goods, the majority of which was in assets in progress and right-of-use assets, amounting to Rp22.24 billion and Rp17.69 billion, respectively.

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI

Development of Information Technology ...

Pengembangan 2025

Teknologi informasi merupakan salah satu fokus manajemen untuk menjadikan HCFI eksis di industri. Pada tahun 2025, HCFI telah melakukan beberapa pengembangan di bidang ini, yaitu:

1. Melakukan persiapan implementasi sistem inti hingga fase *User Acceptance Test* (UAT) sebagai bagian dari inisiatif transformasi sistem inti Perusahaan.
2. Mengimplementasikan sistem *groupware Clounge* untuk mendukung digitalisasi proses persetujuan memo dan pengelolaan portal internal Perusahaan.
3. Mengembangkan kebijakan TI dan Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk memperkuat tata kelola TI dan efektivitas operasional.
4. Mempersiapkan infrastruktur kantor pusat dan cabang serta memastikan interkonektivitas yang lancar di semua lokasi.

Development in 2025

Information technology is one of HCFI's management focuses to establish a presence in the industry. By 2025, HCFI had undertaken several developments in this area, including:

1. Conducted preparations for core system implementation up to the User Acceptance Test (UAT) phase as part of the company's core system transformation initiative.
2. Implemented the Clounge groupware system to support the digitalization of memo approval processes and the management of the company's internal portal.
3. Developed IT policies and Standard Operating Procedures (SOPs) to strengthen IT governance and operational effectiveness.
4. Prepared head office and branch infrastructure and ensured seamless interconnectivity across all locations.

Target Pengembangan 2026

Pada tahun 2026, HCFI telah memiliki beberapa target pengembangan teknologi informasi di bawah ini:

1. Peningkatan Sistem TI dengan melaksanakan peningkatan sistem utama untuk mendukung rencana perluasan cakupan HCFI.
2. Pengembangan Ekosistem *SharePoint* dengan membangun aplikasi pendukung khusus untuk menyederhanakan alur kerja internal.
3. Meningkatkan infrastruktur dan jaringan TI untuk mendukung ekspansi bisnis.
4. Meningkatkan tata kelola TI dan proses manajemen layanan untuk memastikan kontrol dan penyampaian layanan yang lebih baik.

2026 Development Targets

By 2026, HCFI has several information technology development targets as follows:

1. Enhancing IT System by executing major system enhancements to support HCFI's coverage expansion plan.
2. SharePoint Ecosystem Development by building custom surrounding applications to streamline internal workflows.
3. Enhancing IT infrastructure and network to support business expansion.
4. Improving IT governance and service management processes to ensure better control and service delivery.

TARGET DAN REALISASI KINERJA 2025

Target and Actual Performance of 2025 ...

Pada tahun ini, Perusahaan menargetkan peluncuran produk-produk baru, yang telah berhasil direalisasikan pada bulan September 2025 melalui peluncuran dua produk perdana, yaitu pembiayaan ritel mobil baru bagi konsumen dan pembiayaan *wholesale* bagi *dealer*.

Pencapaian ini menandai dimulainya fase operasional bisnis inti Perusahaan, sekaligus menjadi langkah awal dalam membangun portofolio pembiayaan serta memperkuat penetrasi pasar di segmen ritel dan *wholesale*.

This year, the Company was targeting the launch of new products. This target was realized in September 2025 through the introduction of two initial products: new car retail financing for customers and wholesale financing for dealers.

This achievement marks the start of the operational phase of the Company's core business, as well as being the first step in building a financing portfolio and strengthening market penetration in the retail and wholesale segments.

PROSPEK USAHA DAN PROYEKSI 2026

2026 Business Prospects and Projections ...

Prospek industri perusahaan pembiayaan di Indonesia pada tahun 2026 diperkirakan membaik seiring dengan stabilitas kondisi makroekonomi domestik. Bank Indonesia

The outlook for the Indonesian multifinance industry in 2026 was expected to improve in line with the stability of domestic macroeconomic conditions. Bank Indonesia

memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2026 berada di sekitar 5,3% dengan inflasi sekitar 2,6%, yang mencerminkan fundamental ekonomi yang relatif stabil serta potensi peningkatan konsumsi dan investasi domestik.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, kinerja industri pembiayaan juga diperkirakan mengalami perbaikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan piutang pembiayaan industri *multifinance* tumbuh sekitar 6%-8% secara tahunan pada tahun 2026, setelah pada tahun 2025 pertumbuhannya relatif terbatas dengan total piutang sekitar Rp506,5 triliun.

Pertumbuhan industri juga didukung oleh prospek sektor otomotif yang masih menjadi kontributor utama pembiayaan. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) memperkirakan penjualan mobil nasional pada tahun 2026 mencapai sekitar 850 ribu unit, meningkat dari realisasi 803.687 unit pada 2025. Selain itu, pengembangan ekosistem kendaraan listrik (*electric vehicle/EV*) serta peningkatan digitalisasi layanan keuangan diperkirakan membuka peluang baru bagi perusahaan pembiayaan untuk memperluas portofolio dan meningkatkan efisiensi operasional.

Pertumbuhan ini didukung oleh Hyundai Motors Indonesia yang menargetkan pertumbuhan penjualan dua digit pada tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu di sekitar 19.007 unit secara *wholesales* dan 19.664 unit secara ritel. Target ini didukung oleh peluncuran model baru serta perluasan lini produk, terutama di segmen SUV dan MPV. Program pembiayaan yang ditawarkan juga menjadi salah satu senjata utama Hyundai Motors Indonesia untuk mencapai target yang agresif ini.

Target 2026

Melihat perkembangan tersebut, HCFI menetapkan beberapa target utama ke depan, yaitu pertumbuhan piutang pembiayaan di atas $\pm 100\%$, menjaga *gearing ratio* di bawah 10 kali, serta mempertahankan tingkat *Non-Performing Financing* (NPF) di bawah 1%.

Target ini mencerminkan komitmen Perusahaan untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang agresif namun tetap *prudent*, dengan menjaga keseimbangan antara ekspansi portofolio, pengelolaan risiko, dan kualitas aset secara berkelanjutan.

projects national economic growth in 2026 to be around 5.3% with inflation of around 2.6%, reflecting relatively stable economic fundamentals and the potential for increased domestic consumption and investment.

In line with these developments, the performance of the multifinance industry is also expected to improve. The Financial Services Authority (OJK) projects that multifinance industry receivables will grow by around 6%-8% annually in 2026, following relatively limited growth in 2025, with total receivables of around Rp506.5 trillion.

Industrial growth was also supported by the prospects of the automotive sector, which remains a major contributor to financing. The Association of Indonesian Automotive Industries (GAIKINDO) estimates that national car sales reach around 850,000 units in 2026, up from 803,687 units in 2025. Furthermore, the development of the electric vehicle (EV) ecosystem and the increasing digitalization of financial services were expected to open new opportunities for financing companies to expand their portfolios and improve operational efficiency.

The growth was supported by Hyundai Motors Indonesia that is targeting double-digit sales growth in 2026 compared to the previous year, reaching around 19,007 units at wholesale and 19,664 units at retail. This target is supported by the launch of new models and the expansion of its product line, particularly in the SUV and MPV segments. The financing program offered is also one of Hyundai Motors Indonesia's main weapons in achieving this aggressive target.

2026 Targets

Seeing the developments, HCFI establishes the following main targets, namely financing receivables growth of more than $\pm 100\%$, maintaining a gearing ratio below 10x, and maintaining a Non-Performing Financing (NPF) level below 1%.

This target reflects the Company's commitment to driving aggressive yet prudent business growth, while maintaining a balance between portfolio expansion, risk management, and sustainable asset quality.

ASPEK PEMASARAN

Marketing Aspects ...

Pada tahun ini, HCFI memperkuat strategi pemasarannya melalui peluncuran dua produk unggulan, yaitu pembiayaan ritel kendaraan baru bagi konsumen dan pembiayaan *wholesale* bagi *dealer*. Kehadiran kedua produk tersebut menjadi bagian dari upaya Perusahaan untuk memperluas penetrasi pasar kendaraan Hyundai Motor Group sekaligus meningkatkan daya saing melalui penyediaan solusi pembiayaan yang kompetitif, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Pada segmen ritel, strategi pemasaran difokuskan pada penyediaan skema pembiayaan yang memberikan kemudahan dan nilai tambah bagi konsumen. HCFI menghadirkan berbagai pilihan pembayaran inovatif, seperti *balloon payment* dan *50:50 deferred payment*, guna menjangkau lebih banyak segmen pelanggan dengan kebutuhan finansial yang beragam. Skema *balloon payment* menawarkan cicilan bulanan yang lebih ringan sehingga meningkatkan daya tarik produk bagi konsumen yang mengutamakan fleksibilitas arus kas, sementara skema *50:50 deferred payment* memberikan alternatif pembayaran yang lebih adaptif dengan pembagian pelunasan di awal dan akhir masa pembiayaan. Pendekatan ini menjadi bagian dari strategi pemasaran berbasis kebutuhan konsumen untuk meningkatkan minat pembelian kendaraan Hyundai Motor Group.

Dalam mendukung efektivitas pemasaran, HCFI menempatkan *Credit Marketing Officer* (CMO) di berbagai jaringan *dealer* Hyundai. Kehadiran CMO memungkinkan Perusahaan memberikan konsultasi pembiayaan secara langsung, memperkuat hubungan dengan calon konsumen, serta mempercepat proses akuisisi konsumen. Selain memperkuat pemasaran secara *offline*, HCFI juga mengembangkan kanal pemasaran digital melalui layanan *Customer Direct* yang memungkinkan konsumen memperoleh informasi produk, simulasi harga, hingga pengajuan pembiayaan secara daring. Pengembangan kanal digital tersebut menjadi bagian dari transformasi pemasaran Perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kenyamanan pelanggan, serta memperkuat pengalaman konsumen melalui layanan yang lebih cepat dan mudah diakses.

This year, HCFI strengthened its marketing strategy by launching two flagship products: new vehicle retail financing for consumers and wholesale financing for dealers. The introduction of these two products is part of the Company's efforts to expand market penetration for Hyundai Motor Group vehicles while enhancing its competitiveness by providing competitive, flexible, and market-focused financing solutions.

In the retail segment, the marketing strategy focuses on providing financing schemes that offer convenience and added value to consumers. HCFI offers a variety of innovative payment options, such as *balloon payments* and *50:50 deferred payments*, to reach a wider customer segment with diverse financial needs. The *balloon payment* scheme offers lower monthly installments, increasing the product's appeal to consumers who prioritize cash flow flexibility, while the *50:50 deferred payment* scheme provides a more adaptable payment alternative with payments split at the beginning and end of the financing period. This approach is part of a consumer-driven marketing strategy to increase interest in purchasing Hyundai Motor Group vehicles.

To support marketing effectiveness, HCFI places Credit Marketing Officers (CMOs) across the Hyundai dealer network. The presence of a CMO allows the Company to provide direct financing consultations, strengthen relationships with potential customers, and accelerate customer acquisition. In addition to strengthening offline marketing, HCFI is also developing digital marketing channels through its *Customer Direct* service, which allows consumers to obtain product information, price simulations, and even apply for financing online. The development of these digital channels is part of the Company's marketing transformation to expand market reach, improve customer convenience, and enhance the customer experience through faster and more accessible services.

DIVIDEN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN

Dividends and Dividend Policy ...

Saat ini Perusahaan belum memiliki kebijakan dividen. Semua keputusan terkait dividen akan dibuat oleh RUPS atau Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perusahaan.

Currently, the Company does not have a dividend policy. All dividend decisions will be made by the General Meeting of Shareholders (GMS) or by Shareholder Resolutions in lieu of the GMS, taking into account the Company's financial condition.

Pada tahun ini, Perusahaan belum membayar dividen.

The Company has not paid any dividends this year.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN ATAU MANAJEMEN

Employee or Management Share Ownership Program ...

Hingga saat ini, Perusahaan belum memiliki program kepemilikan saham, baik untuk karyawan maupun manajemen.

To date, the Company does not have a share ownership program, either for employees or management.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Material Information and Facts Subsequent to the Accountant's Report Date ...

Susunan Komisaris dan Direksi untuk tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 1 telah dituangkan dalam Akta Notaris Yulia, S.H., Nomor 17

The composition of the Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2025, as disclosed in Note 1 was formalized in Notarial Deed Number 17 dated

tanggal 9 Januari 2026. Akta tersebut telah disetujui dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia pada tanggal 5 Februari 2026 berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.09-0032526 Tahun 2026.

January 9, 2026, of Yulia, S.H. The deed was approved and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia on February 5, 2026, pursuant to Decree Number AHU-AH.01.09-0032526 Year 2026.

PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Uses of Public Offering Proceeds ...

HCFI tidak memiliki dana hasil penawaran umum yang harus dilaporkan.

HCFI has no proceeds from the public offering to report.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU DENGAN PIHAK AFILIASI

Material Transactions That Have Conflict of Interest and/or with Affiliated Parties ...

Sepanjang tahun 2025, HCFI tidak melakukan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau dengan pihak afiliasi yang sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Throughout 2025, HCFI did not conduct any material transactions containing conflicts of interest and/or with affiliated parties in accordance with OJK Regulation (POJK) Number 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.

PERUBAHAN REGULASI

Change in Regulation ...



Ada beberapa regulasi yang diterbitkan dalam rangka perubahan maupun regulasi baru, pada tahun 2025, namun manajemen memandang bahwa tidak ada dampak signifikan pada Perusahaan dan angka-angka pada laporan keuangan, yaitu:

1. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan hukum Perseroan Terbatas.
2. POJK Nomor 35 Tahun 2025 tentang perubahan atas POJK Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Pembiayaan Infrastruktur, dan Modal Ventura.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Gugatan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Untuk Pelindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

There were a number of regulations that were issued in 2025, however, the management views that there is no significant impact on the Company and the figures in the financial statements, namely:

1. Regulation of the Minister of Law of The Republic of Indonesia Number 49 of 2025 Concerning the Terms and Procedures for the Establishment, Change, and Dissolution of a Limited Liability Company Legal Entity.
2. OJK Regulation (POJK) Number 35 of 2025 concerning amendments to POJK Number 46 of 2024 concerning the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing, and Venture Capital.
3. Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 38 of 2025 concerning Lawsuits by the Financial Services Authority for Consumer Protection in the Financial Services Sector
4. Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 42 of 2025 concerning the Integrity of Financial Reporting of Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.

5. Salinan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PADK.06/2025 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
 6. Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/SEOJK.08/2025 Tentang Publikasi Penanganan Pengaduan dan Laporan Layanan Pengaduan.
 7. Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.06/2025 Tentang Laporan Penerapan Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
 8. Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PADK.08/2025 Tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi Untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan.
 9. Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PADK.06/2025 Tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah.
5. Copy of Regulation of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 48/PADK.06/2025 concerning the Implementation of Risk Management for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.
 6. Copy of Circular Letter of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 20/SEOJK.08/2025 concerning the Publication of Complaint Handling and Complaint Service Reports.
 7. Copy of Circular Letter of the Financial Services Authority Number 28/SEOJK.06/2025 concerning the Report on the Implementation of Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions.
 8. Regulation of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 37/PADK.08/2025 concerning the Provision of Information and the Delivery of Information for the Marketing of Financial Services Products and Services.
 9. Regulation of the Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia Number 45/ PADK.06/2025 concerning Monthly Reports of Financing Companies and Sharia Financing Companies.



PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Significant Changes in Accounting Policies ...

Tidak ada perubahan kebijakan akuntansi yang efektif berlaku untuk laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2025.

There were no changes in accounting policies effective for the financial statements ended December 31, 2025.

05.

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate
Governance

...

The Strength of the Team is in Each Individual Member Roles. The Strength of Each Member is the Team.



A role is the position a person holds, while purpose is the "why" behind it—the underlying intention, values, and impact. These roles embodied, Mentoring to developing talent and helping team members grow; Implementing like driving results, meeting KPIs, and delivering ROI; and Culturing to build a positive, inclusive, and efficient workplace environment.

LANDASAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Foundation of Corporate Governance ...

Perusahaan meyakini bahwa tata kelola Perusahaan akan membawa PT Hyundai Capital Finance Indonesia kepada pencapaian visinya sebagai pemimpin dalam pembiayaan mobilitas di Indonesia. Tata kelola yang baik menjadi bentuk kepatuhan yang akan meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, efektif dan efisien. Tata kelola yang baik menjadi pedoman bagi seluruh fungsi di Perusahaan dalam proses pengambilan keputusan dan melaksanakan tindakan dengan berlandaskan etika dan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Tata kelola yang baik di HCFI dilandaskan pada peraturan-peraturan yang memayunginya, antara lain:

1. UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas.
2. Peraturan OJK Nomor 48 tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
3. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan bagi perusahaan pembiayaan.

Perusahaan menganut prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran. Perusahaan telah menyusun aturan-aturan yang berfungsi sebagai pedoman tentang perilaku etis, memberikan panduan bagi setiap organ Perusahaan dan seluruh karyawan dalam menjalankan aktivitas bisnis dan operasi Perusahaan.

Struktur Tata Kelola Perusahaan

Struktur Tata Kelola Perusahaan dimulai dari organ Perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, kehati-hatian, dan independensi, serta memastikan penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, kepatuhan, dan tindak lanjut atas temuan audit. Mereka juga menelaah rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan pengawasan, menjaga transparansi terkait kepemilikan saham dan

The Company believes that good corporate governance will enable PT Hyundai Capital Finance Indonesia ("HCFI") to achieve its vision as a leader in mobility financing in Indonesia. Good governance is a form of compliance that will enhance the Company's professional, effective, and efficient management. Good corporate governance serves as a guideline for all functions within the Company in decision-making and implementing actions based on high ethics and moral values, as well as compliance with laws and regulations.

HCFI's good governance is based on the following regulations:

1. Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.
2. Financial Services Authority (OJK) Regulation Number 48 of 2024 concerning Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital, Micro Financial Institutions, and Other Financial Services Institutions.
3. Other regulations relevant to financing companies.

The Company adheres to the principles of good corporate governance, including transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The Company has established regulations that serve as guidelines for ethical behavior, providing guidance for each Company organ and all employees in carrying out the Company's business activities and operations.

Corporate Governance Structure

The corporate governance structure begins with the corporate organs consisting of General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors, and the Board of Commissioners.

The Board of Commissioners is responsible for supervising and advising the Board of Directors in good faith, with prudence, and independence, and ensuring the implementation of good governance, risk management, compliance, and follow-up on audit findings. They also review work plans and budgets, prepare supervisory reports, maintain transparency regarding share ownership

potensi konflik kepentingan, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kewajiban pelaporan kepada otoritas. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris dapat mengambil tindakan pengurusan Perusahaan. Secara hukum, setiap anggota bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian dalam pengawasan, termasuk dalam hal kepailitan, kecuali dapat membuktikan telah bertindak dengan benar, serta wajib melaporkan pelanggaran atau risiko yang membahayakan kelangsungan usaha kepada otoritas terkait.

Direksi bertanggung jawab mengelola Perusahaan sesuai peraturan dan anggaran dasar dengan itikad baik dan kehati-hatian, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada RUPS. Direksi wajib memastikan kepatuhan, menindaklanjuti temuan audit, menyusun rencana kerja dan laporan tahunan, serta memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Direksi juga harus membangun dan menjalankan sistem tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian internal. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian akibat kelalaian, termasuk dalam kepailitan, kecuali dapat membuktikan telah bertindak dengan itikad baik, tanpa konflik kepentingan, dan telah mengambil langkah pencegahan.

Guna mendukung tugas Dewan Komisaris dan Direksi, Perusahaan juga membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Nominasi dan Remunerasi, dan Komite Manajemen Risiko.

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

Untuk memastikan tata kelola berjalan dengan baik, Perusahaan menetapkan serangkaian metodologi dan prosedur terkait:

1. Manajemen risiko, untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko.
2. Strategi *Anti-Fraud* untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi dan menindaklanjuti potensi-potensi *fraud*.
3. Pencegahan dan penindaklanjutan benturan kepentingan yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota komite, Pejabat Eksekutif dan semua karyawan Perusahaan.
4. Remunerasi yang diberikan sesuai kinerja keuangan Perusahaan, pemenuhan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku, prestasi kerja individual, kewajaran dan pertimbangan strategi jangka panjang Perusahaan.
5. Keterbukaan Informasi yang memastikan semua keputusan diambil berdasarkan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.

and potential conflicts of interest, and ensure compliance with regulations and reporting obligations to authorities. Under certain circumstances, the Board of Commissioners may take action regarding the Company's management. Legally, each member is responsible for losses resulting from negligence in supervision, including in the event of bankruptcy, unless they can prove they acted properly, and are required to report violations or risks that endanger business continuity to the relevant authorities.

The Board of Directors is responsible for managing the Company in accordance with the regulations and articles of association in good faith and prudence and is accountable for its performance to the GMS. They are required to ensure compliance, follow up on audit findings, prepare work plans and annual reports, and consider the interests of all stakeholders. The Board of Directors must also establish and implement governance, risk management, compliance, and internal control systems. Each member of the Board of Directors is personally and jointly liable for losses resulting from negligence, including in the event of bankruptcy, unless they can prove they acted in good faith, without a conflict of interest, and have taken preventative measures.

To support the duties of the Board of Commissioners and the Board of Directors, the Company also established an Audit Committee, a Risk Monitoring Committee, a Nomination and Remuneration Committee, and a Risk Management Committee.

Corporate Governance Mechanisms

To ensure sound good governance, the Company has established a series of methodologies and related procedures:

1. Risk management, to identify, measure, monitor, and control risks.
2. Anti-Fraud Strategy to prevent, detect, investigate, and follow up on potential fraud.
3. Prevention and follow-up of conflicts of interest by members of the Board of Directors, Board of Commissioners, committee members, Executive Officers, and all employees of the Company.
4. Remuneration is based on the Company's financial performance, fulfillment of obligations in accordance with applicable regulations, individual work performance, fairness, and consideration of the Company's long-term strategy.
5. Information Disclosure, which ensures all decisions are made based on complete, accurate, current, and comprehensive information.

6. Kebijakan Pembiayaan yang menjunjung prinsip kehati-hatian.
7. Penerapan Keuangan Berkelanjutan guna berkontribusi dalam aspek-aspek berkelanjutan di bidang ekonomi, lingkungan hidup dan sosial.
8. Rencana bisnis yang realistis dan terukur.

6. Financing Policy that upholds the principle of prudence.
7. Implementation of Sustainable Finance to contribute to sustainable aspects in the economic, environmental, and social sectors.
8. A realistic and measurable business plan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

General Meeting of Shareholders (GMS) ...

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola Perusahaan. RUPS memiliki hak dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Hak dan kewenangan RUPS diatur melalui ketentuan dalam peraturan perundang-undang serta anggaran dasar Perusahaan.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in the Company's governance structure. The GMS has rights and authorities not held by the Board of Commissioners and the Board of Directors. The rights and authorities of the GMS are regulated by provisions in laws and regulations and the Company's articles of association.

RUPS menjadi wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan terkait Perusahaan, di dalamnya mencakup pemberian persetujuan atas perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi, serta keputusan-keputusan lain terkait Perusahaan. Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan secara berkala melaporkan serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengawasan Perusahaan kepada pemegang saham melalui RUPS.

The GMS serves as a forum for shareholders to make decisions regarding the Company, including approving amendments to the articles of association, appointing and dismissing members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors, and making other decisions related to the Company. The Company's Board of Commissioners and Board of Directors periodically reports and holds shareholders accountable for their management and supervision of the Company through the GMS.

Para pemegang saham melalui RUPS memiliki hak untuk memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai Perusahaan melalui Dewan Komisaris dan Direksi. Perusahaan memiliki kewajiban untuk memberikan pemberitahuan serta informasi-informasi lain secara lengkap terkait dengan penyelenggaraan RUPS.

Through the GMS, shareholders have the right to obtain comprehensive information about the Company through the Board of Commissioners and Board of Directors. The Company is obligated to provide complete notification and other information regarding the holding of the GMS.

Berdasarkan penyelenggaraannya, RUPS terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

- a. RUPS Tahunan (RUPST) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
- b. RUPS Luar Biasa (RUPSLB) dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan atau sewaktu-waktu dapat dilaksanakan sesuai dengan permintaan atau keinginan para pemegang saham.

Based on its implementation, GMSs are divided into two types, the Annual GMS and the Extraordinary GMS.

- a. The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) is held at least once a year.
- b. An Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) may be held as needed or at any time at the request or desire of shareholders.

RUPS Tahunan

Dalam RUPS tahunan, Direksi akan menyampaikan agenda-agenda di bawah ini untuk mendapatkan persetujuan pemegang saham.

- Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS, termasuk laporan keuangannya untuk tahun yang bersangkutan;
- Penggunaan laba, jika Perusahaan mempunyai saldo laba positif;
- Penunjukan auditor eksternal Perusahaan; dan
- Agenda rapat RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan perjanjian pemegang saham.

RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membahas dan memutuskan mata acara rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agenda rapat dalam RUPS Luar Biasa meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. Perubahan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan (termasuk misalnya apabila Perusahaan terikat dengan kewajiban penyampaian rencana kepatuhan oleh OJK yang mengharuskan Perusahaan untuk menambah modal disetor);
- b. Penerbitan efek melalui penawaran umum;
- c. Pengalihan dan/atau pembebanan kekayaan Perusahaan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu dengan yang lain;
- d. Setiap perubahan susunan pemegang saham;
- e. Setiap perubahan Anggaran Dasar;
- f. Setiap pengalihan, pelepasan hak atau menjadikan seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perusahaan sebagai jaminan utang;
- g. Setiap pengangkatan, penggantian atau pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- h. Setiap penggabungan, pengambilalihan atau pemisahan/perpanjangan jangka waktu pendirian dan pembubaran Perusahaan.

RUPS Tahun 2025

Pada tahun 2025, Perusahaan menyelenggarakan RUPS Tahunan yang dilaksanakan secara sirkuler untuk tahun buku 2024, yang ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2025. Berikut adalah Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti RUPS tersebut:

1. **Laporan Keuangan, Laporan Auditor Independen dan Laporan Tahunan atau Laporan Kinerja Perusahaan untuk Tahun Buku 2024.**

Annual GMS

At the Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors will submit the following agenda items for shareholder approval.

- The Annual Report, reviewed by the Board of Commissioners for GMS approval, including the financial statements for the year in question;
- The use of profits, if the Company has a positive retained earnings balance;
- The appointment of the Company's external auditor; and
- Other GMS meeting agenda items that have been properly submitted, taking into account the provisions of the articles of association and the shareholder agreement.

Extraordinary GMS

An Extraordinary GMS may be held at any time as needed to discuss and decide on meeting agenda items in accordance with the provisions of these Articles of Association and applicable laws and regulations. The meeting agenda for an Extraordinary GMS includes, but is not limited to:

- a. Changes to the Company's authorized and issued and paid-up capital (including, for example, if the Company is bound by the Financial Services Authority (OJK)'s obligation to submit a compliance plan, which requires the Company to increase its paid-up capital);
- b. Issuance of securities through a public offering;
- c. Transfer and/or encumbrance of the Company's assets, which constitute more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets in one or more transactions, whether related to each other;
- d. Any change in the composition of shareholders;
- e. Any amendment to the Articles of Association;
- f. Any transfer, relinquishment of rights, or the use of all or more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets as collateral for debt;
- g. Any appointment, replacement, or dismissal of members of the Board of Directors and Board of Commissioners; and
- h. Any merger, acquisition or separation/extension of the period of establishment and -dissolution of the Company.

2025 GMS

In 2025, the Company held Annual GMS through a circular meeting for the 2024 financial year, signed on June 25, 2025. The following is the Circular Shareholder Resolution in Lieu of the GMS:

1. **Financial Statements, Independent Auditor's Report, and Annual Report or Company Performance Report for the 2024 Financial Year.**

Mengesahkan laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2024 yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hasahatan & Binsar sebagaimana diuraikan dalam Laporan Auditor Independen Kepada Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Nomor 00015/2.1459/AU.1/09/1234-3/1/IV/2025 tanggal 17 April 2025 dengan pendapat bahwa laporan keuangan Perusahaan tahun buku 2024 menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2024.

Perusahaan untuk tahun buku 2024 memperoleh Laba bersih sebesar Rp65.278.157.071,- (enam puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah) namun demikian Rapat menyetujui dari laba tersebut tidak dibagikan sebagai Dividen kepada Para Pemegang Saham, dan laba yang tidak dibagikan sebagai Dividen tersebut dimasukkan ke dalam *Retained Earning*.

3. Penetapan Gaji dan Tunjangan Anggota Direksi dan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

Menetapkan Gaji dan Tunjangan Anggota Direksi dan Gaji atau honorarium dan Tunjangan anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2025.

4. Penunjukan Auditor Eksternal untuk Melakukan Audit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2025.

Menyetujui untuk tidak menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik, mengingat proses seleksi masih berlangsung.

Para Pemegang Saham akan menunjuk Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk mengaudit Laporan Keuangan Perusahaan Tahun Buku 2025.

Ratified the Company's financial statements for the 2024 financial year, consisting of the statement of financial position as of December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year ended December 31, 2024, as well as the notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies audited by Hasahatan & Binsar Public Accounting Firm, as described in the Independent Auditor's Report to the Shareholders, Board of Commissioners, and Board of Directors of the Company. Number 00015/2.1459/AU.1/09/1234-3/1/IV/2025 dated April 17, 2025, with the opinion that the Company's financial statements for the 2024 financial year present fairly, in all material respects, the Company's financial position as of December 31, 2024, and its financial performance and cash flows for the year ended December 31, 2024, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

2. Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2024 Financial Year.

The Company for the 2024 financial year achieved a net profit of Rp65,278,157,071 (sixty-five billion two hundred seventy-eight million one hundred fifty-seven thousand seventy-one rupiah). However, the Meeting agreed that no dividends will be distributed to Shareholders, and the undistributed dividends will be included in Retained Earnings.

3. Determination of the Salaries and Allowances of Members of the Board of Directors and the Salaries or Honorariums and Allowances of Members of the Board of Commissioners of the Company.

Determination of the Salaries and Allowances of Members of the Board of Directors and the Salaries or Honorariums and Allowances of Members of the Board of Commissioners of the Company for the 2025 financial year.

4. Appointment of an External Auditor to Audit the Company's Financial Statements for the 2025 Financial Year.

Agreed not to appoint a Public Accounting Firm and Public Accountant, considering that the selection process is still ongoing.

The Shareholders will appoint a Public Accounting Firm and a Public Accountant through an Extraordinary General Meeting of Shareholders to audit the Company's Financial Statements for the 2025 Financial Year.

5. Tindakan-Tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan selama Tahun Buku 2024.

Menerima dan menyetujui seluruh tindakan, perbuatan, kontrak dan laporan dalam bentuk apapun juga ("Tindakan-Tindakan"), yang telah dibuat dan/atau dilaksanakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, selama masa jabatan mereka pada Tahun Buku 2024. sebagaimana termaktub dalam Laporan Keuangan yang Diaudit, Laporan Direksi, Laporan Dewan Komisaris serta Laporan Tahunan atau Laporan Kinerja Perusahaan untuk Tahun Buku 2024. Tindakan-Tindakan tersebut diakui dan diterima sebagai Tindakan-Tindakan Perusahaan.

5. Actions of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners during the 2024 Financial Year.

Accepted and approved all actions, deeds, contracts, and reports in any form ("Actions") made and/or implemented by the Company's Board of Directors and Board of Commissioners, either individually or jointly, during their term of office in the 2024 Financial Year, as set forth in the Audited Financial Statements, the Board of Directors' Report, the Board of Commissioners' Report, and the Company's Annual Report or Performance Report for the 2024 Financial Year. These actions are acknowledged and accepted as Company Actions.

Surat Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS

Pada tahun 2025, para pemegang saham Perusahaan juga telah membuat keputusan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pemegang Saham di Luar RUPS sebanyak 5 (lima) kali. Semuanya telah ditandatangani oleh semua pemegang saham. Berikut adalah rincian kelima surat keputusan pemegang saham di luar RUPS tersebut:

Shareholder Circular Resolutions

In 2025, the Company's shareholders also made five decisions, with Shareholder Circular Resolutions. All of these resolutions were signed by all shareholders. The following are the details of the five shareholder circular resolutions:

Tanggal Date	KEPUTUSAN	RESOLUTION
13 Januari January	1) Menerima pengunduran diri Bapak Petrus Kiki Andries selaku Presiden Komisaris; 2) Menerima pengunduran diri Bapak Andrias Widjaja selaku Direktur Perusahaan; 3) Menerima pengangkatan atau perubahan jabatan Bapak Agung Handoko sebelumnya yaitu Direktur Utama Perusahaan menjadi Direktur Perusahaan; 4) Berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Woonchan Yoon telah memenuhi syarat sebagai Presiden Komisaris Perusahaan dengan telah diterimanya surat berdasarkan OJK tanggal 29 Oktober 2024. 5) Berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK, Bapak Kuk Joo Jang telah memenuhi syarat sebagai Direktur Utama Perusahaan dengan telah diterimanya surat berdasarkan Keputusan OJK tanggal 31 Oktober 2024. 6) Berdasarkan penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh OJK, Bapak Soon Sang Kwon telah memenuhi syarat sebagai Direktur Keuangan Perusahaan dengan telah diterimanya surat berdasarkan Keputusan OJK tanggal 13 November 2024.	1) Accepted the resignation of Mr. Petrus Kiki Andries, as President Commissioner; 2) Accepted the resignation of Mr. Andrias Widjaja as Director of the Company; 3) Accepted the appointment or change of position of Mr. Agung Handoko, previously President Director of the Company, to Director of the Company; 4) Based on the fit and proper assessment conducted by the Financial Services Authority, Mr. Woonchan Yoon has fulfilled the requirements as President Commissioner of the Company, as stated in the letter issued by the OJK dated October 29, 2024. 5) Based on the fit and proper assessment conducted by the OJK, Mr. Kuk Joo Jang has fulfilled the requirements as President Director of the Company, as stated in the letter issued by the OJK dated October 31, 2024. 6) Based on the fit and proper assessment conducted by the Financial Services Authority, Mr. Soon Sang Kwon has fulfilled the requirements as Finance Director of the Company, as stated in the letter issued by the OJK dated November 13, 2024.

Tanggal Date	KEPUTUSAN	RESOLUTION
13 Januari January	Menyetujui untuk merubah, menegaskan dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perusahaan.	Agree to amend, confirm and re-arrange all of the Company's Articles of Association.
22 September September	1) Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Robert Pius Pardede dan Bapak Agung Handoko secara berturut-turut selaku Direktur dan Direktur dari Perusahaan; 2) Menerima dan menyetujui pengangkatan Ibu Nicole Oesman selaku Direktur Perusahaan; 3) Menerima dan menyetujui pengangkatan Bapak Cahaya Gutama Sarwono selaku Direktur Perusahaan. 4) Pengangkatan Ibu Nicole Oesman dan Bapak Cahaya Gutama Sarwono secara berturut turut sebagai Direktur dan Direktur Perusahaan baru dinyatakan efektif setelah memperoleh Surat Keputusan OJK tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan dinyatakan lulus.	1) Accepted and approved the resignations of Mr. Robert Pius Pardede and Mr. Agung Handoko, respectively, as Director and Director of the Company; 2) Accepted and approved the appointment of Ms. Nicole Oesman as Director of the Company; 3) Accepted and approved the appointment of Mr. Cahaya Gutama Sarwono as Director of the Company. 4) The appointments of Ms. Nicole Oesman and Mr. Cahaya Gutama Sarwono, respectively, as Director and Director of the Company, will be declared effective upon receipt of the OJK Decree concerning the Determination of the Fit and Proper Test Results and their passing.
4 Desember December	Menyetujui penunjukan KAP Liana Ramon Xenia & Rekan (<i>member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited</i>) yang terdaftar di OJK, sebagai KAP Perusahaan untuk mengaudit informasi keuangan historis tahunan untuk Tahun Buku 2025.	Approved the appointment of KAP Liana Ramon Xenia & Associates (<i>member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited</i>) registered with the OJK, as the Company's KAP to audit the annual historical financial information for the 2025 Financial Year.
22 Desember December	1) Menyetujui untuk melakukan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perusahaan dari semula sebesar Rp399.700.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 399.700.000 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah) menjadi Rp1.129.700.000.000,- (satu triliun seratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus juta Rupiah) yang terbagi atas 1.129.700.000 (satu miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000,- (seribu Rupiah), sesuai dengan catatan sebagaimana telah disebutkan di atas; 2) Menyetujui Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perusahaan tentang meningkatkan Modal Ditempatkan dan Disetor Perusahaan.	1) Approved to increase the Company's issued and paid-up capital from Rp399,700,000,000 (three hundred ninety-nine billion seven hundred million Rupiah) divided into 399,700,000 (three hundred ninety-nine million seven hundred thousand) shares, each with a nominal value of Rp1,000 (one thousand Rupiah) to Rp1,129,700,000,000 (one trillion one hundred twenty-nine billion seven hundred million Rupiah) divided into 1,129,700,000 (one billion one hundred twenty-nine million seven hundred thousand) shares, each with a nominal value of Rp1,000 (one thousand Rupiah), in accordance with the notes mentioned above; 2) Approved the amendment to Article 4 paragraph 2 of the Company's Articles of Association concerning the increase in the Company's issued and paid-up capital.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau di tempat Perusahaan menjalankan kegiatan usahanya.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam 1 (satu) surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. Apabila RUPS kedua dilaksanakan, dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
 - a. Apabila RUPS ketiga dilaksanakan, dalam pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.
 - b. Pemanggilan RUPS kedua dan RUPS ketiga dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau RUPS ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan RUPS ketiga dilangsungkan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS dilangsungkan.
5. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan RUPS dapat diadakan di tempat mana pun dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan yang mengikat.
6. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Apabila Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur. Apabila semua Direktur tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apa pun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
7. Apabila semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir karena sebab apa pun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang ditunjuk oleh dan di antara mereka yang hadir dalam rapat.

Mekanisme Pemungutan Suara

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Apabila kuorum RUPS pertama tidak tercapai, pemanggilan RUPS kedua dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sah dan

Procedures in the GMS

1. The GMS shall be held at the Company's domicile or at the place where the Company conducts its business activities.
2. The GMS shall be held by first issuing a notice to shareholders by registered mail and/or by advertisement in one newspaper.
3. The notice shall be issued no later than 14 (fourteen) days prior to the GMS date, excluding the date of the notice and the date of the GMS.
4. If a second GMS is held, the notice for the second GMS must state that the first GMS has already taken place and did not achieve a quorum.
 - a. If a third GMS is held, the notice for the third GMS must state that the second GMS has already taken place and did not achieve a quorum.
 - b. The notice for the second and third GMS must be issued within 7 (seven) days prior to the second or third GMS. The second and third GMS shall be held no sooner than 10 (ten) days and no later than 21 (twenty-one) days after the GMS.
5. If all shareholders are present and/or represented at the GMS, prior notice is not required, and the GMS may be held anywhere within the territory of the Republic of Indonesia and shall have the right to make binding decisions.
6. The GMS shall be chaired by the President Director. If the President Director is absent or unable to attend for any reason that does not need to be proven to a third party, the GMS shall be chaired by one of the Directors. If all Directors are absent or unable to attend for any reason that does not need to be proven to a third party, the GMS shall be chaired by one of the members of the Board of Commissioners.
7. If all members of the Board of Commissioners are absent or unable to attend for any reason, which does not need to be proven to a third party, the GMS shall be chaired by a person appointed by and from among those present at the meeting.

Voting Mechanism

1. A GMS may be held if more than 1/2 (one-half) of the total shares with voting rights are present or represented. If a quorum for the first GMS is not achieved, a second GMS may be called, provided that the notice must state that the first GMS was held and did not achieve a quorum. The second GMS is valid and entitled to adopt resolutions if at least 1/3

berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Apabila kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga.

RUPS ketiga melalui pemanggilan yang di dalamnya menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum. RUPS ketiga dilaksanakan dengan kuorum yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

2. RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar, mengurangi modal dasar, dan mengurangi modal ditempatkan dan disetor dapat dilaksanakan jika dalam RUPS paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.

Keputusan RUPS pertama adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

Apabila kuorum RUPS pertama tidak tercapai, pemanggilan RUPS kedua dapat dilakukan. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

Apabila kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga.

RUPS ketiga melalui pemanggilan yang di dalamnya menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilaksanakan dan tidak mencapai kuorum. RUPS ketiga dilaksanakan dengan kuorum yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

(one-third) of the total shares with voting rights are present or represented.

If a quorum for the second GMS is not achieved, the Company may submit a request to the Chief Justice of the District Court whose jurisdiction covers the Company's domicile to determine the quorum for the third GMS.

The third GMS shall be called by means of a notice stating that the second GMS was held and did not achieve a quorum. The third GMS shall be held with a quorum determined by the Chief Justice of the District Court.

GMS decisions shall be made by deliberation to reach consensus.

If consensus cannot be reached, the resolution of the GMS is valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total votes cast at the GMS.

2. A GMS to amend the Articles of Association, reduce authorized capital, and reduce issued and paid-up capital may be held if at least 2/3 (two-thirds) of the total shares with voting rights are present or represented at the GMS.

The resolution of the first GMS is valid if approved by at least 2/3 (two-thirds) of the total votes cast at the GMS.

If a quorum for the first GMS is not reached, a second GMS may be called. The second GMS is valid and has the right to adopt resolutions if at least 3/5 (three-fifths) of the total shares with voting rights are present or represented.

The resolution of the second GMS is valid if approved by at least 2/3 (two-thirds) of the total votes cast at the GMS.

If the quorum for the second GMS is not reached, the Company may submit a request to the Chief Justice of the District Court whose jurisdiction covers the Company's domicile to determine the quorum for the third GMS.

The third GMS shall be convened by means of a notice stating that the second GMS was held and that a quorum was not reached. The third GMS shall be held with a quorum determined by the Chief Justice of the District Court.

3. RUPS dalam rangka penggabungan, pengambilalihan, peleburan, atau pemisahan, mengalihkan, melepaskan hak, atau menjadikan seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) bagian dari kekayaan bersih Perusahaan sebagai jaminan utang, pengajuan permohonan agar Perusahaan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu pendirian, dan pembubaran Perusahaan dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS.

Keputusan RUPS pertama adalah sah jika disetujui oleh sedikitnya 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

Apabila kuorum RUPS pertama tidak tercapai, pemanggilan RUPS kedua dapat dilakukan dengan ketentuan bahwa dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.

Keputusan kedua adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.

Apabila kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perusahaan dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perusahaan untuk menetapkan kuorum RUPS ketiga.

RUPS ketiga melalui pemanggilan yang di dalamnya menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS ketiga dilangsungkan dengan kuorum yang ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

4. Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dalam hal pemegang saham hadir dalam RUPS, kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk RUPS.
6. Pemegang saham dapat diwakili dalam RUPS oleh kuasanya yang sah, dengan ketentuan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perusahaan tidak dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam RUPS dan suara yang dikeluarkannya selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.

3. A GMS for the purposes of a merger, acquisition, amalgamation, or separation, transferring, relinquishing rights, or making all or more than 50% (fifty percent) of the Company's net assets as collateral for debt, filing a petition for the Company to be declared bankrupt, extending the period of incorporation, and dissolving the Company may be held if at least 3/4 (three-quarters) of the total shares with voting rights are present or represented at the GMS.

The resolution of the first GMS is valid if approved by at least 3/4 (three-quarters) of the total votes cast at the GMS.

If the quorum for the first GMS is not reached, a second GMS may be called, provided that the notice must state that the first GMS was held and did not achieve a quorum. The second GMS is valid and has the right to adopt decisions if at least 2/3 (two-thirds) of the total shares with voting rights are present or represented.

The second decision is valid if approved by at least 3/4 (three-quarters) of the total votes cast at the GMS.

If the quorum for the second GMS is not reached, the Company may submit a request to the Chief Justice of the District Court whose jurisdiction covers the Company's domicile to determine the quorum for the third GMS.

The third GMS shall be convened by means of a notice stating that the second GMS was held and that a quorum was not reached. The third GMS shall be held with a quorum determined by the Chief Justice of the District Court.

4. Each share entitles its owner to cast 1 (one) vote, subject to applicable laws and regulations.
5. If a shareholder is present at the GMS, the power of attorney granted to them shall not apply to the GMS.
6. Shareholders may be represented at the GMS by their authorized proxies. Provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may not act as proxies for shareholders at the GMS, and their votes shall not be counted in the voting.

7. Sebelum RUPS, Direksi dapat meminta kepada peserta rapat untuk membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam rapat.
8. Pemungutan suara dapat dilakukan secara lisan, kecuali pemegang saham menghendaki agar pemungutan suara dilakukan secara tertulis dan rahasia.
9. Pemegang saham dapat pula mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan RUPS, dengan ketentuan bahwa usul yang bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham dan semua pemegang saham tersebut telah menyetujui usul yang bersangkutan dengan memberikan persetujuan tertulis dan ditandatangani. Keputusan tersebut dianggap mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil dalam RUPS.

7. Prior to the GMS, the Board of Directors may request meeting participants to demonstrate their authority to attend meeting.
8. Voting may be conducted verbally, unless the shareholders wish for the vote to be conducted in writing and confidentially.
6. Shareholders may also make valid and binding decisions without holding a GMS, provided that the proposal in question has been notified in writing to all shareholders and all shareholders have approved the proposal in question by providing written and signed approval. This decision is considered to have the same legal force as the decision taken in the GMS.

RUPS Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya, Perusahaan telah melaksanakan RUPS atas tahun buku 2023 di bawah nama PT Paramitra Multifinance, di mana semua hasil keputusan telah dilaksanakan pada tahun 2024.

Previous Year's GMS

In the previous year, the Company had held a GMS for the 2023 financial year under the name of PT Paramitra Multifinance, where all decisions were implemented in 2024.

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners ...

Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perusahaan pada umumnya yang dilakukan oleh Direksi untuk kepentingan Perusahaan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi efektivitas penerapan Tata Kelola yang Baik, manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal.

The Board of Commissioners is responsible for overseeing the management policies and the general management of the Company carried out by the Board of Directors for the benefit of the Company and in accordance with the aims and objectives of the Company as well as directing, monitoring and evaluating the effectiveness of the implementation of Good Governance, risk management, compliance and internal audit.

Piagam

Di dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dipandu oleh Piagam Dewan Komisaris No.CTR-002/HCFI-COMP/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025.

Charter

In doing its jobs, the Board of Commissioners is guided by the Charter of the Board of Commissioners No.CTR-002/HCFI-COMP/XII/2025 dated December 30, 2025.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS

Appointment and Termination

Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS for a period of 3 years from the date of their appointment, without prejudice to the GMS's right to

untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Pengangkatan, pemberhentian, pengunduran diri atau penggantian Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Bila RUPS tidak menetapkan, maka hal-hal tersebut berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Rangkap Jabatan

Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:

1. Sebagai anggota Direksi dan/atau pejabat eksekutif pada:
 - a. Perusahaan jika telah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada 2 perusahaan lain;
 - b. Lebih dari 1 perusahaan lain jika telah menjabat pada 1 perusahaan lain;
2. Sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 perusahaan lain;
3. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan
4. Pada jabatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebuah jabatan tidak dianggap sebagai jabatan rangkap apabila:

1. Anggota Dewan Komisaris nonindependen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Perusahaan yang berbentuk badan hukum menjadi anggota Dewan Komisaris pada perusahaan anak dalam kelompok usahanya;
2. Anggota Dewan Komisaris merupakan pengurus asosiasi yang menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris yang dikendalikan oleh asosiasi;
3. Anggota Dewan Komisaris merupakan pengurus asosiasi yang menjalankan tugas fungsional menjadi dewan komisaris pada lembaga berdasarkan penunjukan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
4. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

sepanjang perangkap jabatan tersebut tidak mengakibatkan pengabaian terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan.

Susunan

Dewan Komisaris setidaknya-tidaknya terdiri atas 2 orang Komisaris, di mana salah satunya adalah Presiden Komisaris dan 1 orang Komisaris Independen. Perusahaan dapat memiliki Komisaris berkewarganegaraan asing, namun

dismiss them at any time. The appointment, dismissal, resignation, or replacement of members of the Board of Commissioners is determined by the GMS. If the GMS does not determine this, then these matters are effective from the closing of the GMS.

Concurrent Positions

Members of the Board of Commissioners are not allowed to have concurrent positions as:

1. As a member of the Board of Directors and/or executive officer in:
 - a. The Company, if they already serve as a member of the Board of Commissioners in 2 other companies;
 - b. More than 1 company if they already serve as a member of the Board of Commissioners in 1 other company;
2. As a member of the Board of Commissioners in more than 2 other companies;
3. Other position that may give rise to a conflict of interest; and
4. In positions with provisions of statutory regulations.

A position is not considered a concurrent position if:

1. A non-independent member of the Board of Commissioners carries out functional duties for a shareholder of the Company in the form of a legal entity and becomes a member of the Board of Commissioners of a subsidiary company within its business group;
2. A member of the Board of Commissioners is a member of an association's management and carries out functional duties as a member of the Board of Commissioners controlled by the association;
3. A member of the Board of Commissioners is a member of an association's management and carries out functional duties as a member of the board of commissioners of an institution appointed by the Financial Services Authority; and/or
4. A member of the Board of Commissioners holds a position in a non-profit organization or institution.

as long as the concurrent position does not result in neglecting the performance of duties and authorities as a member of the Company's Board of Commissioners.

Composition

The Board of Commissioners consists of at least 2 Commissioners, one of whom is the President Commissioner and 1 Independent Commissioner. The Company may have foreign commissioners, but must ensure that at least 50%

wajib memastikan paling sedikit 50% anggota Dewan Komisaris merupakan warga negara Indonesia. Paling tidak 50% anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di wilayah negara Indonesia.

Berikut adalah susunan Dewan Komisaris pada tanggal 31 Desember 2025 hingga laporan ini diterbitkan.

Presiden Komisaris	President Commissioner	Woochan Yoon
Komisaris Independen	Independent Commissioner	David Wibawa

of the Board of Commissioners members are Indonesian citizens. At least 50% of the Board of Commissioners members must reside in Indonesia.

The following is the composition of the Board of Commissioners as of December 31, 2025, and the date of this report's publication.

Profil anggota dapat ditemukan di bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Profile of the members can refer to the Company Profile chapter in this Annual Report.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Piagam Dewan Komisaris:

1. Wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.
2. Melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Mengawasi kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya yang dilakukan oleh Direksi untuk kepentingan Perusahaan serta sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.
4. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola yang baik.
5. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi efektivitas penerapan tata kelola yang baik, manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal.
6. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
7. Wajib menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.
8. Wajib melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan termasuk kebijakan implementasi, struktur organisasi, fungsi kerja dan seluruh proses yang terkait namun tidak terbatas kepada APU PPT PPPSPM, literasi inklusi keuangan, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, strategi *anti-fraud*, pengendalian internal, manajemen risiko dan lainnya

Duties and Responsibilities

The following are the duties and responsibilities of the Board of Commissioners based on the Charter of the Board of Commissioners:

1. Shall carry out supervisory duties and provide advice to the Board of Directors.
2. Shall perform its duties, authorities, and responsibilities in good faith and in accordance with the prudential principle.
3. To supervise the management policies and the general course of management conducted by the Board of Directors in the interest of the Company and in accordance with the Company's purposes and objectives.
4. To prepare a report on the activities of the Board of Commissioners, which shall form part of the report on the implementation of the good corporate governance.
5. To direct, monitor, and evaluate the effectiveness of the implementation of the good corporate governance, risk management, compliance, and internal audit
6. To ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Company's internal audit unit, external auditors, supervisory results of the OJK and/or supervisory results of other authorities and institutions.
7. Shall ensure that decision-making is carried out effectively, appropriately, and promptly, and that it acts independently in performing its duties.
8. Share supervise management policies, including policies, implementation, organizational structure, work functions, and all related processes, including but not limited to APU, PPT PPPSPM, financial literacy and inclusion, consumer protection, personal data protection, anti-fraud strategy, internal control, risk management, and other relevant matters, in order to

- guna memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap kewajiban pelaporan kepada otoritas terkait.
9. Wajib melakukan pengawasan terhadap jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun kegiatan Perusahaan dan memberikan nasihat kepada Direksi.
 10. Wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
 11. Membuat risalah Rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
 12. Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
 13. Meneliti dan menelaah rencana kerja tahunan serta anggaran tahunan Perusahaan untuk tahun buku yang akan datang yang telah dibuat oleh Direksi.
 14. Menyusun laporan pengawasan Dewan Komisaris terhadap Rencana Bisnis Tahunan Perusahaan yang dilaporkan kepada OJK secara periodik.
 15. Menerima, mengkaji, dan memberikan pendapat atas usulan rencana bisnis tahunan Perusahaan yang dibuat oleh Direksi yang akan disampaikan kepada OJK.
 16. Komisaris Independen secara khusus mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan debitur/konsumen, kreditur, dan/atau pemangku kepentingan lainnya.
 17. Melaporkan kepemilikan sahamnya pada Perusahaan jika Dewan Komisaris memiliki saham mencapai 5% atau lebih dan/atau kepemilikan saham keluarganya pada Perusahaan dan/atau pada perusahaan lain.
 18. Wajib mengungkapkan pada Perusahaan mengenai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Perusahaan.
 19. Setiap anggota turut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
 20. Wajib melaporkan kepada OJK paling lama 10 hari kerja sejak ditemukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan PVML terkait, dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.
- ensure the Company's compliance with its reporting obligations to the relevant authorities.
9. Shall supervise the overall conduct of management, both with respect to the Company and its business activities and provide advice to the Board of Directors.
 10. Shall establish guidelines and rules of procedure that are binding upon each member of the Board of Commissioners.
 11. To prepare minutes of meetings of the Board of Commissioners and retain copies thereof.
 12. Based on the Articles of Association or a resolution of the GMS, to undertake management actions of the Company under certain circumstances for a specified period of time.
 13. To examine and review the Company's annual work plan and annual budget for the forthcoming financial year as prepared by the Board of Directors.
 14. To prepare a supervisory report of the Board of Commissioners on the Company's annual business plan to be submitted periodically to the OJK.
 15. To receive, review, and provide opinions on the proposed annual business plan of the Company prepared by the Board of Directors to be submitted to the OJK.
 16. The Independent Commissioner, in particular, shall have the primary duty of performing a supervisory function to represent and safeguard the interests of debtors/consumers, creditors, and/or other stakeholders.
 17. To report his or her share ownership in the Company if the member of the Board of Commissioners holds 5% or more of the Company's shares and/or to report the share ownership of his or her family in the Company and/or in other companies.
 18. Shall disclose to the Company any financial and familial relationships with members of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, or the Company's Shareholders.
 19. Each member shall be personally liable for any loss suffered by the Company if he or she is at fault or negligent in performing his or her duties.
 20. Shall report to the OJK no later than 10 working days from the discovery of any violation of the prevailing laws and regulations in the financial sector and the relevant PVML sector, and/or any condition or potential condition that may endanger the business continuity of the Company.

Rapat

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri paling sedikit 75% dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam setahun.

Meetings

Each member of the Board of Commissioners shall attend at least 75% of the total Board of Commissioners meetings held within a year.

Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Dewan Komisaris juga wajib melaksanakan rapat bersama dengan Direksi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat-rapat ini dapat dilaksanakan melalui tatap muka atau dengan memanfaatkan teknologi informasi.

The Board of Commissioners shall convene meetings at least 1 (one) time every 3 (three) months. The Board of Commissioners shall also hold meetings with the Board of Directors at least 1 (one) time every 3 (three) months. These meetings can be held face-to-face using information technology.

Pada tahun 2025, Dewan Komisaris menyelenggarakan 4 (empat) rapat Dewan Komisaris dan 4 (empat) rapat gabungan bersama Direksi. Berikut adalah tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat-rapat tersebut.

In 2025, the Board of Commissioners held (4) four Board of Commissioners meetings and (4) four joint meetings with the Board of Directors. The following is the attendance rate of Board of Commissioners members at these meetings.

TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT DIREKSI

ATTENDANCE RATE OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Woochan Yoon	Presiden Komisaris President Commissioner	4	4	100%
David Wibawa	Komisaris Independen Independent Commissioner	4	4	100%

TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DALAM RAPAT GABUNGAN BERSAMA DIREKSI

ATTENDANCE RATE OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN JOINT MEETINGS WITH THE BOARD OF DIRECTORS

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Woochan Yoon	Presiden Komisaris President Commissioner	4	4	100%
David Wibawa	Komisaris Independen Independent Commissioner	4	4	100%

Pengembangan Kompetensi

Pengembangan kompetensi Dewan Komisaris dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat. Program ini mencakup seminar dan sertifikasi yang relevan dengan perkembangan regulasi, tata kelola yang baik, manajemen risiko, serta industri Perusahaan. Dewan Komisaris juga secara aktif mengikuti perkembangan

Competency Development

The Board of Commissioners' competency development is carried out continuously to enhance the effectiveness of its supervisory and advisory functions. This program includes seminars and certifications relevant to regulatory developments, corporate governance, risk management, and the Company's industry. The Board of Commissioners also actively monitors best practices

praktik terbaik (*best practices*) guna memastikan pengambilan keputusan yang tepat, independen, dan berbasis informasi yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

to ensure appropriate, independent, and well-informed decision-making in carrying out its duties.

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan Training Topic	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Woochan Yoon	Presiden Komisaris President Commissioner	Seminar BOD/BOC BOD/BOC Seminar	11 Juli July	APPI
David Wibawa	Komisaris Independen Independent Commissioner	Seminar BOD/BOC BOD/BOC Seminar	2 September September	APPI
		Seminar BOD/BOC BOD/BOC Seminar	28 Oktober October	APPI

Penilaian Kinerja Direksi

Tahun 2025 merupakan periode yang penting bagi perjalanan Perusahaan sebagai perusahaan pembiayaan yang baru memulai operasionalnya setelah akuisisi dan perubahan komposisi pemegang saham pada 2024. Dalam situasi tersebut, Dewan Komisaris menilai Direksi telah menunjukkan kepemimpinan yang solid dalam membangun fondasi bisnis Perusahaan, termasuk penguatan struktur organisasi, penyusunan kebijakan operasional, serta implementasi kerangka tata kelola dan manajemen risiko yang sejalan dengan praktik terbaik industri pembiayaan.

Dewan Komisaris menilai Direksi telah menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan prinsip kehati-hatian melalui pengelolaan risiko yang disiplin, penguatan sistem pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap ketentuan regulator. Komitmen tersebut menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa perkembangan Perusahaan tetap berada dalam koridor tata kelola yang baik dan berintegritas tinggi.

Penilaian Kinerja Komite-komite di Bawah Dewan Komisaris

Dalam menjalankan fungsi pengawasan secara efektif, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang tahun 2025, ketiga komite tersebut telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara aktif dan independen sesuai dengan piagam komite masing-masing serta prinsip tata kelola yang baik.

Assessment on the Performance of the Board of Directors

2025 is a crucial period for the Company's journey as a new financing company starting its operations. In this context, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has demonstrated solid leadership in building the Company's business foundation, including strengthening the organizational structure, formulating operational policies, and implementing a governance and risk management framework aligned with best practices in the financing industry.

The Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has maintained a balance between business expansion and prudent principles through disciplined risk management, strengthening internal control systems, and complying with regulatory requirements. This commitment is a crucial factor in ensuring that the Company's development remains within the framework of good governance and high integrity.

Assessment on the Performance of Committees Under the Board of Commissioners

In doing its oversight function effectively, the Board of Commissioners is supported by the Audit Committee, the Risk Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. Throughout 2025, these three committees carried out their roles and responsibilities actively and independently in accordance with their respective committee charters and the principles of good governance.

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, Dewan Komisaris menilai bahwa seluruh komite telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan, khususnya dalam memastikan penerapan tata kelola, manajemen risiko, serta pengembangan sumber daya manusia yang selaras dengan strategi dan pertumbuhan Perusahaan.

Based on the evaluation, the Board of Commissioners assesses that all committees have made significant contributions to supporting the effective oversight of the Company's management, particularly in ensuring the implementation of good governance, risk management, and human resource development aligned with the Company's strategy and growth.

DIREKSI

Board of Directors ...

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar dan kebijakan umum yang ditetapkan dalam RUPS.

The Board of Directors is fully responsible for the management of the Company in the interest and for the objectives of the Company, and represents the Company both in and out of court in accordance with the provisions of the Articles of Association and the general policies established by the GMS.

Piagam

Di dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi dipandu oleh Piagam Direksi No.CTR-001/HCFI-COMP/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025.

Charter

In doing its jobs, the Board of Directors is guided by the Charter of the Board of Directors No.CTR-001/HCFI-COMP/XII/2025 dated December 30, 2025.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Pengangkatan, pemberhentian, pengunduran diri atau penggantian Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Bila RUPS tidak menetapkan, maka hal-hal tersebut berlaku sejak ditutupnya RUPS.

Appointment and Termination

Members of the Board of Directors are appointed by the GMS for a period of 3 years from the date of their appointment, without prejudice to the GMS's right to dismiss them at any time. The appointment, dismissal, resignation, or replacement of members of the Board of Directors is determined by the GMS. If the GMS does not determine this, then these matters are effective from the closing of the GMS.

Rangkap Jabatan

Anggota Direksi dilarang melakukan rangkap jabatan dalam bentuk apapun pada perusahaan lain.

Concurrent Positions

Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions in other companies.

Susunan

Direksi Perusahaan setidaknya-tidaknnya terdiri atas 4 orang anggota Direksi. Salah satu anggota Direksi wajib diangkat sebagai Direktur Utama yang bertindak sebagai *Chief Executive Officer* (CEO). Direktur Utama bukan merupakan pemegang saham perseorangan dan/atau memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham perseorangan. Perusahaan dapat memiliki anggota Direksi

Composition

The Company's Board of Directors consists of at least four members. One member of the Board of Directors must be appointed as the President Director, acting as Chief Executive Officer (CEO). The President Director must not be an individual shareholder and/or have any family relationship with an individual shareholder. The Company may have foreign members on the Board of Directors

berkewarganegaraan asing, namun wajib memastikan paling sedikit 50% anggota Direksi merupakan warga negara Indonesia. Seluruh anggota Direksi berdomisili di wilayah negara Indonesia.

Berikut adalah susunan Direksi pada tanggal 31 Desember 2025 hingga laporan ini diterbitkan.

Direktur Utama	President Director	Kuk Joo Jang
Direktur Keuangan	Finance Director	Soon Sang Kwon
Direktur	Director	Nicole Oesman
Direktur	Director	Cahaya Gutama Sarwono

but must ensure that at least 50% of the members are Indonesian citizens. All members of the Board of Directors are domiciled in Indonesia.

The following is the composition of the Board of Directors as of December 31, 2025, and the date of this report's publication:

Pada tahun 2025, Nicole Oesman dan Cahaya Gutama Sarwono telah memperoleh persetujuan dari OJK untuk penilaian kemampuan dan kepatutan. Pengangkatan melalui Akta Nomor 17 tanggal 9 Januari 2026. Akta tersebut telah disetujui dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia pada tanggal 5 Februari 2026 berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.09-0032526 Tahun 2026.

Profil anggota dapat ditemukan di bab Profil Perusahaan pada Laporan Tahunan ini.

Tugas dan Tanggung Jawab

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Direksi menurut Piagam Direksi:

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Perusahaan dalam melaksanakan tugasnya.
2. Mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
4. Memastikan agar Perusahaan memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Debitur/konsumen, kreditur dan/atau Pemangku Kepentingan lainnya dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
5. Membantu dan menyediakan fasilitas dan/atau sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang organ Perusahaan.

In 2025, Nicole Oesman and Cahaya Gutama Sarwono obtained approval from the Financial Services Authority (OJK) for a fit and proper assessment. The appointment was made through Deed Number 17 dated January 9, 2026. The deed was approved and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia on February 5, 2026, pursuant to Decree Number AHU-AH.01.09-0032526 Year 2026.

Member profiles can be found in the Company Profile section of this Annual Report.

Duties and Responsibilities

The following are the duties and responsibilities of the Board of Directors according to the Charter of the Board of Directors:

1. Comply with the provisions of applicable laws and regulations, the Articles of Association, and other internal regulations of the Company in the performance of its duties.
2. Manage the Company in accordance with its authorities and responsibilities in good faith and in adherence to the prudential principles.
3. Be accountable for the performance of its duties to the shareholders through the General Meeting of Shareholders (GMS).
4. Ensure that the Company gives due consideration to the interest of all parties, particularly the interests of Debtors/consumers, creditors, and/or other Stakeholders, in good faith and in accordance with the prudential principle, as stipulated under applicable laws and regulations, the Articles of Association, and/or resolutions of the GMS.
5. Provide assistance and make available the necessary facilities and/or resources to ensure the effective performance of the duties and authorities of the Company's organs.

6. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
7. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi yang cakupannya wajib memuat muatan yang diatur dalam ketetapan POJK Tata Kelola yang Baik.
8. Keputusan Direksi wajib diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
9. Direksi harus menyampaikan rencana kerja yang memuat anggaran tahunan Perusahaan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan. Tahun buku yang dimaksud berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, tahun buku Perusahaan ditutup. Adapun rencana kerja tahunan Perusahaan sekurang-kurangnya mencantumkan cakupan minimum yang dipersyaratkan oleh POJK yang berlaku.
10. Direksi menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir.
11. Direksi wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi.
12. Direksi wajib memastikan ketaatan Perusahaan dalam hal penyampaian laporan wajib kepada regulator.
13. Tugas dan tanggung jawab lainnya yang diatur oleh anggaran dasar Perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas kepada tanggung jawab dalam hal pembentukan struktur organisasi, pembentukan astuan kerja, pembentukan kebijakan prosedur dan implementasi penuh atas proses yang diwajibkan POJK termasuk namun tidak terbatas pada pengawasan aktif Direksi terhadap APU PPT PPPSPM, Literasi Inklusi Keuangan, Perlindungan Data Pribadi, Perlindungan Konsumen, Penerapan Strategi *Anti-Fraud*, penerapan penuh atas Kepatuhan dan Pengendalian Internal, Manajemen Risiko maupun hal-hal wajib lainnya yang dipersyaratkan diwajibkan POJK.
6. Follow up on audit or examination findings and recommendations from the internal audit unit, external auditors, the supervisory results of the Financial Services Authority, and/or the supervisory results of other authorities and institutions.
7. The Board of Directors must establish binding guidelines and rules of procedure applicable to each member of the Board of Directors, the contents of which shall, at a minimum, include the matters stipulated under the prevailing POJK regulations on Good Corporate Governance.
8. Resolutions of the Board of Directors must be adopted in accordance with such binding guidelines and rules of procedure and shall constitute the collective responsibility of all members of the Board of Directors.
9. The Board of Directors shall submit a work plan containing the Company's annual budget to the Board of Commissioners for approval. The financial year shall run from 1 January to 31 December. At the end of each December, the Company's financial year shall be closed. The Company's annual work plan shall at least include the minimum scope required under the prevailing POJK regulations.
10. The Board of Directors shall prepare and submit the annual report to the General Meeting of Shareholders (GMS), after it has been reviewed by the Board of Commissioners, no later than 6 (six) months following the end of the Company's financial year.
11. The Board of Directors is required to prepare and maintain the register of shareholders, special register, minutes of the GMS, and minutes of meetings of the Board of Directors.
12. The Board of Directors shall ensure the Company's compliance with respect to the submission of mandatory reports to the regulator.
13. Other duties and responsibilities as stipulated in the Company's Articles of Association and the prevailing laws and regulations, including but not limited to responsibilities concerning the establishment of the organizational structure, formation of working units, formulation of policies and procedures, and full implementation of processes required under POJK regulations, including but not limited to the Board of Directors' active supervision on AML, CFT, CPF, Financial Inclusion Literacy, Private Data Protection, Consumer Protection, Anti-Fraud Strategy Implementation, full implementation of the Internal Control and Compliance, Risk Management and others as required by the OJK.

Rapat

Direksi wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan. Setiap anggota Direksi wajib menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% dari jumlah rapat Direksi dalam 1 tahun. Direksi dapat melaksanakan rapat Direksi melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Direksi wajib melaksanakan rapat bersama dengan Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali tiap 3 (tiga) bulan, dan dapat dilaksanakan melalui tatap muka dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Pada tahun 2025, Direksi telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat Direksi dan 4 (empat) kali rapat gabungan bersama Dewan Komisaris. Berikut adalah tingkat kehadiran anggota Direksi.

Meetings

The Board of Directors is required to hold regular meetings of the Board of Directors at least once every month. Each member of the Board of Directors is required to attend at least 50% of the total number of Board of Directors meetings held in a year. The Board of Directors may hold meetings face-to-face using information technology.

The Board of Directors is required to hold joint meetings with the Board of Commissioners at least once every three months, and these meetings may be held face-to-face using information technology.

In 2025, the Board of Directors held 12 (twelve) Board of Directors meetings and 4 (four) joint meetings with the Board of Commissioners. The attendance figures for Board members are as follows.

TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DALAM RAPAT DIREKSI**ATTENDANCE RATE OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Kuk Joo Jang*	Direktur Utama President Director	11	11	100%
Soon Sang Kwon*	Direktur Keuangan Finance Director	11	11	100%
Nicole Oesman**	Direktur Director	Ø	Ø	-
Cahaya Gutama Sarwono**	Direktur Director	Ø	Ø	-

TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA DIREKSI DALAM RAPAT GABUNGAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS**ATTENDANCE RATE OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS IN JOINT MEETINGS WITH THE BOARD OF COMMISSIONERS**

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Kuk Joo Jang	Direktur Utama President Director	4	4	100%
Soon Sang Kwon	Direktur Keuangan Finance Director	4	4	100%
Nicole Oesman**	Direktur Director	Ø	Ø	-
Cahaya Gutama Sarwono**	Direktur Director	Ø	Ø	-

*) Mulai menjabat pada bulan Januari setelah rapat Direksi bulan Januari diselenggarakan. Started his/her office in January after the Board of Directors meeting in January was held.

**) Hingga akhir tahun 2025 masih menunggu pengangkatan melalui akta dan registrasi akta setelah lulus uji kelayakan dan kesesuaian pada 15 Desember 2025. Until the end of 2025 they were still waiting for the appointment through a deed and deed registration after passing the fit and proper test on December 15, 2025.

Pengembangan Kompetensi

Agar tetap *update* dengan perkembangan industri, setiap anggota Direksi telah mengikuti pengembangan kompetensi yang relevan dengan bidang tugasnya. Berikut adalah pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Direksi sepanjang tahun 2025.

Competency Development

To stay updated with industry developments, each member of the Board of Directors has participated in competency development programs relevant to their respective areas of responsibility. The following is a summary of the competency development programs undertaken by the Board of Directors throughout 2025.

Nama Name	Jabatan Position	Nama Pelatihan Training Topic	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Kuk Joo Jang	Direktur Utama President Director	Seminar BOD/BOC BOD/BOC Seminar	11 Juli July	APPI
		Seminar BOD/BOC BOD/BOC Seminar	2 September September	APPI
Soon Sang Kwon	Direktur Keuangan Finance Director	Seminar BOD/BOC BOD/BOC Seminar	11 Juli July	APPI

Penilaian Kinerja Unit Audit Internal

Direksi juga melakukan evaluasi terhadap kinerja Unit Audit Internal selama tahun buku 2025 dengan mempertimbangkan efektivitas fungsi pengawasan internal, kualitas pelaksanaan audit, kontribusi terhadap penguatan manajemen risiko, serta independensi dalam menjalankan tugasnya.

Performance Assessment of the Internal Audit Unit

The Board of Directors also evaluated the performance of the Internal Audit Unit during the 2025 fiscal year, taking into account the effectiveness of its internal oversight function, the quality of audit implementation, its contribution to strengthening risk management, and its independence in carrying out its duties.

Sepanjang tahun 2025, Unit Audit Internal telah melaksanakan rencana audit tahunan secara disiplin dan sistematis, dengan pendekatan berbasis risiko yang selaras dengan kompleksitas dan dinamika bisnis Perusahaan. Melalui kegiatan audit operasional, audit kepatuhan, serta evaluasi atas efektivitas pengendalian internal, Unit Audit Internal memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis serta memperkuat sistem pengendalian internal Perusahaan.

Throughout 2025, the Internal Audit Unit implemented the annual audit plan in a disciplined and systematic manner, using a risk-based approach aligned with the complexity and dynamics of the Company's business. Through operational audits, compliance audits, and evaluations of the effectiveness of internal controls, the Internal Audit Unit provided constructive recommendations to improve business process efficiency and strengthen the Company's internal control system.

KEBIJAKAN NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Nomination and Remuneration Policy of the Board of Directors and Commissioners ...

Kebijakan Suksesi dan Nominasi

Semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan wajib dan telah memenuhi semua kriteria yang ditetapkan oleh OJK, termasuk di dalamnya memiliki integritas, cakap dalam hukum, serta tidak pernah melakukan kejahatan korporasi. Selain itu, semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris juga harus memiliki wawasan yang cukup akan industri pembiayaan serta mampu beradaptasi dengan budaya Perusahaan.

Kebijakan Remunerasi

Kebijakan remunerasi Perusahaan disusun untuk memastikan sistem penghargaan yang adil, kompetitif, dan selaras dengan kinerja Perusahaan serta prinsip tata kelola yang baik. Penetapan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan kinerja individu, kinerja Perusahaan, tanggung jawab jabatan, serta kondisi industri dan pasar tenaga kerja.

Kebijakan ini juga memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan usaha. Struktur remunerasi umumnya terdiri dari gaji tetap, tunjangan, serta insentif berbasis kinerja. Perumusan dan evaluasi kebijakan remunerasi dilakukan secara berkala melalui rekomendasi komite nominasi dan remunerasi untuk memastikan keselarasan dengan strategi Perusahaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta pencapaian tujuan jangka panjang Perusahaan.

Succession and Nomination Policy

All members of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners are required to meet and have met all criteria set by the OJK, including integrity, legal competence, and a history of corporate crime. Furthermore, all members of the Board of Directors and Board of Commissioners must possess sufficient insight into the financing industry and be able to adapt to the Company's culture.

Remuneration Policy

The Company's remuneration policy is designed to ensure a fair, competitive reward system aligned with Company performance and good governance principles. Determination of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners takes into account individual performance, Company performance, job responsibilities, and industry and labor market conditions.

This policy also takes into account the principles of prudence and business sustainability. The remuneration structure generally consists of a fixed salary, allowances, and performance-based incentives. The formulation and evaluation of the remuneration policy are conducted periodically through recommendations from the nomination and remuneration committee to ensure alignment with Company strategy, regulatory compliance, and the achievement of the Company's long-term goals.

DEWAN PENGAWASAN SYARIAH (DPS) DAN KOMITE LAIN

Sharia Supervisory Board (SSB) and Other Committee ...

Perusahaan tidak memiliki Dewan Pengawasan Syariah karena HCFI bukan merupakan entitas syariah dan tidak menerbitkan efek syariah. Perusahaan tidak memiliki komite lain selain komite-komite yang dijelaskan di bawah ini.

The Company does not have a Sharia Supervisory Board because HCFI is not a sharia entity and does not issue any sharia securities. The Company does not have any committees other than the committees explained in the segment below.

KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Committees Under the Board of Commissioners ...

Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu:

- Komite Audit;
- Komite Pemantau Risiko; dan
- Komite Nominasi dan Remunerasi.

In carrying out its supervisory duties, the Board of Commissioners is assisted by four committees, namely:

- Audit Committee;
- Risk Monitoring Committee; and
- Nomination and Remuneration Committee.

Komite Audit

Komite Audit merupakan komite di bawah Dewan Komisaris yang bertugas membantu pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan. Komite Audit memantau efektivitas pengendalian internal, serta mengawasi pelaksanaan fungsi audit internal dan audit eksternal. Komite Audit juga memastikan kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan regulator, termasuk peraturan dari OJK, serta menelaah potensi benturan kepentingan.

Audit Committee

The Audit Committee is a committee under the Board of Commissioners tasked with assisting in the oversight function of company management. The Audit Committee monitors the effectiveness of internal controls, and oversees the implementation of internal and external audit functions. The Audit Committee also ensures the Company's compliance with regulatory requirements, including those of the OJK, and assesses potential conflicts of interest.

Piagam

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Komite Audit dipandu oleh Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 (POJK 55/2015), Board of Directors Resolution No.002/HCFI-BOD/XII/2025 tanggal 30 Desember, 2025, dan Board of Commissioners Resolution No.002/HCFI-BOC/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025.

Charter

In carrying out their duties and functions, Audit Committee members are guided by OJK Regulation Number 55/POJK.04/2015 (POJK 55/2015), Board of Directors Resolution No.002/HCFI-BOD/XII/2025 dated December 30, 2025, and Board of Commissioners Resolution No.002/HCFI-BOC/XII/2025 dated December 30, 2025.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Komite Audit diangkat oleh Direksi berdasarkan hasil rapat dan/atau Keputusan Dewan Komisaris untuk bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Masa jabatan untuk anggota Komite Audit adalah 3 tahun. Anggota Komite Audit dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya selesai berdasarkan pertimbangan dan keputusan Perusahaan.

Appointment and Dismissal

Audit Committee members are appointed and dismissed by the Board of Directors and are accountable to the Board of Commissioners. The term of members of the Audit Committee is 3 years. Members of the Audit Committee maybe reappointed upon the expiry of their term of office.

Susunan

Pada tanggal 31 Desember 2025, susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Composition

On December 31, 2025, the composition of the Audit Committee is as following:

SUSUNAN KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE COMPOSITION

Posisi di Komite Position in the Committee	Nama Name	Basis Pengangkatan Appointment Basis	Masa Jabatan Term of Office
Ketua Chairman	David Wibawa	BOD Resolution No.002/ HCFI-BOD/XII/2025	31 Desember 2025 – 31 Desember 2028 December 31, 2025 – December 31, 2028
Anggota Member	Woochan Yoon		
Anggota dari Pihak Independen Member from Independent Party	Muara Lysta Sirait		

Profil Anggota Komite Audit

Berikut adalah profil anggota Komite Audit.

Profile of the Members of the Audit Committee

The followings are the profile of the members of the Audit Committee.

DAVID WIBAWA

Ketua merangkap Komisaris Independen
Chairman and Independent Commissioner

Profil lengkap beliau dapat ditemukan pada Profil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

His complete profile can be found in the Profile of the Board of Commissioners in this Annual Report.





WOOCHAN YOON

Anggota merangkap Presiden Komisaris
Member and President Commissioner

Profil lengkap beliau dapat ditemukan pada Profil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

His complete profile can be found in the Profile of the Board of Commissioners in this Annual Report.



MUARA LYSTA SIRAIT

Anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak Independen)
Member of Risk Monitoring Committee (Independent Party)



Masa Jabatan Serving Period 2025 - 2028

Menjabat Sejak Serving Since 2025

Kewarganegaraan Citizenship Indonesia Indonesian

Domisili Domicile Jakarta

Gender Perempuan • Female

Sertifikasi Certification

- Qualified Chief Risk Officer
- Qualified Risk Compliance Professional

Pengalaman Profesional Professional Experience

Beliau memiliki pengalaman yang luas di bidang manajemen risiko, tata kelola, dan kepatuhan di sektor jasa keuangan.

- Risk Management Advisor (2021 – 2023) dengan peran dalam implementasi Enterprise Risk Management berbasis ISO 31000 pada perusahaan asuransi dalam kelompok Astra.
- Berbagai posisi strategis di PT Toyota Astra Financial Services, antara lain sebagai Head of Market & Operational Risk Management (2008 – 2019), Head of Compliance (2017 – 2019), serta Head of Credit Risk & Policy Management (2006 – 2008).

She has extensive experience in risk management, governance, and compliance in the financial services sector.

- Risk Management Advisor (2021 – 2023) with a role in the implementation of ISO 31000 based Enterprise Risk Management at insurance companies within the Astra group.
- Various strategic positions at PT Toyota Astra Financial Services, including Head of Market & Operational Risk Management (2008 – 2019), Head of Compliance (2017 – 2019), and Head of Credit Risk & Policy Management (2006 – 2008).

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Saat ini, beliau aktif sebagai *trainer* dan konsultan di bidang *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC), serta sebagai dosen di President University pada program studi Aktuaria dengan fokus pada pengajaran, penelitian, dan publikasi ilmiah. Sejak tahun 2021 beliau juga menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada perusahaan asuransi milik negara.

She is currently active as a trainer and consultant in the field of Governance, Risk Management, and Compliance (GRC), as well as a lecturer at President University in the Actuarial Studies program, focusing on teaching, research, and scientific publications. Since 2021, she has also served as a member of the Risk Monitoring Committee at a state-owned insurance company.

Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship

Tidak ada • None

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit menurut Piagam Komite Audit:

1. Menelaah kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
2. Memberikan pendapat independen apabila terdapat perbedaan pandangan antara manajemen dan auditor atas jasa yang diberikan.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal dengan mempertimbangkan independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
4. Menelaah pelaksanaan audit internal serta memantau tindak lanjut hasil temuan audit oleh manajemen.
5. Menelaah pelaksanaan audit oleh auditor eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap standar audit yang berlaku.
6. Menilai efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko Perusahaan.
7. Menelaah pengaduan atau laporan yang berkaitan dengan proses akuntansi, pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan audit.
8. Menelaah potensi benturan kepentingan dan memastikan transaksi dilakukan secara wajar.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi Perusahaan dalam pelaksanaan tugasnya.

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Audit Committee according to Charter of the Audit Committee:

1. Reviewing the Company's compliance with applicable laws and regulations.
2. Providing an independent opinion if there are differences of opinion between management and the auditor regarding the services provided.
3. Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of an external auditor, taking into account independence, scope of assignment, and fees.
4. Reviewing the implementation of internal audits and monitoring management's follow-up on audit findings.
5. Reviewing the implementation of audits by the external auditor to ensure compliance with applicable audit standards.
6. Assessing the effectiveness of the Company's internal controls and risk management.
7. Reviewing complaints or reports related to accounting processes, financial reporting, internal controls, and audits.
8. Reviewing potential conflicts of interest and ensuring that transactions are conducted fairly.
9. Maintaining the confidentiality of Company documents and information in carrying out its duties.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit memiliki wewenang mengakses informasi Perusahaan, berkomunikasi dengan manajemen, auditor internal maupun eksternal, serta meminta data atau penjelasan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas.

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee has the authority to access Company information, communicate with management, internal and external auditors, and request data or explanations required in carrying out its duties.

Rapat

Komite Audit wajib melakukan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setiap tahunnya. Berikut adalah rapat dan tingkat kehadiran pada tahun 2025.

Meetings

The Audit Committee is required to meet at least four times every year. The following is a summary of meetings and attendance figures for 2025.

TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE AUDIT DALAM RAPAT KOMITE AUDIT ATTENDANCE RATE OF THE MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE IN THE COMMITTEE MEETINGS

Jabatan Position	Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Ketua Chairman	David Wibawa	4	4	100%
Anggota Member	Woochan Yoon	4	4	100%
Anggota dari Pihak Independen Member from Independent Party	Muara Lysta Sirait*	2	2	100%

*) Mulai menjabat pada triwulan ketiga tahun 2025. Started her office in the third quarter of 2025.

Pengembangan Kompetensi

Setiap anggota Komite Audit wajib mengembangkan kompetensi melalui berbagai kegiatan seperti seminar dan program pendidikan.

Competency Development

Each Audit Committee member is required to develop their competencies through various activities such as seminars and educational programs.

Jabatan Position	Nama Name	Nama Pelatihan Training Topic	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Ketua Chairman	David Wibawa	Program pengembangan beliau dapat dilihat pada program pengembangan Dewan Komisaris di bagian Dewan Komisaris.		
Anggota Member	Woochan Yoon	The development programs attended by them can be seen in the Board of Commissioners development program in the Board of Commissioners section.		
Anggota dari Pihak Independen Member from Independent Party	Muara Lysta Sirait	- Pengajar Sertifikasi Profesi Pembiayaan Indonesia. Trainer for the Indonesian Financing Professional Certification. - Pengajar Badan Sertifikasi Manajemen Risiko. Trainer for the Risk Management Certification Agency.		

Laporan Ringkas

Sepanjang tahun buku pertama operasional Perusahaan pasca akuisisi, Komite Audit melaksanakan fungsi pengawasan dengan menelaah kesiapan pelaporan keuangan, akuntansi, serta kerangka pengendalian internal yang diterapkan oleh manajemen. Komite Audit juga melakukan koordinasi dengan fungsi audit internal dalam penyusunan rencana audit serta memberikan masukan terkait penguatan proses tata kelola dan manajemen risiko.

Summary Report

Throughout the Company's first fiscal year of operations, the Audit Committee performed its oversight function by reviewing the readiness of the financial reporting, accounting, and internal control framework implemented by management. The Audit Committee also coordinated with the internal audit function in developing audit plans and provided input regarding strengthening governance and risk management processes.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Risk Monitoring Committee ...

Komite Pemantau Risiko merupakan komite di bawah Dewan Komisaris yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko di Perusahaan. Komite ini memastikan bahwa kebijakan, sistem, dan proses pengelolaan risiko telah diterapkan secara memadai dan efektif sesuai dengan kompleksitas usaha perusahaan.

The Risk Monitoring Committee is a committee under the Board of Commissioners that assists in the oversight of risk management implementation in the Company. This committee ensures that risk management policies, systems, and processes are implemented adequately and effectively, commensurate with the complexity of the company's business.

Piagam

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Komite Pemantau Risiko dipandu oleh Piagam Komite Pemantau Risiko yang sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Board of Commissioners Resolution No.002/HCFI-BOC/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025.

Charter

In carrying out their duties and functions, members of the Risk Monitoring Committee are guided by the Charter for Risk Monitoring Committee that is inline with the OJK Regulation Number 48 of 2024 concerning the Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capitals, Micro Financial Companies and Financial Service Companies. Board of Commissioners Resolution No.002/HCFI-BOC/XII/2025 dated December 30, 2025.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Komite Pemantau Risiko diangkat oleh Direksi berdasarkan hasil rapat dan/atau Keputusan Dewan Komisaris untuk bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Masa jabatan untuk anggota Komite Pemantau Risiko adalah 3 tahun. Anggota Komite Pemantau Risiko dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya selesai berdasarkan pertimbangan dan keputusan Perusahaan.

Appointment and Dismissal

Risk Monitoring Committee members are appointed and dismissed by the Board of Directors and are accountable to the Board of Commissioners. The term of members of the Risk Monitoring Committee is 3 years. Members of the Risk Monitoring Committee maybe reappointed upon the expiry of their term of office.

Susunan

Pada tanggal 31 Desember 2025, susunan Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

Composition

On December 31, 2025, the composition of the Risk Monitoring Committee is as following:

SUSUNAN KOMITE PEMANTAU RISIKO RISK MONITORING COMMITTEE COMPOSITION

Posisi di Komite Position in the Committee	Nama Name	Basis Pengangkatan Appointment Basis	Masa Jabatan Term of Office
Ketua Chairman	David Wibawa	BOD Resolution No.003/ HCFI-BOD/XII/2025	31 Desember 2025 - 31 Desember 2028 December 31, 2025 - December 31, 2028
Anggota Member	Woochan Yoon		
Anggota dari Pihak Independen Member from Independent Party	Muara Lysta Sirait		

Profil Anggota Komite Pemantau Risiko

Berikut adalah profil anggota Komite Pemantau Risiko.

Profile of the Members of the Risk Monitoring Committee

The followings are the profile of the members of the Risk Monitoring Committee.

DAVID WIBAWA

Ketua merangkap Komisaris Independen
Chairman and Independent Commissioner

Profil lengkap beliau dapat ditemukan pada Profil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

His complete profile can be found in the Profile of the Board of Commissioners in this Annual Report.



WOCHAN YOON

Anggota merangkap Presiden Komisaris
Member and President Commissioner

Profil lengkap beliau dapat ditemukan pada Profil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

His complete profile can be found in the Profile of the Board of Commissioners in this Annual Report.

MUARA LYSTA SIRAIT

Anggota Komite Pemantau Risiko (Pihak Independen)
Member of Risk Monitoring Committee (Independent Party)



Profil lengkap beliau dapat ditemukan pada bagian Komite Audit.

Her complete profile can be found in the Audit Committee segment.

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko menurut *Rule of Procedure* adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta memastikan kesesuaiannya dengan strategi dan profil risiko Perusahaan.
2. Memantau pelaksanaan manajemen risiko, termasuk kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.
3. Menilai kesesuaian antara kebijakan dan implementasi risiko, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada Dewan Komisaris.
4. Menelaah laporan profil risiko dan eksposur risiko utama yang relevan bagi industri pembiayaan.
5. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai langkah-langkah mitigasi risiko dan penguatan kerangka pengendalian internal.

Rapat

Berdasarkan piagamnya, Komite Pemantau Risiko wajib melaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) rapat setiap tahunnya. Pada tahun 2025, rapat yang diadakan oleh Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut.

Duties and Responsibilities

The duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee, according to Rule of Procedure, are as follows:

1. Evaluating the risk management policies developed by the Board of Directors and ensuring their alignment with the Company's strategy and risk profile.
2. Monitoring the implementation of risk management, including the adequacy of the risk identification, measurement, monitoring, and control processes.
3. Assessing the alignment between risk policies and implementation and providing recommendations for improvement to the Board of Commissioners.
4. Reviewing the risk profile report and key risk exposures relevant to the financing industry.
5. Providing input to the Board of Commissioners regarding risk mitigation measures and strengthening.

Meetings

Based on its charter, the Risk Monitoring Committee is required to hold at least 4 (four) meetings every year. In 2025, the meetings held by the Risk Monitoring Committee are as follows.

TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO DALAM RAPAT KOMITE AUDIT
ATTENDANCE RATE OF THE MEMBERS OF THE RISK MONITORING COMMITTEE IN THE COMMITTEE MEETINGS

Jabatan Position	Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Ketua Chairman	David Wibawa	4	4	100%
Anggota Member	Woochan Yoon	4	4	100%
Anggota dari Pihak Independen Member from Independent Party	Muara Lysta Sirait	4	2*	100%

*) Yang bersangkutan bergabung sebagai pihak independen pada Q3 2025 setelah rapat pada Q1 dan Q2 20205 terlaksana. *She joined as an independent party on the third quarter of 2025 after the meeting of the first and second quarter were held.*

Pengembangan Kompetensi

Setiap anggota Komite Pemantau Risiko wajib mengembangkan kompetensi melalui berbagai kegiatan seperti seminar dan program pendidikan.

Competency Development

Each Risk Monitoring Committee member is required to develop their competencies through various activities such as seminars and educational programs.

Jabatan Position	Nama Name	Nama Pelatihan Training Topic	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Ketua Chairman	David Wibawa	Program pengembangan beliau dapat dilihat pada program pengembangan Dewan Komisaris di bagian Dewan Komisaris.		
Anggota Member	Woochan Yoon	The development programs attended by them can be seen in the Board of Commissioners development program in the Board of Commissioners section.		
Anggota dari Pihak Independen Member from Independent Party	Muara Lysta Sirait	Program pengembangan beliau dapat dilihat pada program pengembangan Komite Audit. Her development programs can be seen in the development programs for Audit Committee section.		

Laporan Ringkas

Sepanjang periode pelaporan, komite melakukan penelaahan awal terhadap kerangka manajemen risiko, termasuk kebijakan, prosedur, dan struktur pengendalian risiko yang disusun oleh Direksi. Komite juga meninjau profil risiko Perusahaan secara berkala, khususnya terkait risiko kredit, operasional, dan kepatuhan yang relevan dengan tahap awal pengembangan usaha. Selain itu, komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penguatan sistem pemantauan risiko, peningkatan kualitas pelaporan risiko, serta penyempurnaan kebijakan manajemen risiko agar sejalan dengan praktik tata kelola yang baik dan ketentuan regulator.

Summary Report

Throughout the reporting period, the committee conducted an initial review of the risk management framework, including the policies, procedures, and risk control structure established by the Board of Directors. The committee also periodically reviewed the Company's risk profile, particularly regarding credit, operational, and compliance risks relevant to the early stages of business development. In addition, the committee provided recommendations to the Board of Commissioners regarding strengthening the risk monitoring system, improving the quality of risk reporting, and refining risk management policies to align with good governance practices and regulatory requirements.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Nomination and Remuneration Committee ...

Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat oleh Direksi berdasarkan hasil rapat dan/atau Keputusan Dewan Komisaris untuk bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris guna membantu pelaksanaan fungsi pengawasan terkait kebijakan sumber daya manusia pada tingkat Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan.

The Nomination and Remuneration Committee is a committee formed by and responsible to the Board of Commissioners to assist in the implementation of supervisory functions related to human resource policies at the level of the Company's Board of Directors and Commissioners.

Piagam

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dipandu oleh Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 48 Tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, serta Board of Commissioners Resolution No.001/HCFI-BOC/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025.

Charter

In carrying out their duties and functions, members of the Nomination and Remuneration Committee are guided by the Charter of Nomination and Remuneration Committee that is inline with the OJK Regulation Number 48 of 2024 concerning the Good Corporate Governance for Financing Institutions, Venture Capitals, Micro Financial Companies and Financial Service Companies, as well as Board of Commissioners Resolution No.001/HCFI-BOC/XII/2025 dated December 30, 2025.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat oleh Direksi berdasarkan hasil rapat dan/atau Keputusan Dewan Komisaris untuk bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Masa jabatan untuk anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah 3 tahun. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya selesai.

Appointment and Dismissal

Nomination and Remuneration Committee members are appointed and dismissed by the Board of Directors and are accountable to the Board of Commissioners. The term of members of the Nomination and Remuneration Committee is 3 years. Members of the Nomination and Remuneration Committee maybe reappointed upon the expiry of their term of office.

Susunan

Pada tanggal 31 Desember 2025, susunan Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Composition

On December 31, 2025, the composition of the Nomination and Remuneration Committee is as following:

SUSUNAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE COMPOSITION

Posisi di Komite Position in the Committee	Nama Name	Basis Pengangkatan Appointment Basis	Masa Jabatan Term of Office
Ketua Chairman	David Wibawa		
Anggota Member	Woochan Yoon	BOD Resolution No.001/ HCFI-BOD/XII/2025	31 Desember 2025 - 31 Desember 2028 December 31, 2025 - December 31, 2028
Anggota Member	Helvina Andriany		

Profil Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Berikut adalah profil anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

Profile of the Members of the Nomination and Remuneration Committee

The followings are the profile of the members of the Nomination and Remuneration Committee.

DAVID WIBAWA

Ketua merangkap Komisaris Independen
Chairman and Independent Commissioner

Profil lengkap beliau dapat ditemukan pada Profil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

His complete profile can be found in the Profile of the Board of Commissioners in this Annual Report.



WOOCHAN YOON

Anggota merangkap Presiden Komisaris
Member and President Commissioner

Profil lengkap beliau dapat ditemukan pada Profil Dewan Komisaris pada Laporan Tahunan ini.

His complete profile can be found in the Profile of the Board of Commissioners in this Annual Report.

HELVINA ANDRIANY

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi & Ketua HR&GA
Member of Nomination and Remuneration Committee & Head of HR&GA



Masa Jabatan Serving Period 2025 - 2027

Menjabat Sejak Serving Since 2025

Kewarganegaraan Citizenship Indonesia Indonesian

Domisili Domicile Jakarta

Gender Perempuan • Female

Pengalaman Profesional Professional Experience

2021 - 2024

People & Culture Manager (Commercial) PT HM Sampoerna Tbk

2018 - 2021

HR Business Partner PT Siemens Indonesia

2017 - 2018

Compensation Benefit Manager Home Credit Indonesia

2014 - 2017

Compensation & Benefit Specialist PT Siemens Indonesia

Sertifikasi Certification

Sertifikasi Ahli Pembiayaan (berlaku hingga 2028)
Financing Expert Certification (expired in 2028)

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Ketua HR&GA Head of HR&GA

Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship

Tidak ada • None

Tugas dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, berikut adalah tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan:

1. Fungsi Nominasi, yaitu menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kriteria, proses seleksi, serta calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Komite juga melakukan evaluasi terhadap komposisi, kompetensi, independensi, dan kinerja Direksi serta Dewan Komisaris secara berkala.
2. Fungsi Remunerasi, yaitu menelaah dan memberikan rekomendasi mengenai struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk gaji, tunjangan, insentif, dan fasilitas lainnya, dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan, praktik industri, serta prinsip kewajaran dan kehati-hatian.

Duties and Responsibilities

Based on Charter of the Nomination and Remuneration Committee, the following are the duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee of the Company:

1. Nomination Function, which prepares and provides recommendations to the Board of Commissioners regarding the criteria, selection process, and candidates for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. The Committee also periodically evaluates the composition, competency, independence, and performance of the Board of Directors and the Board of Commissioners.
2. Remuneration Function, which reviews and provides recommendations regarding the structure, policies, and amount of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, including salaries, allowances, incentives, and other benefits, taking into account company performance, industry practices, and the principles of fairness and prudence.

3. Evaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi, termasuk memastikan adanya sistem penilaian kinerja yang objektif serta rencana pengembangan dan suksesi manajemen.

Rapat

Berdasarkan piagamnya, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melaksanakan sekurang-kurangnya 4 (empat) rapat setiap tahunnya. Pada tahun 2025, rapat yang diadakan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut.

TINGKAT KEHADIRAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI DALAM RAPAT KOMITE ATTENDANCE RATE OF THE MEMBERS OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE IN THE COMMITTEE MEETINGS

Jabatan Position	Nama Name	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendance	Tingkat Kehadiran Attendance Rate
Ketua Chairman	David Wibawa	4	4	100%
Anggota Member	Woochan Yoon	4	4	100%
Anggota Member	Helvina Andriany	4	4	100%

Pengembangan Kompetensi

Setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mengembangkan kompetensi melalui berbagai kegiatan seperti seminar dan program pendidikan.

3. Evaluates remuneration and nomination policies, including ensuring the existence of an objective performance appraisal system and management development and succession plans.

Meetings

Based on its charter, the Nomination and Remuneration Committee is required to hold at least 4 (four) meetings every year. In 2025, the meetings held by the Nomination and Remuneration Committee are as follows.

Competency Development

Each Nomination and Remuneration Committee member is required to develop their competencies through various activities such as seminars and educational programs.

Jabatan Position	Nama Name	Nama Pelatihan Training Topic	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer
Ketua Chairman	David Wibawa	Program pengembangan beliau dapat dilihat pada program pengembangan Dewan Komisaris di bagian Dewan Komisaris.		
Anggota Member	Woochan Yoon	The development programs attended by them can be seen in the Board of Commissioners development program in the Board of Commissioners section.		

Laporan Ringkas

Pada tahun 2025, Komite telah melakukan penelaahan terhadap kebijakan nominasi dan remunerasi yang disusun oleh manajemen untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip tata kelola yang baik serta ketentuan regulator. Komite memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait struktur remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris, termasuk prinsip penilaian kinerja, agar selaras dengan tahap pengembangan Perusahaan dan praktik industri.

Summary Report

In 2025, the Committee reviewed the nomination and remuneration policies developed by management to ensure their compliance with good corporate governance principles and regulatory requirements. The Committee provided recommendations to the Board of Commissioners regarding the remuneration structure for the Board of Directors and Board of Commissioners, including performance assessment principles, to ensure alignment with the Company's development stage and industry practices.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Corporate Secretary ...

Pada saat ini Perusahaan belum menunjuk Sekretaris Perusahaan karena Perusahaan belum memiliki kebutuhan penanggung jawab untuk posisi tersebut. Namun, fungsi Sekretaris Perusahaan dilaksanakan oleh beberapa unit dan fungsi terkait.

At this time, the Company has not appointed a Corporate Secretary because the Company does not yet have a need for a person for this position. However, the functions of the Corporate Secretary are conducted by several relevant units and function.

Keterbukaan Informasi

Kewajiban Pengungkapan Informasi Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepemilikan saham pada Perusahaan jika Dewan Komisaris memiliki saham mencapai 5% atau lebih dan/atau kepemilikan saham keluarganya pada Perusahaan dan/atau pada perusahaan lain;
2. Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan pada Perusahaan mengenai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya atau Pemegang Saham Perusahaan.
3. Dewan Komisaris dan Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada OJK paling lama 10 hari kerja sejak ditemukannya:
 - a. Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan PVML terkait;
 - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.

Information Disclosure

Obligations to Disclose Information of the Board of Commissioners (BOC) and Members of the Board of Commissioners

1. The BOC and members of the BOC shall report his or her share ownership in the Company if the member of the BOC holds 5% or more of the Company's shares and/or to report the share ownership of his or her family in the Company and/or in other companies;
2. The BOC and members of the BOC shall disclose to the Company any financial and familial relationship with members of the Board of Directors, other members of the BOC or the Company's Shareholders;
3. The BOC and members of the BOC shall report to the OJK no later than 10 working days from the discovery of:
 - a. Any violation of the prevailing laws and regulations in the financial sector and the relevant PVML sector;
 - b. Any condition or potential condition that may endanger the business continuity of the Company.

UNIT AUDIT INTERNAL

Internal Audit Unit ...

Unit audit internal Perusahaan berperan penting dalam memberikan penilaian independen dan objektif atas efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, serta penerapan tata kelola yang baik. Unit audit internal memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses bisnis. Melalui fungsi ini, audit internal membantu manajemen dan Dewan Komisaris memastikan bahwa kegiatan Perusahaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan regulator serta kebijakan internal Perusahaan.

The Company's internal audit unit plays a critical role in providing independent and objective assessments of the effectiveness of its internal control system, risk management, and the implementation of good governance. The internal audit unit provides recommendations for improvements to management to enhance the efficiency and effectiveness of business processes. Through this function, internal audit assists management and the Board of Commissioners in ensuring that the Company's activities are conducted transparently, accountably, and in accordance with regulatory requirements and the Company's internal policies.

Piagam

Unit Audit Internal bekerja dengan dipandu oleh Kebijakan Audit Internal No. POL-015/HCFI-COMP/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Unit Audit Internal terdiri dari 1 orang auditor internal yang dipimpin oleh seorang kepala audit internal. Kepala Unit Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Jumlah auditor internal disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan.

Profil Kepala Unit

Hingga 31 Desember 2025, Unit Audit Internal HCFI dikepalai oleh Marzuki. Berikut adalah profil beliau.

Profile of the Unit Head

As of December 31, 2025, the HCFI Internal Audit Unit is headed by Marzuki. The following is his profile.

Charter

The Internal Audit Unit operates under the guidance of Internal Audit Policy No. POL-015/HCFI-COMP/XII/2025 dated December 31, 2025.

Appointment and Dismissal

The Internal Audit Unit consists of one or more internal auditors led by a head. The Head of the Internal Audit Unit is appointed and terminated by the President Director and reports to the President Director.

The number of internal auditors is adjusted according to the size and complexity of the Company's business activities.

MARZUKI

Kepala Unit Audit Internal
Head of Internal Audit Unit

Menjabat Sejak	Serving Since	2025
Kewarganegaraan	Citizenship	Indonesia Indonesian
Domisili	Domicile	Jakarta
Gender		Laki-laki • Male

Pengalaman Profesional Professional Experience

Beliau memiliki pengalaman yang luas di bidang audit internal, strategi bisnis, analitik, serta tata kelola yang baik di sektor jasa keuangan dan industri digital.

- Business Strategy & Market Development Manager di PT Hyundai Capital Indonesia (2023 - 2025), dengan fokus pada analisis pasar, pengembangan strategi bisnis, serta keterlibatan dalam proses merger dan akuisisi (M&A).
- Berbagai peran di PT Sinar Mas Multifinance (2010 - 2022), termasuk Senior Business Analyst, Performance Management, dan Corporate Secretary, yang mencakup analisis bisnis, aksi korporasi, pelaporan kepada regulator, serta fungsi tata kelola.
- Business intelligence di PT Solusi eCommerce Global (Mataharimall.com) dan PT LivingSocial Indonesia.



He has extensive experience in internal audit, business strategy, analytics, and corporate governance in the financial services and digital industries.

- Business Strategy & Market Development Manager at PT Hyundai Capital Indonesia (2023 - 2025), focusing on market analysis, business strategy development, and involvement in mergers and acquisitions (M&A).
- Various roles at PT Sinar Mas Multifinance (2010 - 2022), including Senior Business Analyst, Performance Management, and Corporate Secretary, covering business analysis, corporate actions, regulatory reporting, and governance functions.
- Business intelligence at PT Solusi eCommerce Global (Mataharimall.com) and PT LivingSocial Indonesia.

Sertifikasi Certification

- Sertifikasi Manajemen Risiko
Risk Management Certification
- Sertifikasi Dasar Managerial
Basic Managerial Certification

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Tidak ada • None

Hubungan Afiliasi Affiliation Relationship

Tidak ada • None

Tugas dan Tanggung Jawab

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal berdasarkan Piagamnya:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerjasama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Unit Audit Internal memiliki wewenang atas akses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan, melakukan komunikasi kepada pihak-pihak yang relevan serta berkoordinasi dengan Auditor Eksternal.

Pengembangan Kompetensi

Untuk memastikan kualitas kinerja yang baik, setiap anggota Unit Audit Internal harus berpartisipasi di dalam program pengembangan kompetensi baik secara mandiri maupun melalui dukungan Perusahaan. Pada tahun ini, semua pengembangan kompetensi dilakukan oleh kepala dan anggota unit secara mandiri.

Laporan Ringkas

Sepanjang tahun 2025, Unit Audit Internal melaksanakan sejumlah kegiatan audit sebagai bagian dari fungsi pengawasan independen terhadap operasional

Duties and Responsibilities

The following are the duties and responsibilities of the Internal Audit Unit based on its Charter:

1. Prepare and implement the annual Internal Audit plan;
2. Test and evaluate the implementation of internal control and risk management systems in accordance with Company policies;
3. Conduct reviews and assessments of efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing information technology, and other activities;
4. Provide improvement recommendations and objective information on audited activities to all management levels;
5. Prepare audit reports and submit them to the President Director and the Board of Commissioners;
6. Monitor, analyze, and report on the implementation of recommended corrective actions;
7. Cooperate with the Audit Committee;
8. Develop programs to evaluate the quality of internal audit activities performed; and
9. Conduct special audits when necessary.

To carry out its duties, the Internal Audit Unit has the authority to access all relevant information about the Company, communicate with relevant parties and coordinate with the External Auditor.

Competency Development

To ensure high-quality performance, each member of the Internal Audit Unit must participate in competency development programs, either independently or through Company support. This year, all competency development was conducted independently by the unit head and members.

Summary Report

Throughout 2025, the Internal Audit Unit conducted a number of audits as part of its independent oversight function over the Company's operations. Audits were

Perusahaan. Audit dilakukan terhadap program Literasi dan Inklusi Keuangan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan regulator. Selain itu, Unit Audit Internal juga melakukan Legal & Compliance Audit guna memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Pemeriksaan lainnya mencakup APU PPT PPPSPM Audit untuk menilai efektivitas penerapan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, HR & GA Audit terkait pengelolaan sumber daya manusia dan administrasi umum, serta lembaga penilaian kelayakan kredit & SLIK Operation Audit guna memastikan proses pelaporan dan pengelolaan data kredit telah berjalan secara akurat dan sesuai ketentuan. Melalui kegiatan tersebut, Unit Audit Internal memberikan rekomendasi perbaikan untuk memperkuat pengendalian internal dan tata kelola yang baik.

conducted on the Financial Literacy and Inclusion program to assess its compliance with regulatory requirements. Furthermore, the Internal Audit Unit conducted a Legal & Compliance Audit to ensure the company's compliance with applicable regulations. Other audits included an AML-CFT Audit to assess the effectiveness of money laundering and terrorism financing prevention, an HR & GA Audit related to human resource management and general administration, and a credit rating agency & SLIK Operation Audit to ensure that the credit data reporting and management processes were running accurately and in accordance with regulations. Through these activities, the Internal Audit Unit provided recommendations for improvements to strengthen internal control and good governance.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Internal Control System ...

Sistem pengendalian internal Perusahaan berperan memastikan kegiatan operasional berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebijakan serta peraturan yang berlaku. Melalui mekanisme pengawasan, pemisahan fungsi, dan prosedur yang jelas, sistem ini membantu memitigasi risiko operasional dan keuangan, serta mendukung keandalan pelaporan, menjaga aset Perusahaan, serta memperkuat penerapan tata kelola yang baik.

The Company's internal control system ensures that operational activities are carried out effectively and efficiently, and in accordance with applicable policies and regulations. Through oversight mechanisms, separation of functions, and clear procedures, this system helps mitigate operational and financial risks, supports reliable reporting, safeguards Company assets, and strengthens the implementation of good governance.

Piagam

Kebijakan terkait dengan Sistem Pengendalian Internal dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko No. POL013/HCFI-COMP/XI/2025 tanggal 10 November 2025. Kebijakan ini telah mengacu kepada peraturan-peraturan OJK terkait sistem pengendalian internal bagi perusahaan pembiayaan.

Charter

Policies related to the Internal Control System are outlined in Risk Management Policy No. POL013/HCFI-COMP/XI/2025 dated November 10, 2025. This policy refers to OJK regulations regarding the internal control system for financing companies.

Fungsi Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal wajib memastikan:

1. Kepatuhan manajemen Perusahaan terhadap prosedur manajemen risiko, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan internal Perusahaan;

Functions of the Internal Control System

The internal control system must ensure:

1. Compliance by the Company's management with risk management procedures, statutory provisions, and the Company's internal policies;

2. Kepatuhan dan efektivitas fungsi manajemen risiko dalam merancang dan menerapkan strategi dan kebijakan manajemen risiko;
3. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna dan tepat waktu;
4. Efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan bisnis dan operasional; dan
5. Efektivitas budaya risiko pada Perusahaan secara menyeluruh.

Penanggung Jawab

Penanggung jawab umum atas pengendalian internal Perusahaan adalah Direksi. Di dalam memastikan terpenuhinya tanggung jawab tersebut, Direksi dibantu oleh 3 fungsi, yaitu Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal.

Penilaian atas Efektivitas

Pada tahun 2025, Direksi telah melakukan penilaian terhadap efektivitas dan kecukupan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari penerapan tata kelola yang baik. Evaluasi dilakukan terhadap kebijakan, prosedur operasional, serta mekanisme pengawasan yang mendukung pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap peraturan. Hasil penilaian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan secara memadai dalam mendukung kegiatan operasional Perusahaan. Direksi terus melakukan penyempurnaan pada proses pengawasan dan pelaporan guna memastikan sistem pengendalian internal tetap efektif serta sejalan dengan perkembangan usaha dan ketentuan regulator.

2. Compliance and effectiveness of the risk management function in designing and implementing risk management strategies and policies;
3. Availability of complete, accurate, appropriate, and timely financial and management information;
4. Effectiveness and efficiency in business and operational activities; and
5. Effectiveness of the Company's overall risk culture.

Person-in-Charge

The Board of Directors is generally responsible for the Company's internal control. In ensuring the fulfillment of this responsibility, the Board of Directors is assisted by three functions: Risk Management, Compliance, and Internal Audit.

Assessment on the Effectiveness

In 2025, the Board of Directors assessed the effectiveness and adequacy of the internal control system as part of the implementation of good governance. The evaluation examined policies, operational procedures, and oversight mechanisms that support risk management and regulatory compliance. The assessment results indicate that the internal control system has been operating adequately to support the Company's operational activities. The Board of Directors continues to refine its monitoring and reporting processes to ensure the internal control system remains effective and aligned with business developments and regulatory requirements.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Risk Management System ...

Sistem manajemen risiko dalam Perusahaan berperan memastikan seluruh kegiatan usaha dikelola secara *prudent* dan terukur. Melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, Perusahaan dapat meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari aktivitas bisnis. Penerapan sistem ini juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat, menjaga stabilitas operasional, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan regulator dan prinsip tata kelola yang baik.

The Company's risk management system ensures that all business activities are managed prudently and measurably. Through the process of identifying, measuring, monitoring, and controlling risks, the Company can minimize potential losses arising from business activities. Implementing this system also supports more informed decision-making, maintains operational stability, and ensures compliance with regulatory requirements and good corporate governance principles.

Piagam

Perusahaan telah memiliki Sistem Manajemen Risiko yang dituangkan dalam Kebijakan Manajemen Risiko No. POL013/HCFI-COMP/XI/2025 tanggal 10 November 2025. Dasar kebijakan ini adalah semua peraturan-peraturan khususnya dari OJK yang mengatur mengenai manajemen risiko dalam perusahaan pembiayaan.

Penanggung Jawab

Seluruh fungsi dan jenjang di dalam Perusahaan bertanggungjawab untuk menyediakan dan memastikan pemenuhan manajemen risiko. Implementasi manajemen risiko dilakukan dengan menetapkan wewenang dan tanggung jawab pada setiap jenjang jabatan.

Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Perusahaan secara keseluruhan. Termasuk tanggung jawab Direksi adalah menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif, mengembangkan budaya risiko di seluruh organisasi, memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia terkait manajemen risiko, dan melakukan kaji ulang secara berkala untuk memastikan kecukupan sistem manajemen risiko.

Risiko-risiko Perusahaan

Berikut adalah risiko-risiko yang telah diidentifikasi oleh Perusahaan dan langkah-langkah mitigasinya.

No.	Jenis Risiko Risk Type	Definisi Definition
1.	Risiko Kredit Credit Risk	Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan. Risks arising from the failure of other party(ies) to fulfill its obligations to the Company.
2.	Risiko Pasar Market Risk	Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dan kondisi pasar. Risks associated with the positions of assets, liabilities, equity, and/or administrative accounts, including derivative transactions, due to overall changes in market conditions.
3.	Risiko Operasional Operational Risk	Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan. Risks arising from inadequate and/or malfunctioning internal processes, human errors, system failures, and/or external events that affect the operations of the Company.
4.	Risiko Strategis Strategic Risk	Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Risks arising from inaccurate decision-making and/or implementation of strategic decisions, as well as the failure to anticipate changes in the business environment.

Charter

The Company has a Risk Management System outlined in Risk Management Policy No. POL013/HCFI-COMP/XI/2025 dated November 10, 2025. This policy is based on all regulations, particularly those from the Financial Services Authority (OJK), that govern risk management in finance companies.

Person-in-Charge

All functions and levels within the Company are responsible for providing and ensuring compliance with risk management. Risk management implementation is carried out by assigning authority and responsibility at each level.

The Board of Directors is responsible for the implementation of risk management policies and the Company's overall risk exposures. The Board of Directors' responsibilities include developing written and comprehensive risk management policies and strategies, developing a risk culture throughout the organization, ensuring the development of human resource competencies related to risk management, and conducting periodic reviews to ensure the adequacy of the risk management system.

Company Risks

The following are the risks identified by the Company and their mitigation measures.

No.	Jenis Risiko Risk Type	Definisi Definition
5.	Risiko Likuiditas Liquidity Risk	Risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan. Risks arising from the Company's inability to meet maturing liabilities using cash flow funding sources and/or liquid assets that can be readily converted into cash without disrupting the Company's operations and financial conditions.
6.	Risiko Hukum Legal Risk	Risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. Risks arising from legal claims and/or weaknesses in legal aspects.
7.	Risiko Kepatuhan Compliance Risk	Risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perusahaan. Risks arising from the Company's failure to comply with and/or implement laws, regulations, and applicable provisions governing the Company.
8.	Risiko Reputasi Reputation Risk	Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan. Risks arising from a decline in stakeholders trust due to negative perceptions of the Company.

Penilaian atas Efektivitas

Pada tahun 2025, Direksi telah melakukan penilaian terhadap efektivitas dan kecukupan penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari penguatan tata kelola yang baik. Evaluasi dilakukan terhadap kebijakan, prosedur, serta mekanisme identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang diterapkan dalam kegiatan operasional. Hasil penilaian menunjukkan bahwa kerangka manajemen risiko telah berjalan secara memadai dan mendukung pengelolaan risiko utama Perusahaan. Meskipun demikian, Direksi terus melakukan penyempurnaan pada proses pemantauan dan pelaporan risiko guna memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan usaha serta ketentuan regulator.

Assessment on the Effectiveness

In 2025, the Board of Directors assessed the effectiveness and adequacy of risk management implementation as part of strengthening governance. The evaluation examined policies, procedures, and mechanisms for identifying, measuring, monitoring, and controlling risks implemented in operational activities. The assessment results indicate that the risk management framework is operating adequately and supports the management of the Company's key risks. Nevertheless, the Board of Directors continues to refine its risk monitoring and reporting processes to ensure they align with business developments and regulatory requirements.

KODE ETIK

Code of Conduct ...

Kode Etik adalah acuan dan arahan yang jelas atas perilaku karyawan dalam menjalankan tugas dan fungsi kerjanya, baik di lingkungan Perusahaan atau dalam hal mewakili kepentingan Perusahaan dengan menyelenggarakan kegiatan di luar Perusahaan dengan pihak lainnya. Kode Etik sangat penting untuk menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan serta menjaga nama baik dan reputasi HCFL.

The Code of Conduct serves as a definitive reference and guidance on appropriate conduct for employees in the performance of their duties and functions, whether within the internal environment of the Company or in representing the interests of the Company to conduct the activities with external parties. The code of conduct is extremely important in maintaining relationships with stakeholders, as well as upholding HCFL's good name and reputation.

Piagam

Kode Etik diatur dalam Kebijakan Kode Etik No.POL-009/HCFI-COMP/VII/2025 tanggal 10 November 2025. Isinya mencakup tujuan, definisi, cakupan, peran dan tanggung jawab, rincian prosedur, serta kontrol.

Prinsip-prinsip dalam Kode Etik

Berikut adalah prinsip-prinsip dalam Kode Etik HCFI:

1. Zero Tolerance

Perusahaan menerapkan prinsip tanpa toleransi atas pelanggaran dan ketidakpatuhan terutama terkait dengan:

- Kerahasiaan, keamanan, dan perlindungan data;
- Perolehan keuntungan pribadi dan konflik keuangan; dan
- Integritas dan peran aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan fraud serta aktif menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Strict Enforcement

Aturan kode etik lainnya diatur dengan *strict enforcement* yang terdiri dari:

- Kejujuran;
- Kepatuhan hukum dan peraturan;
- Lingkungan kerja yang aman dan kondusif;
- Jaminan mutu dan pelayanan terhadap konsumen dan hubungan dengan pemangku kepentingan; dan
- Tanggung jawab profesionalisme.

Charter

The Code of Conduct is regulated in the Code of Conduct Policy No.POL-009/HCFI-COMP/VII/2025 dated November 10, 2025. Its contents include objectives, definitions, scope, roles and responsibilities, detailed procedures, and controls.

Principles of the Code of Conducts

The following are the principles of the HCFI Code of Conduct:

1. Zero Tolerance

The Company implements a zero-tolerance principle for violations and non-compliance, particularly related to:

- Confidentiality, security, and data protection;
- Obtaining personal gain and financial conflicts; and
- Integrity and an active role in preventing and eradicating fraud, as well as actively creating a work environment free from corruption, collusion, and nepotism.

2. Strict Enforcement

Other code of ethics rules are regulated with strict enforcement, consisting of:

- Honesty;
- Compliance with laws and regulations;
- A safe and conducive work environment;
- Quality assurance and service to consumers and relationships with stakeholders; and
- Professional responsibility.

PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG (APU), PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (PPT) DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (PPPSPM)

Implementation of Anti-Money Laundering (AML) and Counter Financing of Terrorism Financing (CFT) Program and Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction (CPF)

Kebijakan APU PPT PPPSPM dibuat sebagai kebijakan dan acuan bagi Perusahaan dalam menjalankan usaha dan mencegah digunakannya Perusahaan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Piagam

Kebijakan anti pencucian uang (APU), pencegahan pendanaan terorisme (PPT) dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal (PPPSPM) diatur dalam Kebijakan No.POL-002/HCFI-COMP/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025. Isinya mencakup tujuan, cakupan, rincian prosedur, serta kontrol.

Prosedur

Prosedur untuk pencegahan APU, PPT, PPPSPM adalah dengan 5 (lima) pilar, yaitu:

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Kebijakan dan prosedur yang diterapkan di setiap aktivitas bisnis yang dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan, mulai dari identifikasi dan verifikasi nasabah, pemantauan transaksi, hingga pelaporan kepada Pusat Pelaporan, dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) apabila diperlukan.
3. Pengendalian internal.
4. Sistem informasi manajemen.
5. Sumber daya manusia dan pelatihan.

The AML, CFT, CPF policy is made as a policy and reference for the Company in carrying out its business activities and to prevent the use of the Company as a medium for money laundering terrorism financing, and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction.

Charter

The policy on anti-money laundering (AML), counter financing of terrorism financing (CFT) and prevention of financing of proliferation of weapons of mass destruction (CPF) is regulated in the Policy No.POL-002/HCFI-COMP/VI/2025 dated June 30, 2025. Its contents include objectives, scope, detailed procedures, and controls.

Procedures

The procedures for preventing AML, CFT, and CPF are based on five pillars:

1. Active supervision by the Board of Directors and Commissioners.
2. Policies and procedures implemented consistently and continuously in every business activity, from customer identification and verification, transaction monitoring, to reporting to the Financial Transaction Reports, and Analysis Center (PPATK) when necessary.
3. Internal control.
4. Management information systems.
5. Human resources and training.

KEBIJAKAN ANTI-FRAUD

Anti-Fraud Policy ...

Kebijakan *anti-fraud* disusun sebagai pedoman bagi seluruh fungsi di Perusahaan untuk menerapkan strategi *anti-fraud* secara komprehensif dalam setiap kegiatan Perusahaan yang melibatkan seluruh pihak dan jenjang organisasi. Kebijakan ini diharapkan akan mencegah terjadinya kasus penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya *fraud*, yang dapat menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi Perusahaan, konsumen dan/atau pihak lain.

Piagam

Kebijakan *anti-fraud* diatur dalam Kebijakan No.POL-004/HCFI-COMP/VI/2025 tanggal 30 Juni 2025. Isinya mencakup tujuan, definisi, cakupan, peran dan tanggung jawab, rincian prosedur, serta kontrol.

Cakupan

Kebijakan ini mencakup semua bentuk tindakan dan aktivitas yang tergolong *fraud*, yaitu:

- Korupsi meliputi benturan kepentingan yang merugikan Perusahaan dan/atau konsumen, penyuapan, penerimaan tidak sah, dan/atau pemerasan.
- Penyalahgunaan aset.
- Kecurangan laporan keuangan.
- Penipuan.
- Pembocoran informasi rahasia.
- Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai perundang-undangan.

Strategi

Strategi yang diterapkan dalam kebijakan ini merupakan penjabaran dari 4 pilar, yaitu:

1. Pencegahan

Upaya pencegahan dilakukan melalui penerapan budaya *anti-fraud* dan penguatan sistem pengendalian internal. Perusahaan menetapkan kode etik, kebijakan *anti-fraud*, serta sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh karyawan. Selain itu diterapkan proses *segregation of duties*, otorisasi berlapis, *due diligence* terhadap karyawan dan mitra, serta penguatan prosedur operasional untuk meminimalkan peluang terjadinya *fraud*.

The anti-fraud policy is designed to serve as a guideline for all functions within the Company to implement a comprehensive anti-fraud strategy in all Company activities, involving all parties and levels of the organization. This policy is expected to prevent cases of deviation and violations of statutory provisions, particularly fraud, which could cause losses, either directly or indirectly, to the Company, consumers, and/or other parties.

Charter

The policy on anti-fraud is regulated in the Policy No.POL-004/HCFI-COMP/VI/2025 dated June 30, 2025. The contents include objectives, definitions, scope, roles and responsibilities, procedural details, and controls.

Scope

This policy covers all forms of actions and activities that constitute fraud, namely:

- Corruption, including conflicts of interest that harm the Company and/or consumers, bribery, unauthorized receipts, and/or extortion.
- Misappropriation of assets.
- Financial reporting fraud.
- Fraud.
- Leakage of confidential information.
- Other actions that may be equated with fraud under the law.

Strategy

The strategy implemented in this policy embodies four pillars, namely:

1. Prevention

Prevention efforts are carried out through the implementation of an anti-fraud culture and strengthening of the internal control system. The Company has established a code of ethics and an anti-fraud policy, as well as socialization and training for all employees. Furthermore, a segregation of duties, layered authorization, due diligence for employees and partners, and strengthening of operational procedures are implemented to minimize the opportunity for fraud.

2. Deteksi

Perusahaan melakukan deteksi dini melalui *monitoring* transaksi, *review* kepatuhan prosedur, audit internal, serta mekanisme *whistleblowing system*. Analisis data, pemantauan aktivitas operasional, dan pelaporan indikasi *fraud* dari karyawan atau pihak eksternal menjadi sarana untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan secara cepat.

3. Investigasi dan Pelaporan

Setiap indikasi *fraud* akan ditindaklanjuti melalui proses investigasi yang independen dan objektif oleh unit yang berwenang. Hasil investigasi didokumentasikan secara lengkap, termasuk pengumpulan bukti, analisis kronologi kejadian, serta identifikasi pihak yang terlibat. Apabila terbukti terdapat unsur *fraud*, Perusahaan melakukan pelaporan kepada manajemen dan, jika diperlukan, kepada regulator sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Penindakan dan Perbaikan

Terhadap pihak yang terbukti melakukan *fraud*, Perusahaan memberikan sanksi disiplin sesuai peraturan Perusahaan, yang dapat berupa peringatan, pemutusan hubungan kerja, hingga proses hukum. Selain itu dilakukan tindakan perbaikan sistem dan pengendalian internal, termasuk penyempurnaan prosedur, peningkatan pengawasan, serta pembelajaran organisasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Secara keseluruhan, kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa risiko *fraud* dapat dicegah, dideteksi secara dini, ditangani secara transparan, serta diperbaiki melalui penguatan sistem pengendalian Perusahaan.

2. Detection

The Company conducts early detection through transaction monitoring, procedural compliance reviews, internal audits, and a whistleblowing system. Data analysis, monitoring of operational activities, and reporting of fraud indications from employees or external parties serve as tools to quickly identify potential irregularities.

3. Investigation and Reporting

Every indication of fraud will be followed up through an independent and objective investigation process by the authorized unit. The results of the investigation are fully documented, including evidence collection, analysis of the chronology of events, and identification of the parties involved. If fraud is proven, the Company will report it to management and, if necessary, to regulators in accordance with applicable regulations.

4. Sanctions and Remediation

The Company will impose disciplinary sanctions against parties found to have committed fraud in accordance with Company regulations, which can include warnings, termination of employment, and legal proceedings. In addition, system and internal control improvements will be implemented, including refining procedures, increasing oversight, and implementing organizational learning to prevent similar incidents in the future.

Overall, this policy aims to ensure that fraud risks are prevented, detected early, handled transparently, and remedied through strengthening the company's control system.

PERKARA HUKUM

Legal Cases ...

Hingga 31 Desember 2025, Perusahaan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menghadapi perkara hukum.

As of December 31, 2025, the Company and its members of the Board of Directors and Board of Commissioners are not facing any legal cases.

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Whistle-blowing Policy ...

Bagi HCFL, integritas adalah fondasi kepercayaan konsumen dan mitra. Karena itu, kami menyediakan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai kanal resmi untuk melaporkan dugaan pelanggaran secara aman dan rahasia, baik pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan internal maupun pihak ketiga (vendor, *dealer*, atau mitra) kami.

For HCFL, integrity is the foundation of trust with our customers and partners. That is why we provide a Whistleblowing System (WBS) as an official channel to safely and confidentially report suspected violations, whether committed by our internal employees or third parties (vendors, dealer, or partners).

Berikut adalah jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan:

The followings are types of violations that can be reported:

No.	Jenis Pelanggaran Type of Violation	Definisi Definition
1.	Fraud Fraud	Manipulasi data, penyalahgunaan aset, penggelapan dana, atau tindakan curang lainnya. Data manipulation, misuse of assets, embezzlement, or other fraudulent acts.
2.	Pelanggaran Kode Etik Violation in the Code of Conduct	Perilaku tidak sesuai nilai, norma, atau standar etika Perusahaan. Behaviors that do not comply with Company values, norms, or ethical standards.
3.	Benturan Kepentingan Conflict of Interests	Keputusan atau tindakan yang dipengaruhi kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak tertentu. Decisions or actions influenced by personal, family, or third-party interests.
4.	Pelanggaran Hukum Legal Violation	Tindakan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Acts that violate laws and regulations in Indonesia.

Tata Cara Pelaporan

- Informasikan apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana pelanggaran terjadi.
- Identitas boleh disebutkan atau anonim.
- Cantumkan kontak yang dapat dihubungi untuk *follow-up* dan *update* hasil pelaporan.
- Semua laporan dijamin kerahasiaannya dan ditindaklanjuti sesuai prosedur.

How to Report

- Explain what happened, who was involved, when, where, and how it occurred.
- Reports may be submitted with your identity or anonymously.
- Please provide contact information for follow-up and case updates.
- All reports are kept confidential and followed up according to procedure.

Alamat Pelaporan
Reporting Address

<https://hyundaicapital.co.id/whistleblowing-system>

PENERAPAN ATAS PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Implementation of Corporate Governance Guidelines ...



Perusahaan senantiasa berkomitmen mencegah dan meminimalkan potensi terjadinya pelanggaran dalam tata kelola yang baik melalui penerapan kebijakan dan prosedur internal yang sesuai dengan POJK Nomor 48 tahun 2024 tentang Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, SEOJK Nomor 28/SEOJK.06/2025 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola yang Baik Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, peraturan turunannya, serta praktik-praktik terbaik.

The Company is always committed to preventing and minimizing the potential for violations in corporate governance through the implementation of internal policies and procedures in accordance with POJK Number 48 of 2024 concerning Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions, SEOJK Number 28/SEOJK.06/2025 concerning Reports on the Implementation of Good Governance for Financing Institutions, Venture Capital Companies, Microfinance Institutions, and Other Financial Services Institutions, its derivative regulations, and best practices.

LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIAUDIT

Audited
Financial
Statements

...



**It is Good to Have an End to Journey
Toward, but it is the Journey that
Matters, in the End.**

- HCFl's in its begining of its journey. We emphasizing that growth, experiences, and lessons learned along the way are what truly matter. The key themes include embracing the process, finding joy in the present, and having the courage to take the first step toward new adventures.

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN/FINANCIAL STATEMENTS

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025/
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025**

**DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

	Halaman/ <i>Page</i>	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		<i>DIRECTORS' STATEMENT LETTER</i>
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN		<i>INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT</i>
LAPORAN KEUANGAN - Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025		<i>FINANCIAL STATEMENTS</i> - For the year ended December 31, 2025
Laporan Posisi Keuangan	1	<i>Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas	3	<i>Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas	4	<i>Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan	5	<i>Notes to Financial Statements</i>
INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN – Rasio Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (Tidak Diaudit)	52	<i>SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION -</i> <i>Financial Ratio of Financial Services Authority (Unaudited)</i>

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA /
DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS FOR
THE YEAR THEN ENDED DECEMBER 31, 2025
PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini / We, the undersigned:

- | | | |
|---------------------------------------|---|--|
| 1. Nama/ Name | : | Kuk Joo Jang |
| Alamat kantor/Office address | : | Sequis Tower, 23 rd floor, unit 1-7, Jalan Jenderal Sudirman Kav 71, Jakarta Selatan 12190. |
| Alamat domisili / Residential address | : | Pondok Indah Golf Apartment, Jakarta Selatan |
| Nomor Telepon / Phone Number | : | (021) 5091 8900 |
| Jabatan / Position | : | Direktur Utama / President Director |
| 2. Nama/Name | : | Soon Sang Kwon |
| Alamat kantor/Office address | : | Sequis Tower, 23 rd floor, unit 1-7, Jalan Jenderal Sudirman Kav 71, Jakarta Selatan 12190. |
| Alamat domisili / Residential address | : | Plaza Senayan Apartment, Jakarta Pusat |
| Nomor Telepon / Phone Number | : | (021) 5091 8900 |
| Jabatan/ Position | : | Direktur / Director |

menyatakan bahwa:

state that:

- | | |
|--|---|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Hyundai Capital Finance Indonesia untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025. | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements of PT Hyundai Capital Finance Indonesia's financial statements for the year ended December 31, 2025. |
| 2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. | 2. The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar; dan | 3. a. All information contained in the financial statements is complete and correct; and |
| b. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material. | b. The financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information and facts. |
| 4. Bertanggung jawab atas pengendalian intern dalam Perusahaan. | 4. We are responsible for the Company's internal control. |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 25 Maret/March, 2026



Kuk Joo Jang
Direktur Utama / President Director

Soon Sang Kwon
Direktur / Director

Laporan Auditor Independen

Independent Auditor's Report

No. 00081/2.1460/AU.1/09/1549-1/1/III/2026

No. 00081/2.1460/AU.1/09/1549-1/1/III/2026

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

To the Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT Hyundai Capital Finance Indonesia

PT Hyundai Capital Finance Indonesia

Opini

Opinion

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Hyundai Capital Finance Indonesia ("Perusahaan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

We have audited the financial statements of PT Hyundai Capital Finance Indonesia (the "Company"), which comprise the statement of financial position as at December 31, 2025, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including material accounting policy information.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at December 31, 2025, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis Opini

Basis for Opinion

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Liana Ramon Xenia & Rekan

Liana Ramon Xenia & Rekan ("LRX") is a member (as such term is used in Regulation of the Ministry of Finance Number 186/PMK.01/2021 and Regulation of the Financial Services Authority Number 9 of 2023 (the "Relevant Law")) of Deloitte Southeast Asia Limited ("DSEAL"). DSEAL is the registered Foreign Audit Organisation ("Organisasi Audit Asing" or "OAA") to LRX for the purposes of the Relevant Law.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its global network of member firms, and their related entities (collectively, the "Deloitte organization"). DTTL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. DTTL and each DTTL member firm and related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Liana Ramon Xenia & Rekan

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Berikut adalah uraian atas hal audit utama yang kami identifikasi dalam audit kami.

Kerugian Kredit Ekspektasian (“KKE”) pada piutang pembiayaan (piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan diler, dan tagihan anjak piutang)

Mengacu pada Catatan 3e Informasi kebijakan akuntansi material - Instrumen keuangan; Catatan 6 Piutang pembiayaan konsumen; Catatan 7 Piutang sewa pembiayaan; Catatan 8 Piutang Pembiayaan diler; Catatan 9 Tagihan anjak piutang dan Catatan 25 Manajemen risiko - risiko kredit.

Pada 31 Desember 2025, Perusahaan memiliki piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, piutang diler, dan tagihan anjak piutang masing-masing sebesar Rp 121.034.889.212, Rp 4.518.698.721, Rp 4.904.259.560 dan Rp 135.632.800.000. Cadangan KKE terhadap piutang pembiayaan konsumen, piutang sewa pembiayaan, piutang diler, dan tagihan anjak piutang masing-masing sebesar Rp 678.479.758, Rp 20.473.495, Rp 1.226.064.895 dan Rp 367.200.000. Perusahaan menerapkan ketentuan PSAK 109 Instrumen Keuangan untuk menghitung KKE atas eksposur piutang pembiayaan.

Kami berfokus pada area ini karena besarnya nilai tercatat piutang pembiayaan setelah nilai KKE yang mewakili 23% dari total aset Perusahaan. Penentuan KKE didasarkan pada beberapa asumsi yang kompleks dan subjektif dan juga pertimbangan yang digunakan oleh manajemen. Dengan melihat faktor-faktor ini, kami mengidentifikasi KKE sebagai hal audit utama.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The following is the key audit matter that we identified in our audit.

Expected credit losses (“ECL”) on financing receivables (consumer financing receivables, finance lease receivables, dealer financing receivables, and factoring receivables)

Refer to Note 3e Material accounting policy information - Financial instruments; Note 6 Consumer financing receivables; Note 7 Finance lease receivables; Note 8 Dealer financing receivables; Note 9 Factoring receivables; and Note 25 Risk management - credit risk.

As at December 31, 2025, the Company has financing receivables comprising of consumer financing receivables, finance lease receivables, dealer financing receivables, and factoring receivables amounting to Rp 121,034,889,212, Rp 4,518,698,721, Rp 4,904,259,560 and Rp 135,632,800,000, respectively. Allowance for ECL against these consumer financing receivables, finance lease receivables, dealer financing receivables, and factoring receivables amounted to Rp 678,479,758, Rp 20,473,495, Rp 1,226,064,895 and Rp 367,200,000, respectively. The Company applies PSAK 109 Financial Instruments requirements to calculate the ECL for its financing receivables exposures.

We focused on this area due to the significance of the carrying value of financing receivables after its ECL representing 23% of the total assets of the Company. The determination of ECL is based on a number of complex and subjective assumptions and judgments used by management. In view of these factors, we identified ECL as a key audit matter.

Liana Ramon Xenia & Rekan

Bagaimana audit kami merespon hal audit utama

Kami memperoleh pemahaman tentang pengendalian yang relevan terhadap audit kami dan menilai desain dan implementasi dari pengendalian tersebut yang relevan terhadap KKE atas piutang pembiayaan. Hal ini meliputi:

- Mengevaluasi kelayakan penilaian Perusahaan atas kriteria peningkatan risiko kredit secara signifikan;
- Menilai kewajaran atas pertimbangan dan asumsi utama yang dibuat oleh manajemen pada model dan parameter dalam *probability of default (PD)* dan *loss given default (LGD)*;

Kami juga melakukan prosedur substantif berikut ini:

- Mengevaluasi masukan dan asumsi relevan yang digunakan oleh Perusahaan dalam model KKE;
- Menghitung ulang KKE secara independen.

Kami telah menilai ketepatan atas pengungkapan terkait yang dibuat di dalam laporan keuangan.

Hal Lain

Laporan keuangan Perusahaan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut pada tanggal 17 April 2025.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

How our audit addressed the key audit matter

We obtained an understanding of the controls relevant to our audit and assessed the design and implementation of the controls over the ECL for financing receivables. These include:

- *Evaluated the appropriateness of the Company's assessment of its SICR criteria;*
- *Assessed the reasonableness of key judgments and assumptions made by management in the probability of default (PD) and loss given default (LGD) models and parameters;*

We also performed the following substantive testing:

- *Evaluated relevant inputs and assumptions used by the Company in the ECL models;*
- *Independently recalculated the ECL.*

We have assessed appropriateness of the related disclosures made in the financial statements.

Other Matter

The financial statements of the Company as of December 31, 2024 and for the year then ended were audited by another independent auditor who expressed an unmodified opinion on those financial statements on April 17, 2025.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Liana Ramon Xenia & Rekan

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

Liana Ramon Xenia & Rekan

- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Liana Ramon Xenia & Rekan

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

LIANA RAMON XENIA & REKAN



Rialiany Arista Ku, S.E., CPA
Izin Akuntan Publik/*Public Accountant License* No. AP. 1549

25 Maret 2026/*March 25, 2026*



00081

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas	5, 23	790.811.441.885	184.955.283.127	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi kerugian kredit ekspektasian sebesar Rp 678.479.758 pada 31 Desember 2025 (2024: nihil)	6	120.356.409.454	-	Consumer financing receivables - net of expected credit losses of Rp 678,479,758 at December 31, 2025 (2024: nil)
Piutang sewa pembiayaan - setelah dikurangi kerugian kredit ekspektasian sebesar Rp 20.473.495 pada 31 Desember 2025 (2024: nihil)	7	4.498.225.226	209.280.855	Finance lease receivables - net of expected credit losses of Rp 20,473,495 at December 31, 2025 (2024: nil)
Piutang pembiayaan diler - setelah dikurangi kerugian kredit ekspektasian sebesar Rp 1.226.064.895 pada 31 Desember 2025 (2024: nihil)	8	3.678.194.665	-	Dealer financing receivables - net of expected credit losses of Rp 1,226,064,895 at December 31, 2025 (2024: nil)
Tagihan anjak piutang - bersih	9	135.632.800.000	151.924.000.000	Factoring receivables - net
Beban dibayar dimuka dan uang muka		7.379.721.208	1.969.716.574	Prepaid expenses and advances
Aset pajak tangguhan - bersih	22	1.713.659.786	114.044.265	Deferred tax asset - net
Aset tetap dan aset hak-guna - bersih	10	39.863.115.847	1.144.669.804	Fixed assets and right-of-use assets - net
Aset takberwujud - bersih	11	52.087.718.702	30.810.203.400	Intangible assets - net
Aset lain lain - bersih		2.084.375.315	1.558.937.000	Other assets - net
JUMLAH ASET		1.158.105.662.088	372.686.135.025	TOTAL ASSETS
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang terkait pembiayaan		5.467.971.083	-	Financing related liabilities
Utang lain-lain	12	13.840.046.397	13.889.791	Other payables
Utang pajak	14	4.087.935.648	211.830.136	Taxes payable
Biaya masih harus dibayar	15	48.709.788.697	10.205	Accrued expenses
Utang bank	13	100.000.000.000	-	Bank loan
Liabilitas imbalan pasca kerja		1.163.517.000	442.383.000	Employment benefits obligation
JUMLAH LIABILITAS		173.269.258.825	668.113.132	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 per saham Modal dasar, modal ditempatkan dan disetor - 1.129.700.000 saham (2024: 399.700.000 saham)	16	1.129.700.000.000 (144.863.596.737)	399.700.000.000 (27.681.978.107)	Capital stock - Rp 1,000 par value per share Authorized, subscribed, and paid-up 1,129,700,000 shares (2024 - 399,700,000 shares)
Defisit				Deficit
JUMLAH EKUITAS		984.836.403.263	372.018.021.893	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		1.158.105.662.088	372.686.135.025	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
LAPORAN LABA RUGI DAN
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2025

	Catatan/ Notes	2025 Rp	2024 Rp	
PENDAPATAN				REVENUE
Pendapatan pembiayaan konsumen	17	2.890.539.973	-	Consumer financing income
Pendapatan sewa pembiayaan	18	82.735.558	258.379.242	Lease income on finance lease
Pendapatan anjak piutang	19	10.311.777.778	39.689.582.735	Factoring income
Pendapatan pembiayaan dealer		243.356.192	-	Dealer financing income
Pendapatan lain-lain - bersih		7.073.816.687	67.549.919.453	Other income - net
Total Pendapatan		<u>20.602.226.188</u>	<u>107.497.881.430</u>	Total Revenues
BEBAN				EXPENSES
Beban operasi	20	(78.957.455.084)	(21.734.184.814)	Operating expenses
Beban gaji dan imbalan karyawan		(55.474.586.643)	(9.940.141.947)	Salary and employee benefits
Beban bunga	21	(1.657.609.027)	(1.681.424.962)	Interest costs
Beban kerugian kredit ekspektasian		(2.334.709.785)	(76.000.000)	Provision for expected credit losses
Beban lain-lain		(1.207.680.800)	(945.744.729)	Other expenses
Total Beban		<u>(139.632.041.339)</u>	<u>(34.377.496.452)</u>	Total Expenses
(RUGI) LABA SEBELUM PAJAK		(119.029.815.151)	73.120.384.978	(LOSS) PROFIT BEFORE TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	22	<u>1.654.303.341</u>	<u>(7.842.227.907)</u>	INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
(RUGI) LABA TAHUN BERJALAN		<u>(117.375.511.810)</u>	<u>65.278.157.071</u>	(LOSS) PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN: <i>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:</i>				OTHER COMPREHENSIVE INCOME <i>Items that will not be reclassified subsequently to profit or loss:</i>
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti		248.581.000	-	Remeasurement of defined benefit obligation
Beban pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	22	<u>(54.687.820)</u>	<u>-</u>	Income tax expense relating to items that will not be reclassified subsequently to profit or loss
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak		<u>193.893.180</u>	<u>-</u>	Total other comprehensive income for the year, net of tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u><u>(117.181.618.630)</u></u>	<u><u>65.278.157.071</u></u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

Lihat Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

	Catatan/ Notes	Modal disetor/ <i>Paid-up capital stock</i> Rp	Pinjaman perpetual/ <i>Perpetual loan</i> Rp	Defisit/ <i>Deficit</i> Rp	Jumlah Ekuitas/ <i>Total Equity</i> Rp	
Saldo per 1 Januari 2024		320.000.000.000	20.000.000.000	(70.430.327.467)	269.569.672.533	<i>Balance as of January 1, 2024</i>
Laba bersih periode berjalan		-	-	65.278.157.085	65.278.157.085	<i>Profit for the year</i>
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan		-	-	-	-	<i>Other comprehensive income for the year</i>
Jumlah penghasilan komprehensif		-	-	65.278.157.085	65.278.157.085	<i>Total comprehensive income</i>
Transaksi diakui langsung pada ekuitas						<i>Transactions recognized directly in equity</i>
Penambahan modal		79.700.000.000	-	-	79.700.000.000	<i>Issuance of capital stock</i>
Selisih revaluasi aset tetap		-	-	(22.529.807.725)	(22.529.807.725)	<i>Revaluation increment in value of property and equipment</i>
Pelunasan pinjaman perpetual		-	(20.000.000.000)	-	(20.000.000.000)	<i>Redemption of perpetual loan</i>
Saldo per 31 Desember 2024		399.700.000.000	-	(27.681.978.107)	372.018.021.893	<i>Balance as of December 31, 2024</i>
Rugi bersih periode berjalan		-	-	(117.375.511.810)	(117.375.511.810)	<i>Loss for the year</i>
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan		-	-	193.893.180	193.893.180	<i>Other comprehensive income for the year</i>
Jumlah penghasilan komprehensif		-	-	(117.181.618.630)	(117.181.618.630)	<i>Total comprehensive income</i>
Transaksi diakui langsung pada ekuitas						<i>Transactions recognized directly in equity</i>
Penambahan modal	16	730.000.000.000	-	-	730.000.000.000	<i>Issuance of capital stock</i>
Saldo per 31 Desember 2025		1.129.700.000.000	-	(144.863.596.737)	984.836.403.263	<i>Balance as of December 31, 2025</i>

Lihat Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

See accompanying notes to financial statements are an integral part of these financial statements.

	Catatan/ <u>Notes</u>	<u>2025</u> Rp	<u>2024</u> Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:				Cash receipts from:
Pembiayaan konsumen		8.402.132.287	1.500.000	Consumer financing
Sewa pembiayaan		273.500.869	159.962.838	Finance lease
Pembiayaan diler		15.749.643.136	-	Dealer financing
Anjak piutang		152.291.200.000	293.723.634.415	Factoring
Bunga bank		6.484.937.233	7.571.815.002	Interest income from banks
Lain-lain		586.233.509	55.764.157.460	Others
Jumlah		<u>183.787.647.034</u>	<u>357.221.069.715</u>	Total
Pembayaran kas kepada:				Cash paid to:
Pembayaran kepada diler		(137.206.512.887)	-	Payments to dealers
Pembayaran tagihan anjak piutang		(136.000.000.000)	(72.652.715.282)	Payments of factoring receivables
Pembayaran premi asuransi konsumen		(3.751.791.260)	(859.007.149)	Payments of customer insurance premium
Beban gaji dan imbalan karyawan		(45.615.091.651)	(9.497.758.947)	Salary and employee benefits
Beban usaha		(30.416.892.770)	(32.587.743.149)	Operating expenses
Beban keuangan		(1.479.842.360)	(2.346.259.350)	Finance cost
Pembayaran pajak penghasilan		(46.733.073)	-	Income tax paid
Jumlah		<u>(354.516.864.001)</u>	<u>(117.943.483.877)</u>	Total
Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari operasi		<u>(170.729.216.967)</u>	<u>239.277.585.838</u>	Net cash (used in) provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap dan aset hak-guna		(32.634.931.401)	(119.226.327)	Acquisition of fixed asset and right-of-use asset
Perolehan aset takberwujud		(18.143.052.154)	-	Acquisition of intangible assets
Hasil penjualan aset tetap		-	13.196.622.592	Proceeds from disposal of fixed asset
Kas bersih (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi		<u>(50.777.983.555)</u>	<u>13.077.396.265</u>	Net cash (used in) provided by investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penambahan modal disetor	16	730.000.000.000	99.700.000.000	Proceeds from issuance of capital stock
Penerimaan dari pinjaman bank		200.000.000.000	-	Proceeds from bank borrowings
Pelunasan pinjaman bank		(100.000.000.000)	(194.985.500.000)	Repayments of bank borrowings
Pembayaran liabilitas sewa	26	(2.636.640.720)	-	Repayment of lease liabilities
Pelunasan pinjaman perpetual		-	(20.000.000.000)	Redemptions of perpetual loan
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan		<u>827.363.359.280</u>	<u>(115.285.500.000)</u>	Net cash provided by (used in) financing activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS				NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
		605.856.158.758	137.069.482.103	
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN				CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
		<u>184.955.283.127</u>	<u>47.885.801.024</u>	
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN				CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
	5	<u>790.811.441.885</u>	<u>184.955.283.127</u>	

Lihat Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

The accompanying notes to financial statement are an integral part of these financial statement.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Hyundai Capital Finance Indonesia ("Perusahaan") didirikan dengan nama PT Patria Nusa Mulia Leasing di Indonesia berdasarkan Akta No. 67 tanggal 24 Agustus 1984 dari Budiarti Karnadi, S.H., notaris di Jakarta. Akta ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-6203.NT.01.01.TH.84 tanggal 2 November 1984 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.54 tanggal 7 Juli 1989, Tambahan No.1262. Pada tahun 2003, berdasarkan Akta No.69 tanggal 15 Oktober 2003 dari H.Rizul Sudarmadi, S.H., notaris di Jakarta, nama Perusahaan berubah dari PT Patria Nusa Mulia Leasing menjadi PT Paramitra Multifinance. Pada tahun 2024 berdasarkan Akta perubahan No.64 tanggal 30 Mei 2024 dari Yulia,S.H., notaris di Jakarta Selatan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-0031878.AH.01.02 tahun 2024 tanggal 31 Mei 2024, Nama Perusahaan berubah dari PT Paramitra Multifinance menjadi PT Hyundai Capital Finance Indonesia. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Notaris Yulia, S.H., M. Kn. No. 116 tanggal 24 Desember 2025 mengenai perubahan Pasal 4 pada anggaran dasar. Akta ini telah disetujui dan dicatat dalam sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia pada tanggal 24 Desember 2025 dalam Surat Keputusan No.AHU-0292042.AH.01.11 tahun 2025.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan terutama meliputi bidang pembiayaan konvensional, sewa operasi dan/atau kegiatan yang berbasis imbalan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Kantor pusat Perusahaan beralamat di Sequis Tower, Lantai 23, Unit 1 - 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 71, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12190. Perusahaan tergabung dalam kelompok Hyundai Motor Grup.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT Hyundai Capital Finance Indonesia ("the Company") was established under the name PT Patria Nusa Mulia Leasing in Indonesia based on Deed No.67 dated August 24,1984 of Budiarti Karnadi, S.H., a notary in Jakarta. This deed was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decree No. C2-6203.NT.01.01.TH.84 dated November 2, 1984 and announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No.54 dated July 7, 1989, Supplement No.1262. In 2003, based on Deed No.69 dated October 15, 2003 from H. Rizul Sudarmadi, S.H., a notary in Jakarta, the Company's name changed from PT Patria Nusa Mulia Leasing to PT Paramitra Multifinance. In 2024 based on Deed of amendment No. 64 dated May 30, 2024 from Yulia,S.H., a notary in South Jakarta which this amendment to the Articles of Association has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree Number AHU-0031878.AH.01.02 year 2024 dated May 31, 2024, the Company's name changed from PT Paramitra Multifinance to PT Hyundai Capital Finance Indonesia. The Company's Articles of Association has been amended from time to time, the latest by Notarial Deed of Yulia, S.H., M. Kn., No. 116 dated December 24, 2025 concerning the changes in Article 4 of articles of association. This Notarial Deed has been accepted and recorded in the system administration of Legal Entity of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No.AHU-0292042.AH.01.11. year 2025 dated December 24, 2025.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of its activities is mainly to engage in the conventional financing, operating lease and/or fee-based activities as long as they do not conflict with laws and regulations in the financial services sector.

The Company's head office is located at Sequis Tower, 23rd Floor, Unit 1 - 7, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 71, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta, 12190. The Company is part of the Hyundai Motor Group.

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED (Continued)

b. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

	31 Desember / December 2025	
<u>Dewan Komisaris</u>		
Komisaris Utama :	Woochan Yoon	
Komisaris Independen :	David Wibawa	
<u>Direksi</u>		
Direktur Utama :	Kuk Joo Jang	
Direktur :	Soon Sang Kwon	
	Nicole Oesman *)	
	Cahaya Utama Sarwono **)	

*) Pada tanggal 15 Desember 2025, Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") telah menyetujui penunjukan Nicole Oesman sebagai Direktur Perusahaan sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-367/PL.02/2025.

**) Pada tanggal 15 Desember 2025, OJK telah menyetujui penunjukan Cahaya Utama Sarwono sebagai Direktur Perusahaan sesuai dengan Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP-368/PL.02/2025

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah 78 dan 42 (tidak diaudit).

b. Board of Commissioners, Board of Directors, and Employees

As of December 31, 2025 and 2024, the composition of the Company's management, are as follows:

	31 Desember / December 2024	
<u>Board of Commissioners</u>		
Petrus K Andries :	President Commissioner	
David Wibawa :	Independent Commissioner	
<u>Board of Directors</u>		
Agung Handoko :	President Director	
Robert Pius Pardede :	Director	
Andrias Widjaja		

*) On December 15, 2025, the Financial Services Authority ("OJK") approved the appointment of Nicole Oesman as Directors of the Company in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-367/PL.02/2025.

**) On December 15, 2025, OJK approved the appointment of Cahaya Utama Sarwono as Directors of the Company in accordance with the Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-368/PL.02/2025.

The number of the Company's employees as of December 31, 2025 and 2024 was 78 and 42 (unaudited), respectively.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Amendemen/Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Perusahaan telah menerapkan amendemen-amandemen PSAK berikut yang efektif untuk periode pelaporan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025. Penerapan tersebut tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

PSAK 221 (amendemen) Kekurangan Ketertukaran

Perusahaan telah mengadopsi amandemen PSAK 221 untuk pertama kalinya pada tahun berjalan. Amandemen tersebut menjelaskan bagaimana menilai apakah mata uang dapat dipertukarkan, dan bagaimana menentukan nilai tukar jika tidak dapat dipertukarkan.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF PSAK ("ISAK")

a. Amendments/Improvements to Standards Effective in the Current Year

In the current year, the Company has applied the following amendments to PSAK, which are mandatorily effective for reporting period beginning on or after January 1, 2025. The adoptions have not had any material impact on the disclosures or on the amounts reported in these financial statements.

PSAK 221 (amendment) Lack of Exchangeability

The Company has adopted the amendments to PSAK 221 for the first time in the current year. The amendments specify how to assess whether a currency is exchangeable, and how to determine the exchange rate when it is not.

b. Standar dan Amendemen/Penyesuaian Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan, standar, interpretasi dan amendemen-amandemen atas PSAK yang relevan bagi Perusahaan, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026

- Amendemen PSAK 109 Instrumen Keuangan dan Amendemen PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan.
- Amendemen PSAK 109 Instrumen Keuangan dan Amendemen PSAK 107 Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam.
- Penyesuaian Tahunan 2024 SAK Indonesia.

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027

- PSAK 118 Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari penerapan standar, amendemen dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Perusahaan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

b. Dasar Penyusunan

Dasar pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun terkait.

b. Standard and Amendments/Improvements to Standards Issued not yet Adopted

At the date of authorization of these financial statements, the following standard, interpretation and amendments to PSAKs relevant to the Company were issued but not effective, with early application permitted:

Effective for periods beginning on or after January 1, 2026

- Amendment to PSAK 109 Financial Instruments Keuangan dan Amendment to PSAK 107 Financial Instruments: Disclosures on Classification and Measurement of Financial Instruments.
- Amendment to PSAK 109 Financial Instruments Keuangan dan Amendment to PSAK 107 Financial Instruments: Disclosures on Contracts Referencing Nature-dependent Electricity.
- Annual Improvement 2024 SAK Indonesia.

Effective for periods beginning on or after January 1, 2027

- PSAK 118 Presentation and Disclosures in Financial Statements.

As of the issuance date of the financial statements, the effects of adopting these standards, amendments and interpretations on the financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

a. Statement of Compliance

The financial statements of the Company have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

b. Basis of Preparation

The measurement basis used in the financial statements is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases as described in the related accounting policies.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran, terlepas dari apakah harga tersebut dapat diamati secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengestimasi nilai wajar dari suatu aset atau liabilitas, Perusahaan memperhitungkan karakteristik aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran. Nilai wajar untuk tujuan pengukuran dan/atau pengungkapan pada laporan keuangan ditentukan atas dasar tersebut kecuali untuk transaksi sewa yang merupakan ruang lingkup PSAK 116, dan pengukuran yang memiliki kemiripan dengan nilai wajar namun bukan merupakan nilai wajar, seperti nilai pakai dalam PSAK 113.

Laporan arus kas sebelumnya disusun menggunakan metode tidak langsung, yang kemudian dilakukan perubahan menjadi metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan yang lebih dapat diandalkan dan relevan. Perubahan metode tidak berdampak material terhadap arus kas operasi, investasi, dan pendanaan.

Direksi memiliki, pada saat persetujuan laporan keuangan, suatu ekspektasi yang memadai bahwa Perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan keberadaan operasinya untuk di masa yang akan datang. Sehingga, mereka melanjutkan penerapan dasar akuntansi kelangsungan usaha dalam penyusunan laporan keuangan.

c. Transaksi dan Penjabaran Laporan Keuangan Dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam mata uang fungsional (Rupiah) dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disajikan ke dalam mata uang fungsional berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date, regardless of whether that price is directly observable or estimated using another valuation technique. In estimating the fair value of an asset or a liability, the Company takes into account the characteristics of the asset or liability if market participants would take those characteristics into account when pricing the asset or liability at the measurement date. Fair value for measurement and/or disclosure purposes in these financial statements is determined on such a basis, except for leasing transactions that are within the scope of PSAK 116, and measurements that have some similarities to fair value but are not fair value, such as net realizable value in PSAK 113.

The statement of cash flows previously prepared using the indirect method, which changed and prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities that is more reliable and relevant. The change method did not have any impact on the operating, investing, and financing cash flows.

The directors have, at the time of approving the financial statements, a reasonable expectation that the Company has adequate resources to continue in operational existence for the foreseeable future. Thus, they continue to adopt the going concern basis of accounting in preparing the financial statements.

c. Transactions and Foreign Currency Translation of Financial Statements

Transactions in foreign currencies are translated into functional currency (Rupiah) using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. In the statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are presented in the functional currency using Bank Indonesia middle rate prevailing at that date. Any resulting gains or losses from foreign exchanges are credited or charged to current operations.

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Perusahaan (entitas pelapor):

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - 1) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - 2) memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - 3) merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - 1) entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - 2) satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - 3) kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - 4) satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - 5) entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor.
 - 6) entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - 7) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

d. Transactions with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Company (reporting entity):

- a) *A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:*
 - 1) *has control or joint control over the reporting entity;*
 - 2) *has significant influence over the reporting entity; or*
 - 3) *is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.*
- b) *An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - 1) *the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).*
 - 2) *one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).*
 - 3) *both entities are joint ventures of the same third party.*
 - 4) *one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.*
 - 5) *the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity.*
 - 6) *the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).*
 - 7) *a person identified in (a) (1) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).*

- 8) entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

- 8) the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

Transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

Transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements.

e. Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui pada laporan posisi keuangan pada saat Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

e. Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are recognized on the statement of financial position when the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan dan liabilitas keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika diperlukan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi diakui langsung pada laba rugi.

Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities are added to or deducted from the fair value of the financial assets and financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Semua pembelian atau penjualan reguler aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya berdasarkan tanggal perdagangan. Pembelian atau penjualan reguler adalah pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan atau konvensi di pasar.

All regular way purchases or sales of financial assets are recognized and derecognized on a trade date basis. Regular way purchases or sales are purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within the time frame established by regulation or convention in the marketplace.

Semua aset keuangan yang diakui selanjutnya diukur secara keseluruhan pada biaya perolehan yang diamortisasi atau nilai wajar, tergantung pada klasifikasi aset keuangan tersebut.

All recognized financial assets are measured subsequently in their entirety at either amortized cost or fair value, depending on the classification of the financial assets.

Klasifikasi aset keuangan

Classification of financial assets

Instrumen utang yang memenuhi persyaratan berikut selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at amortized cost:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

- The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest ("SPPI") on the principal amount outstanding.

Instrumen utang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVTOCI"), jika memenuhi kedua kondisi berikut ini:

- aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan tercapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Seluruh aset keuangan lain selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL").

Meskipun telah disebutkan sebelumnya, Perusahaan dapat menetapkan pilihan tak terbatalakan pada saat pengakuan awal aset keuangan sebagai berikut:

- menyajikan perubahan selanjutnya nilai wajar investasi pada instrumen ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain jika kriteria tertentu dipenuhi; dan
- menetapkan aset keuangan yang memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau FVTOCI sebagai diukur pada FVTPL, jika penetapan itu mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*).

Biaya perolehan diamortisasi dan metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah nilai aset keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, disesuaikan dengan penyisihan kerugiannya. Di sisi lain, jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan, sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

Debt instruments that meet the following conditions are subsequently measured at fair value through other comprehensive income ("FVTOCI"):

- *the financial asset is held within a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling the financial assets; and*
- *the contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

By default, all other financial assets are subsequently measured at fair value through profit or loss ("FVTPL").

Despite the foregoing, the Company may make the following irrevocable election/designation at initial recognition of a financial asset:

- *irrevocably elect to present subsequent changes in fair value of an equity investment in other comprehensive income if certain criteria are met; and*
- *irrevocably designate a debt investment that meets the amortized cost or FVTOCI criteria as measured at FVTPL if doing so eliminates or significantly reduces an accounting mismatch.*

Amortized cost and effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period.

The amortized cost of a financial asset is the amount at which the financial asset is measured at initial recognition minus the principal repayments, plus the cumulative amortization using the effective interest method of any difference between that initial amount and the maturity amount, adjusted for any loss allowance. On the other hand, the gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for any loss allowance.

Pendapatan bunga diakui dalam laba rugi dan dimasukkan dalam pos "Pendapatan pembiayaan konsumen, Pendapatan sewa pembiayaan, Pendapatan anjak piutang, dan Pendapatan pembiayaan diler".

Interest income is recognized in profit or loss and is included in the "Consumer financing income, Lease income on finance lease, Factoring income, and Dealer financing income" line item.

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing

Foreign exchange gains and losses

Jumlah tercatat aset keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang tersebut dan dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada setiap tanggal pelaporan.

The carrying amount of financial assets that are denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the Bank Indonesia middle rate at the end of each reporting period.

Untuk aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan, selisih kurs diakui dalam laba rugi pada pos "Pendapatan lain-lain" pada saat mengalami keuntungan dan diakui pada pos "Beban lain-lain" pada saat mengalami kerugian.

For financial assets measured at amortized cost that are not part of a designated hedging relationship, exchange differences are recognized in profit or loss in the "Other income" line item when the Company incurred gains and recognized in "Other expenses" when the Company incurred losses.

Penurunan nilai aset keuangan

Impairment of financial assets

Perusahaan mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian ("KKE") atas piutang sewa pembiayaan, piutang pembiayaan konsumen dan piutang pembiayaan diler. Nilai kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal masing-masing instrumen keuangan.

The Company recognizes a loss allowance for expected credit losses ("ECL") on finance lease receivables, consumer finance receivables, and dealer financing receivables. The amount of expected credit losses is updated at each reporting date to reflect changes in credit risk since initial recognition of the respective financial instrument.

Perusahaan mengakui KKE 12 bulan dan/atau sepanjang umurnya untuk sewa pembiayaan, pembiayaan konsumen, dan piutang pembiayaan diler. Kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan diestimasi menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Perusahaan, disesuaikan untuk faktor spesifik debitur, kondisi ekonomi umum serta penilaian atas arah kondisi kini dan perkiraan masa depan pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu atas uang jika tepat.

The Company recognizes 12 months and/or lifetime ECL for finance lease receivables, consumer finance receivables, and dealer financing receivables. The expected credit losses on these financial assets are estimated using a provision matrix based on the Company's historical credit loss experience, adjusted for factors that are specific to the debtors, general economic conditions and an assessment of both the current as well as the forecast direction of conditions at the reporting date, including time value of money where appropriate.

Kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur merupakan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur instrumen keuangan. Sebaliknya, KKE 12 bulan mewakili porsi KKE sepanjang umur yang timbul dari peristiwa gagal bayar pada instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Lifetime ECL represents the expected credit losses that will result from all possible default events over the expected life of a financial instrument. In contrast, 12-month ECL represents the portion of lifetime ECL that is expected to result from default events on a financial instrument that are possible within 12 months after the reporting date.

Peningkatan risiko kredit secara signifikan

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Perusahaan membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan mempertimbangkan baik informasi kuantitatif maupun kualitatif yang wajar dan mendukung, termasuk pengalaman historis dan informasi bersifat perkiraan masa depan, yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Informasi masa depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri di mana debitur Perusahaan beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analisis keuangan, badan pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan berbagai sumber eksternal aktual dan prakiraan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Perusahaan.

Secara khusus, informasi berikut diperhitungkan ketika menilai apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal:

- memburuknya kondisi usaha, keuangan atau ekonomi yang terjadi saat ini atau prakiraan yang akan menyebabkan penurunan signifikan atas kemampuan peminjam untuk menyelesaikan kewajiban utangnya;
- terdapat penurunan yang signifikan terhadap hasil operasi debitur, baik secara aktual atau yang diperkirakan akan terjadi; dan
- aset keuangan yang telah mengajukan program restrukturisasi.

Terlepas dari hasil penilaian di atas, Perusahaan membuat praduga risiko kredit aset keuangan telah meningkat signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari, kecuali jika Perusahaan memiliki informasi yang wajar dan didukung yang menunjukkan hal sebaliknya.

Significant increase in credit risk

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Company compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition. In making this assessment, the Company considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort. Forward-looking information considered includes the future prospects of the industries in which the Company's debtors operate, obtained from economic expert reports, financial analysts, governmental bodies, relevant think-tanks and other similar organizations, as well as consideration of various external sources of actual and forecast economic information that relate to the Company's core operations.

In particular, the following information is taken into account when assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition:

- *existing or forecast adverse changes in business, financial or economic conditions that are expected to cause a significant decrease in the debtor's ability to meet its debt obligations;*
- *an actual or expected significant deterioration in the operating results of the debtor; and*
- *financial assets that has been proposed restructured program.*

Irrespective of the outcome of the above assessment, the Company presumes that the credit risk on a financial asset has increased significantly since initial recognition when contractual payments are more than 30 days past due, unless the Company has reasonable and supportable information that demonstrates otherwise.

Meskipun demikian, Perusahaan mengasumsikan bahwa risiko kredit pada instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika instrumen keuangan tersebut ditetapkan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan. Instrumen keuangan bertekad memiliki risiko kredit rendah jika:

1. instrumen keuangan memiliki risiko gagal bayar yang rendah;
2. debitur memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam waktu dekat; dan
3. memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka panjang dapat, tetapi tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

Perusahaan menganggap aset keuangan memiliki risiko kredit rendah ketika aset memiliki peringkat kredit eksternal 'investment grade' sesuai dengan definisi yang dipahami secara global atau jika peringkat eksternal tidak tersedia, aset tersebut memiliki peringkat internal 'performing'. *Performing* berarti bahwa rekanan memiliki posisi keuangan yang kuat dan tidak ada jumlah yang tertunggak.

Perusahaan secara teratur memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan dan merevisinya jika perlu untuk memastikan bahwa kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlahnya jatuh tempo.

Definisi gagal bayar

Perusahaan menganggap hal-hal berikut ini merupakan peristiwa gagal bayar untuk tujuan manajemen risiko kredit internal karena pengalaman historis menunjukkan bahwa aset keuangan yang memenuhi salah satu kriteria berikut umumnya tidak dapat dipulihkan:

- ketika terdapat pelanggaran persyaratan keuangan oleh debitur; atau
- Informasi yang dikembangkan secara internal atau diperoleh dari sumber eksternal menunjukkan bahwa debitur kemungkinan tidak akan membayar kreditornya, termasuk Perusahaan, secara penuh (tanpa memperhitungkan jaminan yang dimiliki oleh Perusahaan).

Despite the foregoing, the Company assumes that the credit risk on a financial instrument has not increased significantly since initial recognition if the financial instrument is determined to have low credit risk at the reporting date. A financial instrument is determined to have low credit risk if:

1. *the financial instrument has a low risk of default;*
2. *the debtor has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term; and*
3. *adverse changes in economic and business conditions in the longer term may, but will not necessarily, reduce the ability of the borrower to fulfil its contractual cash flow obligations.*

The Company considers a financial asset to have low credit risk when the asset has external credit rating of 'investment grade' in accordance with the globally understood definition or if an external rating is not available, the asset has an internal rating of 'performing'. Performing means that the counterparty has a strong financial position and there is no past due amounts.

The Company regularly monitors the effectiveness of the criteria used to identify whether there has been a significant increase in credit risk and revises them as appropriate to ensure that the criteria are capable of identifying significant increase in credit risk before the amount becomes past due.

Definition of default

The Company considers the following as constituting an event of default for internal credit risk management purposes as historical experience indicates that financial assets that meet either of the following criteria are generally not recoverable:

- *when there is a breach of financial covenants by the debtor; or.*
- *Information developed internally or obtained from external sources indicates that the debtor is unlikely to pay its creditors, including the Company, in full (without taking into account any collateral held by the Company).*

Perusahaan menganggap bahwa gagal bayar telah terjadi ketika aset keuangan tertunggak lebih dari 90 hari kecuali jika Perusahaan memiliki informasi yang wajar dan didukung untuk menunjukkan bahwa kriteria yang lebih panjang lebih tepat.

Aset keuangan memburuk

Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak buruk pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut telah terjadi. Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai termasuk data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau peminjam;
- pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau tunggakan;
- pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- hilangnya pasar aktif untuk aset keuangan itu akibat kesulitan keuangan; atau
- pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Kebijakan penghapusan

Perusahaan menghapuskan aset keuangan ketika ada informasi yang menunjukkan bahwa pihak lawan berada dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis, contoh ketika pihak lawan dalam proses likuidasi atau telah memasuki proses kebangkrutan, atau ketika jumlahnya sudah lebih 180 hari tertunggak, mana yang terjadi lebih dulu. Aset keuangan yang dihapuskan dapat menjadi subjek aktivitas paksaan dalam prosedur pemulihan Perusahaan, dengan mempertimbangkan nasihat hukum yang sesuai. Setiap pemulihan yang terjadi diakui dalam laba rugi.

The Company considers that default has occurred when a financial asset is more than 90 days past due unless the Company has reasonable and supportable information to demonstrate that a more lagging default criterion is more appropriate.

Credit-impaired financial assets

A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of that financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- *significant financial difficulty of the issuer or the borrower;*
- *a breach of contract, such as a default or past due event;*
- *the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider;*
- *it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;*
- *the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or*
- *the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.*

Write-off policy

The Company writes off a financial asset when there is information indicating that the counterparty is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery, e.g. when the counterparty has been placed under liquidation or has entered into bankruptcy proceedings, when the amounts are over 180 days past due, whichever occurs sooner. Financial assets written off may still be subject to enforcement activities under the Company's recovery procedures, taking into account legal advice where appropriate. Any recoveries made are recognized in profit or loss.

Pengukuran dan pengakuan atas kerugian kredit ekspektasian

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian merupakan fungsi dari *probability of default*, *loss given default* (yaitu besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar) dan eksposur pada gagal bayar. Penilaian *probability of default* dan *loss given default* berdasarkan data historis yang disesuaikan dengan informasi masa depan seperti dijelaskan di atas. Adapun eksposur atas gagal bayar, untuk aset keuangan, diwakili oleh nilai tercatat bruto aset pada tanggal pelaporan.

Untuk aset keuangan, kerugian kredit ekspektasian diestimasi sebagai selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada Perusahaan sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diekspektasi akan diterima oleh Perusahaan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal. Untuk piutang sewa, arus kas yang digunakan untuk menentukan kerugian kredit ekspektasian konsisten dengan arus kas yang digunakan dalam mengukur piutang sewa berdasarkan PSAK 116.

Apabila kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur diukur secara kolektif untuk kasus dimana bukti kenaikan signifikan risiko kredit pada level instrumen individual tidak tersedia, instrumen keuangan dikelompokkan dengan dasar sebagai berikut:

- Status jatuh tempo; dan
- Jenis jaminan untuk piutang sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen.

Pengelompokan ditelaah secara teratur oleh manajemen untuk memastikan setiap kelompok mempunyai karakteristik risiko yang sama.

Jika Perusahaan telah mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan sebesar KKE sepanjang umurnya pada periode pelaporan sebelumnya, tetapi menentukan pada tanggal pelaporan ini bahwa kondisi untuk KKE sepanjang umurnya tidak lagi terpenuhi, Perusahaan mengukur cadangan kerugian sejumlah KKE 12 bulan pada tanggal pelaporan ini.

Perusahaan mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan penyesuaian terkait ke jumlah tercatat melalui akun kerugian kredit ekspektasian.

Measurement and recognition of expected credit losses

The measurement of expected credit losses is a function of the probability of default, loss given default (i.e. the magnitude of the loss if there is a default) and the exposure at default. The assessment of the probability of default and loss given default is based on historical data adjusted by forward-looking information as described above. As for the exposure at default, for financial assets, this is represented by the assets' gross carrying amount at the reporting date.

For financial assets, the expected credit loss is estimated as the difference between all contractual cash flows that are due to the Company in accordance with the contract and all the cash flows that the Company expects to receive, discounted at the original effective interest rate. For a lease receivable, the cash flows used for determining the expected credit losses is consistent with the cash flows used in measuring the lease receivable in accordance with PSAK 116.

Where lifetime ECL is measured on a collective basis to cater for cases where evidence of significant increases in credit risk at the individual instrument level may not yet be available, the financial instruments are categorized on the following basis:

- Past-due status; and
- Classification of collaterals for finance lease receivables and consumer financing receivables.

The Companying is regularly reviewed by management to ensure the constituents of each Company continue to share similar credit risk characteristics.

If the Company has measured the loss allowance for a financial instrument at an amount equal to lifetime ECL in the previous reporting period, but determines at the current reporting date that the conditions for lifetime ECL are no longer met, the Company measures the loss allowance at an amount equal to 12-month ECL at the current reporting date.

The Company recognizes an impairment gain or loss in profit or loss for all financial instruments with a corresponding adjustment to their carrying amount through a expected credit losses account.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Perusahaan mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Perusahaan tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Perusahaan mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perusahaan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Perusahaan masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Perusahaan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan Perusahaan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan tersebut, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dimana beban bunga diakui berdasarkan tingkat pengembalian yang efektif, kecuali untuk liabilitas jangka pendek dimana pengakuan bunganya tidak material.

Derecognition of financial assets

The Company derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Company recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Company retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Company continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss.

Financial Liabilities and Equity Instruments

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Company are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Financial liabilities

The Company financial liabilities was classified at amortized cost.

Financial liabilities at amortized cost

At initial recognition, financial liabilities measured at amortized cost are recognized at fair value net of transaction costs which are directly attributable to the issuance of such, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method, where interest expense is recognized based on the rate of effective return, except for short-term liabilities when the recognition of interest would be immaterial.

Metode suku bunga efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

Keuntungan dan kerugian kurs mata uang asing

Untuk liabilitas keuangan dalam mata uang asing dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan, keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing ditentukan berdasarkan biaya perolehan diamortisasi dari instrumen. Keuntungan atau kerugian kurs mata uang asing diakui dalam laba rugi untuk liabilitas keuangan yang tidak merupakan bagian dari hubungan lindung nilai ditetapkan.

Nilai wajar liabilitas keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang asing tersebut dan dijabarkan pada kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Perusahaan telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Effective interest method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Foreign exchange gains and losses

For financial liabilities that are denominated in a foreign currency and are measured at amortized cost as at each reporting date, the foreign exchange gains and losses are determined based on the amortized cost of the instruments. These foreign exchange gains and losses are recognized in profit or loss for financial liabilities that are not part of a designated hedging relationship

The fair value of financial liabilities denominated in a foreign currency is determined in that foreign currency and translated at the spot rate at the end of the reporting period.

Derecognition of financial liabilities

The Company derecognizes financial liabilities when, and only when, the Company's obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

f. Saling apus antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Perusahaan tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini dan tidak bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dapat dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

g. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

h. Piutang Pembiayaan Konsumen

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengukuran awal, reklasifikasi, penurunan nilai dan penghentian pengakuan piutang pembiayaan konsumen mengacu pada Catatan 3e.

Piutang pembiayaan konsumen dicatat pada biaya perolehan diamortisasi yang telah memperhitungkan biaya transaksi dan pendapatan transaksi yang belum diamortisasi dan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen.

Pendapatan administrasi yang diperoleh dari konsumen pada saat perjanjian pembiayaan pertama kali ditandatangani, dibukukan sebagai pendapatan pada laba rugi tahun berjalan.

i. Piutang Sewa Pembiayaan

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengukuran awal, reklasifikasi, penurunan nilai dan penghentian pengakuan piutang pembiayaan konsumen mengacu pada Catatan 3e.

Piutang sewa pembiayaan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi yang telah memperhitungkan biaya transaksi, deposit, dan pendapatan transaksi yang belum diamortisasi dan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen.

f. Netting of Financial Assets and Financial Liabilities

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when the Company has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

g. Cash and Cash Equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and time deposits with maturities of three months or less from the date of placement.

h. Consumer Financing Receivables

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, impairment and derecognition of consumer financing receivables are discussed in Note 3e.

Consumer financing receivables are stated at amortized cost net of unamortized transaction cost and transaction fee and allowance for impairment losses on consumer financing receivables.

Administration income earned from customers at the time the consumer financing is signed is recorded as income in the current year.

i. Finance Lease Receivables

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, impairment and derecognition of consumer financing receivables are discussed in Note 3e.

Finance Lease receivables are stated at amortized cost net of unamortized transaction cost and transaction fee, deposit and allowance for impairment losses on consumer financing receivables.

j. Aset Tetap

Aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui dengan menggunakan metode garis lurus setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>	
Inventaris kantor	4 - 8	Office equipment
Kendaraan	8	Vehicles
Instalasi & partisi	4	Furniture & fixture

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

k. Sewa

Perusahaan sebagai penyewa

Perusahaan menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal inisiasi kontrak. Perusahaan mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Perusahaan merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Perusahaan mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

j. Fixed Assets

Fixed assets are stated at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets less residual values using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

An item of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of fixed asset is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in profit or loss.

k. Lease

The Company as lessee

The Company assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Company recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Company recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Perusahaan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Perusahaan mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;
- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau
- kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Company uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives.

The lease liability is presented as a separate line in the statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

The Company remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- *the lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;*
- *the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used); or*
- *a lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.*

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Jika Perusahaan dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 237. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Aset hak-guna disusutkan selama periode yang lebih singkat antara masa sewa dan masa manfaat aset pendasar. Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perusahaan akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan.

Perusahaan menerapkan PSAK 236 untuk menentukan apakah aset hak-guna mengalami penurunan nilai dan mencatat kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan aset penurunan nilai.

Perusahaan sebagai penyewa

Sewa dimana Perusahaan sebagai penyewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Ketika persyaratan sewa secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Dalam sewa pembiayaan, jumlah terutang oleh penyewa diakui sebagai piutang sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto Perusahaan. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan dialokasikan pada periode akuntansi yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi bersih penyewa.

I. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Perusahaan menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Perusahaan mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Whenever the Company incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under PSAK 237. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Right-of-use assets are depreciated over the shorter period of lease term and useful life of the underlying assets. If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Company expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

The right-of-use assets are presented as a separate line in the statement of financial position.

The Company applies PSAK 236 to determine whether a right-of-use asset is impaired and accounts for any identified impairment loss as described in the impairment of assets policy.

The Company as lessor

Leases for which the Company is a lessor are classified as finance leases. Whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as a finance lease.

Amounts due from lessees under finance leases are recognized as receivables at the amount of the Company's net investment in the leases. Finance lease income is allocated to accounting periods so as to reflect a constant periodic rate of return on the Company's net investment outstanding in respect of the leases.

I. Impairment of Non Financial Asset

At the end of each reporting period, the Company reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi kecuali aset relevan tersebut disajikan pada jumlah revaluasian, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Ketika penurunan nilai selanjutnya dibalik, jumlah tercatat aset (atau unit penghasil kas) ditingkatkan ke estimasi yang direvisi dari jumlah terpulihkannya, namun kenaikan jumlah tercatat tidak boleh melebihi jumlah tercatat ketika kerugian penurunan nilai tidak diakui untuk aset (atau unit penghasil kas) pada tahun-tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang bersangkutan disajikan pada jumlah revaluasian, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi (lihat Catatan 3e di atas).

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3e.

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan pembiayaan konsumen, pendapatan sewa pembiayaan, pendapatan anjak piutang, pendapatan pembiayaan diler, pendapatan lain-lain dan beban bunga diakui secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif (Catatan 3e).

Pendapatan sewa pembiayaan dialokasikan berdasarkan metode yang dijelaskan pada Catatan 3k.

Beban provisi sehubungan dengan pinjaman yang diterima diamortisasi dengan metode suku bunga efektif dan dibukukan sebagai bagian dari beban bunga dan beban pembiayaan lainnya.

Pendapatan dan beban lainnya

Pendapatan jasa administrasi yang tidak beratribusi secara langsung atas transaksi sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen dibukukan sebagai pendapatan pada laba rugi dan diakui pada saat diterima.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss unless the relevant asset is carried at revaluation amount, in which the impairment loss is treated as revaluation decrease.

When an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (or a cash-generating unit) is increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for the asset (or cash-generating unit) in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase (see Note 3e above).

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3e.

m. Income and Expenses Recognition

Consumer financing income, finance lease income, factoring income, dealer financing income, other income and interest cost are recognized under the accrual basis accounting using the effective interest method (Note 3e).

Finance lease income is allocated based on method described in Note 3k.

Loan fees related to the borrowings are amortized using the effective interest method and recorded as part of interest expense and other financial charges.

Income and Other expenses

Administrative income that are not directly attributable to finance lease and consumer financing are recorded as income in profit or loss and recognized when incurred.

Pendapatan denda keterlambatan dan keuntungan penghentian kontrak diakui pada saat diterima.

Income from late charges and early termination are recognized when received.

Beban lainnya diakui pada saat terjadinya.

Other expenses are recognized when incurred.

n. Pajak Penghasilan

n. Income Tax

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini terutang dan pajak tangguhan.

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan di laba rugi karena tidak memperhitungkan penghasilan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan tidak memperhitungkan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from net profit as reported in profit or loss because it excludes items of income or expense that are taxable or deductible in other years and it further excludes items that are never taxable or deductible.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year calculated using prevailing tax rates.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arise from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi, atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam hal kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

In the application of the Company's accounting policies, which are described in Note 3, the management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Peningkatan risiko kredit yang signifikan

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai cadangan yang setara dengan KKE 12 bulan untuk aset tahap 1, atau KKE sepanjang umur untuk aset tahap 2 atau tahap 3. Suatu aset bergerak ke tahap 2 ketika risiko kreditnya telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. PSAK 109 tidak menjelaskan apa yang merupakan peningkatan risiko kredit yang signifikan. Dalam menilai apakah risiko kredit suatu aset telah meningkat secara signifikan, Perusahaan mempertimbangkan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung secara kualitatif dan kuantitatif.

Sumber Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini.

Perhitungan Cadangan Kerugian

KKE kolektif atas piutang pembiayaan

KKE kolektif atas piutang pembiayaan dihitung dengan mempertimbangkan *probability of default* ("PD"), *loss given default* ("LGD"), *exposure at default* ("EAD"). Saat mengukur KKE, Perusahaan menggunakan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana penggerak ini akan saling mempengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar. Perhitungan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual terutang dan yang diharapkan akan diterima, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan.

Probability of default merupakan input utama dalam mengukur KKE. *Probability of default* adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Significant increase in credit risk

As explained in Note 3, expected credit losses are measured as an allowance equal to 12-month ECL for stage 1 assets, or lifetime ECL for stage 2 or stage 3 assets. An asset moves to stage 2 when its credit risk has increased significantly since initial recognition. PSAK 109 does not define what constitutes a significant increase in credit risk. In assessing whether the credit risk of an asset has significantly increased the Company takes into account qualitative and quantitative reasonable and supportable forward-looking information.

Key Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are discussed below.

Calculation of Loss Allowance

Collective ECL on financing receivables

Collective ECL on financing receivables is calculated by considering the probability of default ("PD"), loss given default ("LGD") and exposure at default ("EAD"). When measuring ECL the Company uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. *Probability of default* is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED (Continued)

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2025 Rp	2024 Rp	
Kas di bank			Cash in banks
Pihak berelasi			Related parties
PT Bank Shinhan Indonesia	30.570.180.450	14.919.844.776	PT Bank Shinhan Indonesia
PT Bank Sinarmas Tbk	5.419.497	5.900.231	PT Bank Sinarmas Tbk
	<u>30.575.599.947</u>	<u>14.925.745.007</u>	
Pihak ketiga			Third parties
PT Bank Central Asia Tbk	72.863.372	9.522.500	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	3.374.911	20.015.620	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Standard Chartered Bank	90.159.603.655	-	Standard Chartered Bank
	<u>90.235.841.938</u>	<u>29.538.120</u>	
	<u>120.811.441.885</u>	<u>14.955.283.127</u>	
Deposito berjangka			Time deposits
Pihak berelasi			Related party
PT Bank Shinhan Indonesia	340.000.000.000	170.000.000.000	PT Bank Shinhan Indonesia
Pihak ketiga			Third party
Standard Chartered Bank	330.000.000.000	-	Standard Chartered Bank
	<u>670.000.000.000</u>	<u>170.000.000.000</u>	
Jumlah	<u>790.811.441.885</u>	<u>184.955.283.127</u>	Total

Suku bunga untuk rekening bank per tahun berkisar antara 0,00% dan 3,75% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

The annual interest rate for bank accounts ranges between 0.00% and 3.75% for the year ended December 31, 2025 and 2024.

Suku bunga untuk deposito berjangka per tahun berkisar antara 4,50% dan 5,00% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (2024: 6,10% dan 6,25%). Jangka waktu deposito berjangka berkisar antara 1 bulan sampai dengan 3 bulan.

The annual interest rate for time deposits ranges between 4.50% and 5.00% for the year ended December 31, 2025 (2024: 6.10% and 6.25%). The time deposits have terms of 1 month to 3 months.

6. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

6. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES

	2025 Rp	2024 Rp	
Piutang pembiayaan konsumen	142.913.436.282	-	Consumer financing receivables
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(21.878.547.070)	-	Unearned consumer financing income
Subjumlah	121.034.889.212	-	Subtotal
Kerugian kredit ekspektasian	(678.479.758)	-	Expected credit losses
Bersih	<u>120.356.409.454</u>	<u>-</u>	Net
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun	6,99%	-	Average effective annual interest rate

Jangka waktu kontak pembiayaan konsumen yang disalurkan atas kendaraan berkisar antara 12 sampai 72 bulan.

The tenor of consumer financing contracts disbursed for vehicles ranges from 12 to 72 months.

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED (Continued)

Tidak terdapat piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2025.

There are no consumer financing receivables that are pledged as collateral as of December 31, 2025.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat konsentrasi signifikan pada piutang pembiayaan konsumen dari pihak ketiga.

Management believes that there is no significant concentration of risk on consumer financing receivables from third parties.

Piutang pembiayaan konsumen dijamin dengan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari kendaraan bermotor yang dibiayai Perusahaan.

Consumer financing receivables are secured by the Motor Vehicle Ownership Certificate (BPKB) of the motor vehicles financed by the Company.

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan kerugian kredit ekspektasian terkait:

An analysis of changes in the gross carrying amount and the corresponding expected credit loss:

2025				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Piutang pembiayaan konsumen				Consumer financing receivable
Saldo awal tahun	-	-	-	-
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya tidak mengalami penurunan nilai (tahap 2)	-	-	-	-
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya mengalami penurunan nilai (tahap 3)	-	-	-	-
Total saldo awal setelah pengalihan	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan	131.810.577.327	231.793.292	-	132.042.370.619
Aset keuangan yang dilunasi	(10.986.749.358)	(20.732.049)	-	(11.007.481.407)
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Total perubahan tahun berjalan	120.823.827.969	211.061.243	-	121.034.889.212
Saldo akhir tahun	120.823.827.969	211.061.243	-	121.034.889.212
2025				
	Tahap 1/ Stage 1	Tahap 2/ Stage 2	Tahap 3/ Stage 3	Jumlah/ Total
	Rp	Rp	Rp	Rp
Kerugian kredit ekspektasian				Expected credit loss
Piutang pembiayaan konsumen				Consumer financing receivable
Saldo awal tahun	-	-	-	-
Transfer ke kerugian ekspektasian 12 bulan (stage 1)	-	-	-	-
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian yang diberikan sepanjang umurnya - tidak mengalami penurunan nilai (tahap 2)	-	-	-	-
Total saldo awal setelah pengalihan	-	-	-	-
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
Aset keuangan baru yang diterbitkan	578.006.620	100.473.138	-	678.479.758
Aset keuangan yang dilunasi	-	-	-	-
Total perubahan tahun berjalan	578.006.620	100.473.138	-	678.479.758
Penyesuaian kurs				
Saldo akhir tahun	578.006.620	100.473.138	-	678.479.758

Manajemen berpendapat bahwa jumlah kerugian kredit ekspektasian piutang pembiayaan konsumen adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen.

Management believes that the amount of expected credit losses on consumer financing receivables is sufficient to cover potential losses that may arise from uncollectible consumer financing receivables.

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED (Continued)

7. PIUTANG SEWA PEMBIAYAAN

7. FINANCE LEASE RECEIVABLES

	2025 Rp	2024 Rp	
Piutang sewa pembiayaan	5.178.822.489	209.280.855	<i>Finance lease receivable</i>
Nilai residu yang dijamin	2.578.595.970	27.033.104	<i>Guaranteed residual value</i>
Pendapatan sewa pembiayaan yang ditangguhkan	(660.123.768)	-	<i>Unearned lease income</i>
Simpanan jaminan	(2.578.595.970)	(27.033.104)	<i>Security deposits</i>
Jumlah	4.518.698.721	209.280.855	<i>Total</i>
Kerugian kredit ekspektasian	(20.473.495)	-	<i>Expected credit loss</i>
Bersih	4.498.225.226	209.280.855	<i>Net</i>
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun	6,74%	2,05%	<i>Average effective annual interest rate</i>
Jangka waktu kontrak sewa pembiayaan yang disalurkan atas kendaraan berkisar antara 12 sampai 60 bulan.			
<i>The tenor of finance lease contracts disbursed for vehicles ranges from 12 to 60 months.</i>			
Pada saat perjanjian sewa pembiayaan dimulai, lessee memberikan simpanan jaminan yang akan digunakan sebagai pembayaran atas pembelian dari aset sewa pembiayaan pada akhir masa sewa, bila hak opsi dilaksanakan lessee. Apabila hak opsi tidak dilaksanakan, simpanan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada lessee sepanjang memenuhi ketentuan dalam perjanjian sewa pembiayaan.			
<i>At the time of execution of the finance lease contract, the lessees pay security deposits which will be used as payment of purchased leased assets at the end of the lease period, if the right option is exercised. If the option is not exercised, such security deposits will be returned to the lessees as long as it meets the conditions in the finance lease contract.</i>			
Tidak terdapat piutang sewa pembiayaan yang dijamin pada tanggal 31 Desember 2025.			
<i>There is no finance lease receivable that are pledged as collateral as of December 31, 2025.</i>			
Perusahaan memberikan sewa pembiayaan untuk kendaraan mobil.			
<i>The Company provides lease financing for automobiles.</i>			
Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan kerugian kredit ekspektasian terkait:			
<i>An analysis of changes in the gross carrying amount and the corresponding expected credit loss:</i>			

	2025			
	Tahap 1/ Stage 1 Rp	Tahap 2/ Stage 2 Rp	Tahap 3/ Stage 3 Rp	Jumlah/ Total Rp
Piutang sewa pembiayaan				Finance lease receivable
Saldo awal tahun	209.280.855	-	-	209.280.855
				<i>Balance at beginning of the year</i>
Aset keuangan baru yang diterbitkan	4.686.833.000	-	-	4.686.833.000
				<i>New financial assets issued</i>
Aset keuangan yang dilunasi	(377.415.134)	-	-	(377.415.134)
				<i>Financial assets which have been repaid</i>
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-
				<i>Remeasurement of the net carrying value</i>
Total perubahan tahun berjalan	4.309.417.866	-	-	4.309.417.866
				<i>Total movement for the current year</i>
Saldo akhir tahun	4.518.698.721	-	-	4.518.698.721
				<i>Balance at ending of the year</i>

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED (Continued)

	2024				
	Tahap 1/ Stage 1 Rp	Tahap 2/ Stage 2 Rp	Tahap 3/ Stage 3 Rp	Jumlah/ Total Rp	
Piutang sewa pembiayaan					Finance lease receivable
Saldo awal tahun	-	-	-	-	Balance at beginning of the year
Aset keuangan baru yang diterbitkan	228.320.000	-	-	228.320.000	New financial assets issued
Aset keuangan yang dilunasi	(19.039.145)	-	-	(19.039.145)	Financial assets which have been repaid
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-	Remeasurement of the net carrying value
Total perubahan tahun berjalan	209.280.855	-	-	209.280.855	Total movement for the current year
Saldo akhir tahun	209.280.855	-	-	209.280.855	Balance at ending of the year
	2025				
	Tahap 1/ Stage 1 Rp	Tahap 2/ Stage 2 Rp	Tahap 3/ Stage 3 Rp	Jumlah/ Total Rp	
Kerugian kredit ekspektasian					Expected credit loss
Piutang sewa pembiayaan					Finance lease receivable
Saldo awal tahun	-	-	-	-	Balance at beginning of the year
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-	Remeasurement of the net carrying value
Aset keuangan baru yang diterbitkan	(20.473.495)	-	-	(20.473.495)	New financial assets issued
Aset keuangan yang dilunasi	-	-	-	-	Financial assets which have been repaid
Total perubahan tahun berjalan	(20.473.495)	-	-	(20.473.495)	Total movement for the current year
Saldo akhir tahun	(20.473.495)	-	-	(20.473.495)	Balance at ending of the year

Manajemen berpendapat bahwa jumlah kerugian kredit ekspektasian investasi sewa neto adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang sewa pembiayaan.

Based on management's evaluation, the expected credit losses on net investments in finance lease is adequate to cover the possible losses which might arise from uncollectible finance lease receivables.

8. PIUTANG PEMBIAYAAN DILER

8. DEALER FINANCING RECEIVABLES

	31 Desember/ December 31, 2025 Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp	
Piutang pembiayaan diler	4.904.259.560	-	Dealer financing receivables
Kerugian kredit ekspektasian	(1.226.064.895)	-	Expected credit loss
Bersih	3.678.194.665	-	Net
Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun	8,00%	-	Average effective annual interest rate

Jangka waktu piutang pembiayaan diler berkisar antara 1 sampai 3 bulan.

The tenor of dealer financing receivables ranges from 1 to 3 months.

Tidak terdapat piutang pembiayaan diler yang dijaminkan pada tanggal 31 Desember 2025.

There are no dealer financing receivable that are pledged as collateral as of December 31, 2025.

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED (Continued)

Analisis atas perubahan dalam nilai tercatat bruto dan kerugian kredit ekspektasian terkait:

An analysis of changes in the gross carrying amount and the corresponding expected credit loss:

	2025				
	Tahap 1/ Stage 1 Rp	Tahap 2/ Stage 2 Rp	Tahap 3/ Stage 3 Rp	Jumlah/ Total Rp	
Piutang pembiayaan diler					Dealer financing receivable
Saldo awal tahun	-	-	-	-	Balance at beginning of the year
Aset keuangan baru yang diterbitkan	4.904.259.560	-	-	4.904.259.560	New financial assets issued
Aset keuangan yang dilunasi	-	-	-	-	Financial assets which have been repaid
Pengukuran kembali bersih nilai tercatat	-	-	-	-	Remeasurement of the net carrying value
Total perubahan tahun berjalan	4.904.259.560	-	-	4.904.259.560	Total movement for the current year
Saldo akhir tahun	4.904.259.560	-	-	4.904.259.560	Balance at ending of the year

	2025				
	Tahap 1/ Stage 1 Rp	Tahap 2/ Stage 2 Rp	Tahap 3/ Stage 3 Rp	Jumlah/ Total Rp	
Kerugian kredit ekspektasian					Expected credit loss
Piutang pembiayaan diler					Dealer financing receivable
Saldo awal tahun	-	-	-	-	Balance at beginning of the year
Aset keuangan baru yang diterbitkan	(1.226.064.895)	-	-	(1.226.064.895)	New financial assets issued
Aset keuangan yang dilunasi	-	-	-	-	Financial assets which have been repaid
Total perubahan tahun berjalan	(1.226.064.895)	-	-	(1.226.064.895)	Total movement for the current year
Saldo akhir tahun	(1.226.064.895)	-	-	(1.226.064.895)	Balance at ending of the year

9. TAGIHAN ANJAK PIUTANG

Tagihan anjak piutang tanggal 31 Desember 2025 adalah Rp 135.632.800.000 (2024: Rp 151.924.000.000). Suku bunga tagihan anjak piutang berkisar antara 7,00% dan 8,00% per tahun untuk tahun 2025 dan 2024.

Seluruh tagihan anjak piutang Perusahaan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

Seluruh tagihan anjak piutang menggunakan syarat *with recourse*.

Perubahan dalam kerugian kredit ekspektasian adalah sebagai berikut:

	2025 Rp	2024 Rp	
Saldo awal tahun	76.000.000	4.081.131.837	Balance at the beginning of the year
Pemulihan	(76.000.000)	(4.081.131.837)	Recovery
Penambahan	367.200.000	76.000.000	Additions
Saldo akhir tahun	367.200.000	76.000.000	Balance at the end of the year

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko terkonsentrasi secara signifikan atas tagihan anjak piutang dari pihak ketiga.

9. FACTORING RECEIVABLES

As of December 31, 2025, the factoring receivables amounted to Rp 135,632,800,000 (2024: Rp 154,924,000,000). Interest rate of factoring receivables ranged between 7.00% and 8.00% per annum for 2025 and 2024.

All Company's factoring receivables are overdue less than 1 year.

All transactions involving factoring receivables were carried out on a with recourse basis.

The movements in expected credit loss is as follows:

Management believes that there is no risk of significant concentrations of factoring receivables from third parties.

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED (Continued)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah kerugian kredit ekspektasian tagihan anjak piutang adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya tagihan anjak piutang.

Based on management's evaluation of the expected credit losses on factoring receivables is adequate to cover the possible losses which might arise from uncollectible factoring receivables.

Pada tanggal 12 Februari 2026, saldo piutang atas tagihan anjak piutang tersebut telah dilunasi seluruhnya.

On February 12, 2026, the outstanding balance of the factoring receivable had been fully repaid.

10. ASET TETAP DAN ASET HAK-GUNA

10. FIXED ASSETS AND RIGHT-OF-USE ASSETS

	1 Januari 2025/ January 1, 2025	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclasification	31 Desember 2025/ December 31, 2025	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Kepemilikan langsung					Direct acquisition
Inventaris kantor	1.258.469.000	2.705.272.910	-	3.963.741.910	Office equipment
Instalasi & partisi	2.699.000	2.840.624.218	21.356.794.278	24.200.117.496	Furniture & fixture
Kendaraan	-	1.329.334.293	-	1.329.334.293	Vehicle
Aset hak-guna	-	17.689.499.662	-	17.689.499.662	Right-of-use assets
Aset dalam proses	-	22.243.033.318	(21.356.794.278)	886.239.040	Assets in process
Jumlah	1.261.168.000	46.807.764.401	-	48.068.932.401	Total
Akumulasi penyusutan:					Accumulated depreciation:
Kepemilikan langsung					Direct acquisition
Inventaris kantor	(116.329.508)	(888.612.359)	-	(1.004.941.867)	Office equipment
Instalasi & partisi	(168.688)	(3.912.953.978)	-	(3.913.122.666)	Furniture & fixture
Kendaraan	-	(132.557.633)	-	(132.557.633)	Vehicle
Aset hak-guna	-	(3.155.194.388)	-	(3.155.194.388)	Right-of-use assets
Jumlah	(116.498.196)	(8.089.318.358)	-	(8.205.816.554)	Total
Nilai tercatat	<u>1.144.669.804</u>			<u>39.863.115.847</u>	Net book value
	1 Januari 2024/ January 1, 2024	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Tanah	40.989.022.335	-	(40.989.022.335)	-	Land
Bangunan	6.322.071.860	-	(6.322.071.860)	-	Building
Kepemilikan langsung					Direct acquisition
Inventaris kantor	1.122.911.039	135.557.961	-	1.258.469.000	Office equipment
Instalasi & partisi	1.714.510.240	-	(1.711.811.240)	2.699.000	Furniture & fixture
Kendaraan	2.443.412.542	-	(2.443.412.542)	-	Vehicle
Aset dalam proses	-	-	-	-	Assets in process
Jumlah	52.591.928.016	135.557.961	(51.466.317.977)	1.261.168.000	Total
Akumulasi penyusutan:					Accumulated depreciation:
Kepemilikan langsung					Direct acquisition
Bangunan	(2.464.468.938)	-	2.464.468.938	-	Building
Inventaris kantor	(1.096.535.302)	(119.057.639)	1.099.263.433	(116.329.508)	Office equipment
Instalasi & partisi	(1.714.510.240)	(168.688)	1.714.510.240	(168.688)	Furniture & fixture
Kendaraan	(2.164.917.803)	-	2.164.917.803	-	Vehicle
Jumlah	(7.440.432.283)	(119.226.327)	7.443.160.414	(116.498.196)	Total
Nilai tercatat	<u>45.151.495.733</u>			<u>1.144.669.804</u>	Net book value

Beban penyusutan sebesar Rp 8.089.318.358 untuk tahun 2025 (2024: Rp 119.226.327) (Catatan 20).

Depreciation charged to operations amounting to Rp 8,089,318,358 in 2025 (2024: Rp 119,226,327) (Note 20).

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED (Continued)

Pada tanggal 31 Desember 2025, inventaris kantor cabang diasuransikan kepada Asuransi Oona, pihak ketiga, masing-masing dengan nilai pertanggungan total sebesar Rp 8.643.375.850 (2024: nihil). Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungan.

As of December 31, 2025, branches' office equipment are insured with Asuransi Oona, a third party, each with a sum insured of Rp 8,643,375,850 (2024: nil). Management believes that the insurance coverages are adequate to cover any possible losses that might arise from the assets insured.

11. ASET TAKBERWUJUD

11. INTANGIBLE ASSETS

	1 Januari 2025/ January 1, 2025	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2025/ December 31, 2025	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Nilai perolehan					Acquisition cost
Perangkat lunak	-	137.973.000	57.983.991.161	58.121.964.161	Software
Aset dalam proses - perangkat lunak	30.810.203.400	27.266.227.762	(57.983.991.161)	92.440.001	Assets in progress - software
Jumlah	30.810.203.400	27.404.200.762	-	58.214.404.162	Total
Akumulasi amortisasi					Accumulated amortization
Perangkat lunak	-	(6.126.685.460)	-	(6.126.685.460)	Software
Nilai buku	30.810.203.400			52.087.718.702	Net book value
	1 Januari 2024/ January 1, 2024	Penambahan/ Additions	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Nilai perolehan					Acquisition cost
Aset dalam proses - perangkat lunak	-	30.810.203.400	-	30.810.203.400	Assets in progress - software

Pada tahun 2025, penambahan aset takberwujud melalui transaksi non-kas - bersih sebesar Rp 3.134.463.148 (2024: nihil).

In 2025, the addition of intangible assets through non-cash - net transactions amounting to Rp 3,134,463,148 (2024: nil).

12. UTANG LAIN – LAIN

12. OTHER PAYABLES

	2025	2024	
	Rp	Rp	
Liabilitas sewa	12.045.380.223	-	Lease liabilities
Utang retensi	1.604.862.668	-	Retention payable
Utang bunga	177.766.666	-	Interest payable
Lain - lain	12.036.840	13.889.791	Others
Jumlah	13.840.046.397	13.889.791	Total

Liabilitas sewa yang tercatat merupakan kewajiban Perusahaan sebagai penyewa untuk melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian sewa yang didiskontokan terhadap tingkat suku bunga yang berlaku di pasar. Adapun liabilitas sewa terdiri dari ruang kantor.

The recorded lease liability is the Company's obligation as the lessee to make payments in accordance with the lease agreement, which is discounted against the prevailing market interest rate. The lease liabilities consist of office space.

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED (Continued)

	2025	2024	
	Rp	Rp	
Tahun 1	6.591.601.800	-	Year 1
Tahun 2	5.273.281.440	-	Year 2
Tahun 3	1.318.320.360	-	Year 3
Jumlah	13.183.203.600	-	Total
Bunga yang belum diamortisasi	(1.137.823.377)	-	Unamortized interest
Jumlah	12.045.380.223	-	Total

13. UTANG BANK

Standard Chartered Bank

Pada tanggal 6 Agustus 2025, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek tanpa agunan dari Standard Chartered Bank dengan plafon fasilitas sebesar Rp 300.000.000.000 yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2026. Fasilitas ini digunakan untuk mendukung kebutuhan modal kerja Perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar JIBOR ditambah margin tertentu sesuai dengan perjanjian kredit, dan menggunakan INDONIA (secara majemuk) sesuai dengan perubahan acuan dari bank sentral pada periode tahun 2026.

Pada tanggal 31 Desember 2025, saldo pinjaman yang terutang atas fasilitas tersebut adalah sebesar Rp 100.000.000.000 (2024: nihil).

Biaya bunga dari fasilitas ini sejumlah Rp 438.115.528 pada tahun 2025 (2024: nihil). Biaya bunga yang masih harus dibayar pada 31 Desember 2025 adalah sejumlah Rp 177.766.666 (2024: nihil).

Perjanjian kredit berisi beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2025, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman yang ditetapkan Lender.

Pada tanggal 19 Januari 2026, saldo pinjaman yang terutang atas fasilitas tersebut telah dilunasi seluruhnya.

PT Bank Shinhan Indonesia

Pada tanggal 19 September 2025, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek tanpa agunan dari PT Bank Shinhan Indonesia dengan plafon fasilitas sebesar Rp 50.000.000.000 yang berlaku sampai dengan 22 Desember 2025.

Biaya bunga dari fasilitas ini sejumlah Rp 710.305.556 (2024: nihil).

Pada tanggal 22 Desember 2025, pinjaman fasilitas ini telah dilunasi seluruhnya.

13. BANK LOAN

Standard Chartered Bank

On August 6, 2025, the Company obtained an unsecured short-term loan facility from Standard Chartered Bank with a facility limit of Rp 300,000,000,000, which is valid until July 31, 2026. The facility is intended to support the Company's working capital requirements in its normal course of operations. The facility bears interest at JIBOR plus a certain margin in accordance with the credit agreement and uses INDONIA (compounded) in line with the benchmark change by the central bank in year 2026 period.

As of December 31, 2025, the outstanding loan balance under this facility amounted to Rp 100,000,000,000 (2024: nil).

Interest expense incurred from this loan amounted to Rp 438,115,528 in 2025 (2024: nil). Accrued interest expense as of December 31, 2025 amounted to Rp 177,766,666 (2024: nil).

The loan agreement contains certain covenants which the Company is required to fulfill. As of December 31, 2025, the Company is in compliance with the terms and conditions of the loan covenants set by the Lender.

On January 19, 2026, the outstanding loan balance for the facility had been fully repaid.

PT Bank Shinhan Indonesia

On September 19, 2025, the Company obtained an unsecured short-term loan facility from PT Bank Shinhan Indonesia with a facility limit of Rp 50,000,000,000, which is valid until December 22, 2025.

Interest expense incurred from this loan amounted to Rp 710,305,556 (2024: nil).

On December 22, 2025, the loan for the facility had been fully repaid.

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED (Continued)

14. UTANG PAJAK

	2025	2024	
	Rp	Rp	
Pajak pertambahan nilai	3.865.236.259	-	Value added tax
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 21	147.254.680	4.414.050	Article 21
Pasal 23	69.817.564	147.997.411	Article 23
Pasal 4 ayat (2)	5.627.145	59.418.675	Article 4 (2)
Jumlah	4.087.935.648	211.830.136	Total

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*).

The tax returns are based on the Company's own calculation of tax liabilities (*self-assessment*).

15. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

	2025	2024	
	Rp	Rp	
Jasa IT (Catatan 23)	36.283.927.680	-	IT fee (Note 23)
Gaji dan bonus	8.889.779.992	-	Salaries and bonus
Jasa profesional	1.595.550.000	-	Professional fees
Utilitas	1.189.421.817	-	Utilities
Lain - lain	751.109.208	10.205	Others
Jumlah	48.709.788.697	10.205	Total

15. ACCRUED EXPENSES

16. MODAL SAHAM

Pada tanggal 24 Desember 2025, Perusahaan menerima injeksi modal dari para pemegang saham sebesar Rp 730.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut: Hyundai Capital Services, Inc. sebesar Rp 548.404.700.000, PT Sinar Mas Multiartha Tbk sebesar Rp 109.455.000.000, dan PT Bank Shinhan Indonesia sebesar Rp 72.140.300.000. Injeksi modal tersebut telah memperoleh persetujuan dari OJK berdasarkan Surat No. S-251/PL.02/2025 dan telah dituangkan dalam Akta No. 116 tanggal 24 Desember 2025.

Susunan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

16. SHARE CAPITAL

On December 24, 2025, the Company received a capital injection from its shareholders amounting to Rp 730,000,000,000, with details as follows: Hyundai Capital Services, Inc. amounting to Rp 548,404,700,000, PT Sinar Mas Multiartha Tbk amounting to Rp 109,455,000,000, and PT Bank Shinhan Indonesia amounting to Rp 72,140,300,000. The capital injection has obtained approval from OJK based on Letter No. S-251/PL.02/2025 and was documented in Deed No. 116 dated December 24, 2025.

The Company's shareholder composition as of December 31, 2025 is as follows:

Nama pemegang saham	2025			Name of stockholders
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal/ Total paid-up capital stock	
Hyundai Capital Service, Inc.	848.404.700	75%	848.404.700.000	Hyundai Capital Service, Inc.
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	169.455.000	15%	169.455.000.000	PT Sinar Mas Multiartha Tbk
PT Bank Shinhan Indonesia	111.840.300	10%	111.840.300.000	PT Bank Shinhan Indonesia
Jumlah	1.129.700.000	100%	1.129.700.000.000	Total

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED (Continued)

Susunan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 sesuai Akta No 64 tanggal 30 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

The Company's shareholding composition as of December 31, 2024 according to Deed No. 64 dated May 30, 2024 is as follows:

Nama pemegang saham	2024			Name of stockholders
	Jumlah saham/ Number of shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah modal/ Total paid-up capital stock	
Hyundai Capital Service, Inc.	300.000.000	75%	300.000.000.000	Hyundai Capital Service, Inc.
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	60.000.000	15%	60.000.000.000	PT Sinar Mas Multiartha Tbk
PT Bank Shinhan Indonesia	39.700.000	10%	39.700.000.000	PT Bank Shinhan Indonesia
Jumlah	399.700.000	100%	399.700.000.000	Total

Manajemen Permodalan

Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian terhadap struktur modal sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi. Perusahaan memantau modalnya dengan menggunakan analisa *gearing ratio* (rasio utang terhadap modal), yakni membagi utang bersih terhadap jumlah modal. Utang bersih adalah jumlah utang bank dan lembaga keuangan lainnya dikurangi kas. Modal adalah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham Perusahaan, yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Capital Management

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, inline with changes in economic conditions. The Company monitors its capital using gearing ratio, by dividing net debt with the total capital. Net debt is calculated as total bank and other financial institution loans deducted by cash. Total capital is calculated as equity as shown in the statement of financial position.

17. PENDAPATAN PEMBIAYAAN

Merupakan pendapatan bunga atas pembiayaan konsumen dari pihak ketiga.

17. FINANCING INCOME

Represent interest income on consumer financing from third parties.

18. PENDAPATAN SEWA PEMBIAYAAN

Merupakan pendapatan bunga atas sewa pembiayaan dari pihak ketiga.

18. FINANCE LEASE INCOME

Represents interest income on finance leases from third parties.

19. PENDAPATAN ANJAK PIUTANG

Merupakan pendapatan bunga atas anjak piutang dari pihak ketiga.

19. FACTORING INCOME

Represents interest income on factoring from third parties.

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED (Continued)

20. BEBAN OPERASI

	2025	2024	
	Rp	Rp	
Jasa profesional	41.487.785.248	13.313.149.477	Professional fees
Penyusutan dan amortisasi (Catatan 10 dan 11)	14.216.003.818	361.535.395	Depreciation and amortization (Notes 10 and 11)
Perbaikan dan pemeliharaan	7.677.474.969	12.186.996	Repair and maintenance
Sewa operasi	2.638.281.779	1.792.433.935	Operating rent
Pemasaran	2.534.759.701	-	Marketing
Biaya berlangganan	2.100.939.831	-	Subscription
Perlengkapan kantor	2.028.934.415	119.510.624	Office supplies
Pelatihan and edukasi	1.678.113.894	42.957.000	Training and education
Komunikasi	1.596.080.110	-	Communication
Rekrutmen	738.475.617	-	Recruitment
Asuransi	675.304.402	20.130.894	Insurance
Representasi	504.201.345	108.762.156	Representation
Utilitas	492.773.078	148.140.779	Utilities
Transportasi	478.959.351	141.212.259	Transportation
Pajak final dan retribusi	96.442.728	6.815.000	Final taxes and retribution
Lain-lain	12.924.798	5.667.350.299	Others
Jumlah	78.957.455.084	21.734.184.814	Total

20. OPERATING EXPENSES

21. BEBAN BUNGA

	2025	2024	
	Rp	Rp	
Bunga pinjaman	1.148.421.084	1.681.424.962	Loan interest
Bunga atas sewa	509.187.943	-	Interest expense for lease
Jumlah	1.657.609.027	1.681.424.962	Total

21. INTEREST EXPENSES

22. PAJAK PENGHASILAN

(Manfaat) beban pajak Perusahaan terdiri dari sebagai berikut:

	2025	2024	
	Rp	Rp	
Pajak kini	-	-	Current tax
Pajak tangguhan	(1.654.303.341)	7.842.227.907	Deferred tax
Jumlah	(1.654.303.341)	7.842.227.907	Total

22. INCOME TAX

The Company's tax (benefit) expense consist of the following:

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED (Continued)

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara (rugi) laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

Current Tax

Reconciliation between (loss) profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income and taxable income are as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
(Rugi) laba sebelum pajak menurut laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(119.029.815.151)	73.120.384.985	(Loss) profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Perbedaan temporer:			Temporary difference :
Imbalan kerja jangka panjang	969.715.000	(1.537.790.420)	Long-term employee benefits expense
Penyusutan aset tetap	-	(3.829.803.784)	Depreciation of property and equipment
Amortisasi aset hak-guna	(2.488.925.053)	-	Amortization of right-of-use assets
Penyisihan piutang lain - lain	118.491.637	-	Provision for impairment of other receivables
Kerugian kredit ekspektasian atas piutang pembiayaan	106.499.078	(33.160.124.484)	Expected credit losses of financing receivable
Biaya yang masih harus dibayar	8.889.779.992	(294.206.200)	Accrued expenses
Revaluasi aset	-	3.175.434.400	Asset revaluation
Perbedaan tetap :			Permanent differences:
Penghasilan bunga yang dikenakan pajak final	(6.484.937.233)	(7.571.815.002)	Interest income already subjected to final tax
Bunga pinjaman	1.148.421.084	-	Interest loan
Keuntungan penjualan aset	-	2.345.596.710	Gain on sale asset
Penyusutan aset tetap	123.566.332	-	Depreciation of property and equipment
Promosi	1.458.702.243	-	Promotion
Jamuan	4.955.240	-	Representation
Manfaat dalam bentuk natura	948.416.100	185.283.520	Benefit in Kind
Lain-lain	(493.359.108)	(22.188.372.096)	Others
(Rugi) laba kena pajak	<u>(114.728.489.839)</u>	<u>10.244.587.629</u>	Taxable (loss) profit
Kompensasi kerugian tahun sebelumnya	(84.163.931.817)	(94.408.519.446)	Prior year loss compensation
(Rugi) laba kena pajak	<u>(114.728.489.839)</u>	<u>10.244.587.629</u>	Taxable (loss) profit
Rugi kena pajak	<u>(198.892.421.656)</u>	<u>(84.163.931.817)</u>	Taxable loss
	2025 Rp	2024 Rp	
Kerugian fiskal yang tidak diakui			Fiscal loss carryforward which was not recognized:
2022	(70.559.170.695)	(80.803.758.324)	2022
2023	(13.604.761.122)	(13.604.761.122)	2023
2025	<u>(114.728.489.839)</u>	<u>-</u>	2025
Jumlah	<u>(198.892.421.656)</u>	<u>(94.408.519.446)</u>	Total

Sesuai dengan peraturan perpajakan, kerugian fiskal dapat dibawa ke depan dan dikompensasikan dengan penghasilan kena pajak dalam jangka waktu lima tahun setelah tahun terjadinya kerugian fiskal tersebut. Manajemen tidak mengakui aset pajak tangguhan atas akumulasi kerugian fiskal yang belum digunakan karena terdapat ketidakpastian yang signifikan atas ketersediaan penghasilan kena pajak di masa depan yang dapat digunakan untuk mengkompensasi kerugian tersebut.

According to tax regulation, fiscal losses may be carried forward and applied against taxable income in any of the five years following the year in which the fiscal loss was incurred. Management did not recognize any deferred tax assets on the Company's unused accumulated fiscal losses due to the significant uncertainties of the availability of taxable income in the future against which tax losses can be utilized.

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED (Continued)

	2025	2024	
	Rp	Rp	
Beban pajak kini	-	-	Current tax expense
Jumlah	-	-	Total
Dikurangi pajak dibayar di muka	-	-	Less prepaid income taxes
Pasal 23	(46.733.073)	-	Article 23
Lebih bayar pajak	(46.733.073)	-	Tax overpayment

Pajak Tangguhan

Deferred Tax

Rincian dari aset pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of the Company's deferred tax assets are as follows:

	1 Januari 2025/ January 1, 2025	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 Desember 2025/ December 31, 2025	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Kerugian kredit ekspektasian piutang pembiayaan	16.720.002	6.709.795	-	23.429.797	Expected credit loss financing receivables
Kerugian kredit ekspektasian piutang lain-lain	-	26.068.160	-	26.068.160	Expected credit loss others receivables
Aset hak-guna	-	(3.197.547.161)	-	(3.197.547.161)	Right-of-use assets
Liabilitas sewa	-	2.649.983.649	-	2.649.983.649	Lease liabilities
Biaya masih harus dibayar	-	1.955.751.598	-	1.955.751.598	Accrued expenses
Liabilitas imbalan pasca kerja	97.324.263	213.337.300	(54.687.820)	255.973.743	Employment benefits obligation
Jumlah Aset Pajak Tangguhan - bersih	114.044.265	1.654.303.341	(54.687.820)	1.713.659.786	Deferred Tax Asset - net

	1 Januari 2024/ January 1, 2024	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain/ Credited to other comprehensive income	31 Desember 2024/ December 31, 2024	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Kerugian kredit ekspektasian piutang pembiayaan	7.311.947.389	(7.295.227.387)	-	16.720.002	Expected credit losses financing receivables
Perbedaan antara penyusutan komersil dan fiskal	842.556.832	(842.556.832)	-	-	Difference between commercial and fiscal depreciation
Biaya masih harus dibayar	64.725.364	(64.725.364)	-	-	Accrued expenses
Liabilitas imbalan pasca kerja	435.638.155	(338.313.892)	-	97.324.263	Employment benefits obligation
Revaluasi aset	(698.595.568)	698.595.568	-	-	Assets revaluation
Jumlah Aset Pajak Tangguhan - bersih	7.956.272.172	(7.842.227.907)	-	114.044.265	Deferred Tax Asset - net

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED (Continued)

Rekonsiliasi antara beban pajak dan hasil perkalian laba (rugi) akuntansi dengan tarif yang berlaku pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

A reconciliation between the total tax expense and the amounts computed by applying the effective tax rates to profit (loss) before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income is as follows:

	2025 Rp	2024 Rp	
(Rugi) laba sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	(119.029.815.151)	73.120.384.985	(Loss) profit before tax per statements of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak atas dasar tarif pajak efektif	(26.186.559.333)	16.086.484.697	Tax expense at effective tax rates
Perbedaan tetap :			Permanent difference :
Penghasilan bunga yang dikenakan pajak final	(1.426.686.191)	(1.665.799.300)	Interest income already subjected final tax
Keuntungan penjualan aset	-	516.031.276	Gain on sale asset
Bunga pinjaman	252.652.639	-	Interest loan
Penyusutan aset tetap	27.184.593	-	Depreciation of property and equipment
Promosi	320.914.494	-	Promotion
Jamuan	1.090.153	-	Representative
Manfaat dalam bentuk natura	208.651.542	40.762.374	Benefit in kind
Lain-lain	(108.539.003)	(4.881.441.861)	Others
Jumlah	(26.911.291.106)	10.096.037.186	Total
Dari kompensasi rugi pajak yang tidak diakui	25.240.267.765	-	Unrecognized from tax loss compensation
Penyesuaian	16.720.000	(2.253.809.279)	Adjustment
Jumlah (manfaat) beban pajak	(1.654.303.341)	7.842.227.907	Total tax (benefit) expense

Pada Desember 2024, Pemerintah Indonesia, sudah mengesahkan peraturan pajak penghasilan Pilar Dua yang berlaku mulai 1 Januari 2025 dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 136 Tahun 2024 ("PMK-136"). Berdasarkan penelaahan Hyundai Capital Service Inc., perusahaan induk, entitas-entitas yang beroperasi di yurisdiksi Indonesia, termasuk Perusahaan, memenuhi Transitional Safe-Harbour relief untuk tahun pajak 2025.

In December 2024, the government of Indonesia has enacted the Pillar Two income taxes legislation effective from January 1, 2025 by issuing Ministry of Finance ("MOF") Regulation No. 136 Year 2024 ("PMK-136"). Based on assessment of Hyundai Capital Service Inc., the parent entity, entities operate in Indonesia jurisdiction, including the Company, qualify for Transitional Safe-Harbour relief for fiscal year 2025.

Perusahaan tidak berekspektasi terdapat eksposur material terhadap pajak penghasilan Pilar Dua atas laporan keuangan ini.

The Company does not expect a material exposure to Pillar Two income taxes to these financial statements.

Perusahaan secara berkelanjutan menilai dampak peraturan pajak penghasilan Pilar Dua terhadap kinerja keuangan di masa depan.

The Company continuously assess the impact of the Pillar Two income taxes legislation on its future financial performance.

23. SIFAT DAN TRANSAKSI MATERIAL KEPADA PIHAK BERELASI

Berikut adalah rincian sifat dari hubungan berelasi:

23. NATURE OF RELATIONSHIP AND MATERIAL TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The nature of related parties relationships are as follows:

Pihak-pihak berafiliasi/ <i>Related parties</i>	Sifat dari Hubungan/ <i>Nature of Relationship</i>	Sifat dari Transaksi/ <i>Nature of transactions</i>
Hyundai Capital Service, Inc.	Pemegang saham Perusahaan/ <i>The Company's Shareholders</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other account receivables</i>
PT Sinar Mas Multiartha Tbk	Pemegang saham Perusahaan/ <i>The Company's Shareholders</i>	Utang terkait pembiayaan/ <i>Financing related liabilities</i>
PT Bank Shinhan Indonesia	Pemegang saham Perusahaan/ <i>The Company's Shareholders</i>	Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalent</i>
Hyundai Autoever, Inc.	Memiliki pemilik manfaat utama yang sama/ <i>Have same ultimate beneficiary owner</i>	Beban operasi/ <i>Operating expenses</i>
PT Hyundai Motor Indonesia	Memiliki pemilik manfaat utama yang sama/ <i>Have same ultimate beneficiary owner</i>	Beban umum dan administrasi/ <i>Operating expenses</i>
PT Bank Sinarmas Tbk	Entitas asosiasi pemegang saham/ <i>Associate entity of shareholder</i>	Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalent</i>
PT Asuransi Sinar Mas	Entitas asosiasi pemegang saham/ <i>Associate entity of shareholder</i>	Kerjasama asuransi pembiayaan/ <i>Financing insurance cooperation</i>
- PT Hyundai Motor Indonesia Berdasarkan perjanjian <i>captive</i> dengan PT Hyundai Motor Indonesia pada tanggal 1 Mei 2025, Perusahaan bertindak sebagai lembaga pembiayaan eksklusif dengan menyediakan pembiayaan ritel bagi pelanggan, pembiayaan grosir bagi dealer resmi, serta solusi keuangan pelengkap yang selaras dengan bisnis Hyundai. - PT Hyundai Motor Indonesia Based on <i>captive</i> agreement with PT Hyundai Motor Indonesia in May 1, 2025, the Company acts as the exclusive financing arm by providing retail financing for customers, wholesale financing for authorized dealers, and complementary financial solutions aligned with Hyundai's business.		
- Hyundai Capital Service Inc. Perusahaan melakukan transaksi dalam bidang jasa tenaga ahli yang terlibat dalam implementasi sistem informasi perusahaan dan jaminan utang. - Hyundai Capital Service Inc. The Company engages in transactions in the field of professional services involving experts participating in the implementation of corporate information systems and debt guarantees fee.		
- PT Asuransi Sinar Mas (ASM) Perusahaan melakukan kerjasama asuransi melalui ASM atas kendaraan bermotor yang dibiayai. - PT Asuransi Sinar Mas (ASM) The Company entered into an insurance agreement through ASM for financed vehicles.		
Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebesar Rp 9.675.948.967 untuk tahun 2025 (2024: Rp 1.714.622.250).		The remuneration of Board of Commissioners and Directors recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income amounted to Rp 9,675,948,967 in 2025 (2024: Rp 1,714,622,250).

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED (Continued)

	Saldo/Balance		Persentase terhadap jumlah aset/liabilitas/ Percentage to total assets/liabilities	
	2025	2024	2025	2024
	Rp	Rp	%	%
Aset				
Kas dan setara kas				
PT Bank Shinhan Indonesia	30.570.180.450	14.919.822.776	2,64%	2,63%
PT Bank Sinarmas Tbk	5.419.497	5.900.231	0,00%	0,00%
Aset lain-lain				
PT Hyundai Motor Indonesia	223.190.000	-	0,02%	-
Jumlah	30.798.789.947	14.925.723.007	0,02%	-
Liabilitas				
Biaya masih harus dibayar				
Hyundai Capital Service, Inc.	36.283.927.680	-	20,94%	-
PT Hyundai Motor Indonesia	74.304.105	-	0,04%	-
Utang terkait pembiayaan				
PT Asuransi Sinar Mas	1.263.543.922	-	0,73%	-
Jumlah	37.621.775.707	-	21,71%	-
	Saldo/Balance		Persentase terhadap jumlah pendapatan/beban/ Percentage to total revenue/expenses	
	2025	2024	2025	2024
	Rp	Rp	%	%
Pendapatan				
Pendapatan lain-lain				
PT Bank Shinhan Indonesia	6.484.937.233	7.571.815.002	31,48%	7,04%
Jumlah	6.484.937.233	7.571.815.002	31,48%	7,04%
Beban				
Beban operasi				
Hyundai Autoever, Inc.	1.003.128.635	-	0,72%	-
PT Hyundai Motor Indonesia	362.505.509	-	0,26%	-
Hyundai Capital Service, Inc.	27.022.779.072	-	19,35%	-
Beban lain-lain				
Hyundai Capital Service, Inc.	68.749.036	-	0,05%	-
Jumlah	28.457.162.252	-	20,38%	-

24. PENGUKURAN NILAI WAJAR

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama.

Untuk aset dan liabilitas keuangan yang diukur menggunakan nilai wajar, berikut ini adalah hirarki nilai wajar:

a. Tingkat 1

Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

24. FAIR VALUE MEASUREMENT

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market.

For financial assets and liabilities measured at fair value, the following are the hierarchy of the fair values:

a. Level 1

Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED (Continued)

b. Tingkat 2

Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan

c. Tingkat 3

Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

b. Level 2

Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly or indirectly; and

c. Level 3

Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data.

Instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar

Pada 31 Desember 2025 dan 2024, seluruh instrumen keuangan Perusahaan tidak diukur pada nilai wajar, diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Tabel di bawah ini menggambarkan nilai tercatat dan nilai wajar dari aset keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

Financial instruments not measured at fair values

As of December 31, 2025 and 2024, all the Company's financial instruments not measured at fair value, are measured at amortized cost.

The table below sets out the carrying amounts and fair value of financial assets not presented at their fair value in the Company's financial statements of financial position as at December 31, 2025 and 2024:

	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
31 Desember 2025			December 31, 2025
Aset keuangan			Financial assets
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	120.356.409.454	120.356.409.454	Consumer financing receivables - net
Piutang sewa pembiayaan - bersih	4.498.225.226	4.498.225.226	Finance lease receivables - net
Piutang pembiayaan diler - bersih	3.678.194.665	3.678.194.665	Dealer finance receivables - net
	<u>128.532.829.345</u>	<u>128.532.829.345</u>	
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
31 Desember 2024			December 31, 2024
Aset keuangan			Financial assets
Piutang sewa pembiayaan - bersih	209.280.855	209.280.855	Finance lease receivables - net

Nilai wajar dari piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan dinilai dengan menggunakan arus kas yang didiskonto berdasarkan tingkat suku bunga pasar pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, dan dikategorikan sebagai nilai wajar Level 3.

The fair value of consumer financing receivables and finance lease receivables are calculated using discounted cash flow analysis using market interest rate as of December 31, 2025 and 2024, and is categorized as fair value Level 3.

Daftar di bawah ini menyajikan daftar instrumen keuangan yang nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya, contohnya, instrumen keuangan jangka pendek atau yang ditinjau ulang menggunakan harga pasar secara berkala.

Aset keuangan:

- Kas pada bank;
- Deposito berjangka;
- Tagihan anjak piutang - bersih;
- Aset lain-lain

Liabilitas keuangan

- Utang bank;
- Utang terkait pembiayaan;
- Other payables;
- Biaya masih harus dibayar.

25. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Instrumen keuangan

Seluruh aset dan liabilitas keuangan Perusahaan diharapkan dapat terealisasi atau diselesaikan dalam waktu dekat, atau tingkat bunganya ditinjau secara berkala. Oleh karenanya, nilai tercatat diperkirakan mendekati nilai wajar.

Manajemen risiko keuangan

Perusahaan memiliki eksposur terhadap risiko-risiko atas instrumen keuangan sebagai berikut:

- Risiko kredit
- Risiko pasar
- Risiko likuiditas

Kerangka manajemen risiko

Keseluruhan program manajemen risiko Perusahaan terfokus untuk memitigasi risiko atas piutang pembiayaan dan untuk meminimalisasi dampak yang tidak menguntungkan bagi kinerja keuangan Perusahaan.

Direksi memiliki tanggung jawab secara menyeluruh atas penetapan dan pengawasan kerangka manajemen risiko Perusahaan.

Kebijakan manajemen risiko Perusahaan ditetapkan untuk mengidentifikasi dan menganalisa risiko-risiko yang dihadapi Perusahaan, untuk menetapkan batasan dan pengendalian risiko yang sesuai, serta untuk mengawasi risiko dan kepatuhan terhadap batasan yang telah ditetapkan. Kebijakan dan sistem manajemen risiko dikaji secara berkala untuk mencerminkan perubahan pada regulasi, kondisi pasar, produk dan jasa yang ditawarkan.

The following list sets out those financial instruments for which their carrying amount are reasonable approximation of fair value because, for example, they are short-term in nature or re-priced to current market rates frequently.

Financial assets:

- *Cash in banks;*
- *Time deposits;*
- *Factoring receivables - net;*
- *Other assets*

Financial liabilities:

- *Bank loan;*
- *Financing related liabilities;*
- *Other payables;*
- *Accrued expenses.*

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

Financial instrument

All financial assets and liabilities of the Company are expected to be realized or settled in the near term, or its interest rates are repriced frequently. Therefore, the carrying amounts approximate the fair values.

Financial risk management

The Company has exposure to the following risks from financial instruments:

- *Credit risk*
- *Market risk*
- *Liquidity risk*

Risk management framework

The Company's overall risk management program focuses on mitigating the risk from financing receivables and minimizing potential adverse effects on the Company's financial performance.

The Directors have the overall responsibility for the establishment and oversight of the Company's risk management framework.

The Company's risk management policies are established to identify and analyze the risks faced by the Company, to set appropriate risk limits and controls, and to monitor risks and adherence to predetermined limits. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in regulations, market conditions, products and services offered.

Tujuan dan kebijakan manajemen risiko keuangan

Manajemen risiko keuangan Perusahaan bertujuan untuk memastikan kecukupan sumber daya keuangan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha, serta mengelola risiko tingkat bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas. Perusahaan beroperasi sesuai rumusan pedoman yang telah disetujui oleh Direksi.

a. Risiko kredit

Perusahaan bergerak dalam bidang usaha pembiayaan dan dengan demikian menghadapi risiko kegagalan kredit dari debiturnya. Untuk mengelola risiko kredit ini, Perusahaan menerima aplikasi kredit secara selektif dan ditangani dengan prinsip kehati-hatian, yang mana aplikasi kredit akan melalui proses KYC (*Know Your Customer*) dan/atau KYB (*Know Your Business*) dan analisa kredit sebelum disetujui.

Analisis calon konsumen dan pemantauan Konsumen dilakukan secara menyeluruh, Perusahaan menggunakan survei internal untuk validasi informasi calon konsumen dan survei yang telah dilakukan oleh *Credit Marketing Officer* (CMO) tanpa mengurangi kecepatan dalam mengambil keputusan persetujuan pembiayaan. Perusahaan pun melakukan pemantauan karakteristik pembayaran angsuran dari konsumen, status jaminan dan kondisi-kondisi yang dapat mempengaruhi sumber penghasilan konsumen sehingga konsumen yang akan bermasalah dapat diantisipasi lebih awal.

Untuk pembiayaan korporasi, Perusahaan hanya melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki kelayakan kredit yang memadai dan, jika diperlukan, memperoleh jaminan yang memadai untuk mengurangi risiko kerugian atau gagal bayar. Perusahaan melakukan penilaian kredit dan memberikan peringkat kredit internal kepada setiap debitur sebelum menandatangani perjanjian. Perusahaan juga melakukan penelaahan secara berkala atas pembiayaan korporasi yang diberikan serta memantau eksposur kredit dan peringkat kredit debitur, baik secara individual maupun grup, untuk memastikan bahwa risiko kredit dikelola dengan baik.

Objectives and policies of financial risk management

The objective of the Company's financial risk management is to ensure the adequacy of financial resources to support business growth and development, while managing exposures to interest rate risk, credit risk and liquidity risk. The Company operates within defined guidelines that are approved by the Directors.

a. Credit risk

*The Company is engaged in the financing business and is therefore exposed to credit default risk from its debtors. To manage this credit risk, the Company receives credit applications selectively and handles them with prudence principle, whereby the credit application would go through KYC (*Know Your Customer*) and/or KYB (*Know Your Business*) and credit analysis process to be approved.*

In its analysis of prospective consumers and monitoring of consumers as a whole, the Company uses an internal survey service to validate information on prospective consumers and a survey conducted by Credit Marketing Officer (CMO) without reducing the speed of financing approval decisions. The Company also monitors the characteristics of consumer installment payments, insurance status, and other conditions that may affect the consumer's income sources so that consumers who might pose problems can be recognized early.

For corporate financing, the Company conducts transactions only with counterparties that have adequate creditworthiness and, where appropriate, obtains sufficient collateral to mitigate the risk of loss or default. The Company performs credit assessments and assigns internal credit ratings to each debtor prior to entering into an agreement. The Company also periodically reviews the corporate financing provided and monitors the credit exposure and credit ratings of debtors, both on an individual and group basis, to ensure that credit risk is properly managed.

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED (Continued)

Namun demikian, Perusahaan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dengan selektif pada persetujuan pelanggan baru baik untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif. Selain itu, penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan dengan pembaruan model skoring untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan menambahkan kontrol pada saat transaksi untuk memperoleh segmen pelanggan dengan risiko lebih rendah, pembatasan pemberian benefit atau produk, penutupan *channel* transaksi yang lebih berisiko sesuai tingkat risiko debitur, pemberlakuan jaminan untuk debitur produktif tertentu dan melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap portofolio yang ada.

However, the Company still applies the prudential principles by being more selective on the new customer approval for both consumptive and productive financing. In addition, the implementation of the prudential principles is carried out by updating scoring model in order to increase the accuracy and adding more control in transaction to obtain customers with lower risk segments, limitation of benefit or product offering, closure of more risky transaction channels align with debtors' risk level, collateral requirement for certain productive debtors and more intensive monitoring of the existing portfolio.

Berikut adalah eksposur maksimum laporan posisi keuangan yang terkait risiko kredit pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The table below shows the maximum exposures on the statements of financial position related to credit risk as of December 31, 2025 and 2024:

	2025	2024	
	Jumlah Bruto/ Gross Amounts	Jumlah Bruto/ Gross Amounts	
	Rp	Rp	
Kas dan setara kas	790.811.441.885	184.955.283.127	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen	121.034.889.212	-	Consumer financing receivables
Piutang sewa pembiayaan	4.518.698.721	209.280.855	Finance lease receivables
Piutang pembiayaan diler	4.904.259.560	-	Dealer financing receivables
Tagihan anjak piutang	136.000.000.000	152.000.000.000	Factoring receivables
Aset lain-lain	2.084.375.315	1.558.937.000	Other assets
Jumlah	1.059.353.664.693	338.723.500.982	Total

i. Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit hampir seluruhnya berasal dari piutang pembiayaan, di mana eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya dan limit kredit untuk pembiayaan yang aktif dan belum digunakan oleh pengguna.

i. Maximum exposure to credit risk

The Company's exposure to credit risk mainly comes from the financing receivables, in which the maximum exposure to credit risk equals to the carrying amount as well as the credit limit for financing that are active and have not been utilized by the users.

Kas di bank

Kas di bank Perusahaan disimpan pada bank terkemuka yang tunduk pada peraturan yang ketat, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan.

Cash in banks

The Company's cash in banks are deposited at reputable banks that are subject to tight regulations, therefore, the exposure to loss is minimized.

ii. Analisa risiko kredit

Pada tahun 2025, Perusahaan meningkatkan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman dengan mempertimbangkan kondisi pembiayaan Perusahaan selama tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian Perusahaan sebagai strategi untuk menghadapi tren peningkatan tingkat risiko selama tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Meskipun demikian, peningkatan tingkat risiko tersebut sesuai dengan peningkatan penyaluran kredit selama tahun 2025 dan masih dalam tingkat yang terkendali.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan untuk situasi di mana risiko yang diketahui atau ekspektasi risiko yang belum ditangani secara memadai dalam proses pemodelan provisi. Perusahaan bertanggungjawab untuk mengusulkan penyesuaian tersebut.

Tingkat keseluruhan ekspektasi kerugian kredit dan pertimbangan manajemen yang signifikan akan dilaporkan kepada, dan diawasi oleh, Komite Manajemen Risiko Perusahaan.

Sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang diterapkan, Perusahaan terus mengembangkan proses penilaian calon debitur. Salah satunya adalah dengan melakukan pembaruan model skoring untuk meningkatkan akurasi penerimaan pengguna baru. Selain itu, perusahaan juga menambahkan kontrol pada transaksi, apabila sebuah transaksi terindikasi mencurigakan maka transaksi tersebut akan digagalkan. Perusahaan juga melakukan pengelolaan portofolio secara berkelanjutan seperti manajemen limit yang memberikan limit lebih besar untuk pengguna dengan kategori risiko rendah dan mengurangi limit untuk pengguna dengan kategori risiko tinggi.

Perusahaan menganggap agunan dan jaminan sebagai sumber pembayaran sekunder untuk lebih meningkatkan pemulihan piutang pembiayaan investasi dan meminimalkan risiko kredit. Berdasarkan penilaian kondisi keuangan yang nyata dan potensi arus kas masa depan pelanggan, Perusahaan menganalisa kemampuan membayar pelanggan dan kebutuhan agunan yang cukup dalam bentuk aset atau kewajiban pihak ketiga.

ii. Credit risk analysis

In 2025, the Company increased the allowance for impairment losses on loans by considering the Company's financing condition during the past year. That shows the Company's implementation of prudential principles as strategy to encounter the increasing trend of risk level in 2025 compared to 2024. However, the climb of risk level aligns to the increase of disbursement during 2025 and still on the controllable level.

If necessary, adjustments can be made for situations in which known or expected risks have not been adequately addressed in the provision modeling process. The Company is responsible for proposing these adjustments.

The overall level of expected credit losses and significant management consideration will be reported to, and overseen by, the Company's Risk Management Committee.

Aligned with prudential principles, the Company keeps improving the assessment process of new borrowers. One of the improvements is updating the scoring model to increase the accuracy of new users' acceptance. Other than that, the company also added transaction control, if a transaction is considered as suspicious then that transaction will be failed. The company also conducts continuous portfolio management i.e limit management that provides higher limit for users within low risk category and limit reduction for users within high risk category.

The Company considers the collaterals and guarantees as a secondary repayment source to further enhance investment financing receivables recovery and minimize credit risk. Based on the assessment of a customer's real financial condition and potential future cash flows, the Company analyzes the customer's repayment ability and requires sufficient collateral in the form of an asset or third-party obligation.

Hal ini berfungsi untuk mengurangi risiko kredit yang melekat pada eksposur, baik dengan meningkatkan pemulihan dalam hal gagal bayar atau mentransfer kewajiban pemjamin kepada penjamin.

Manajemen risiko kredit Perusahaan pada dasarnya mengutamakan analisis kemampuan membayar yang berasal dari arus kas yang dihasilkan oleh kinerja bisnis pemjamin. Agunan dan kredit tambahan lainnya dianggap sebagai sumber pembayaran sekunder dalam praktek bisnis Perusahaan.

Perusahaan juga menerapkan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Industri Keuangan Non-Bank.

Tabel berikut menggambarkan jumlah risiko kredit dan konsentrasi risiko atas piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan yang dimiliki Perusahaan:

	2025 Rp	2024 Rp	
Piutang pembiayaan konsumen			Consumer financing receivables
Korporasi	29.433.166.804	-	Corporate
Individu	90.923.242.650	-	Individual
Sub-jumlah	120.356.409.454	-	Sub-total
Piutang sewa pembiayaan			Finance lease receivables
Korporasi	915.135.000	209.280.855	Corporate
Individu	3.583.090.226	-	Individual
Sub-jumlah	4.498.225.226	209.280.855	Sub-total
Jumlah	124.854.634.680	209.280.855	Total

b. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administrative termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Risiko Pasar antara lain meliputi Risiko tingkat suku bunga, dan Risiko ekuitas. Manajemen Risiko pada Risiko Pasar dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan Perusahaan.

This serves to mitigate the inherent credit risk in the exposure, by either improving recoveries in the event of a default or transferring the borrower's obligation to guarantors.

The Company's credit risk management is mainly based on an analysis of the repayment ability from the cash flows of the borrower's business performance. Collateral and other credit enhancements are considered as secondary repayment sources in the Company's business practice.

The Company is also implementing Anti-Money-Laundering, Terrorism-Funding-Prevention Programs and Prevention of Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in respect to the regulation based on Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 year 2023 regarding on the Implementation of Anti-Money Laundering Program, Prevention of Financing of Terrorism, and Prevention of Financing of Proliferation of Weapons of Mass Destruction by Financial Service Providers in the Non-Bank Financial Industry Sector.

The following table illustrates the amount of credit risk and concentration risk on consumer financing receivables and finance lease receivables held by the Company:

b. Market risk

Market risk is risk in the position of assets, liabilities, equity, and/or administrative accounts including derivative transactions due to overall changes in market conditions. Market Risk includes, among others, interest rate risk, exchange rate risk and equity risk. Market Risk Management is carried out to minimize the possibility of negative impacts due to changes in market conditions on the Company's assets and capital.

Risiko tingkat suku bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari instrumen keuangan berfluktuasi dikarenakan perubahan tingkat suku bunga pasar. Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Perusahaan terpapar risiko ini karena perubahan tingkat suku bunga pasar melalui utang bank, yang memiliki tingkat suku bunga variabel (Catatan 13). Aset dan liabilitas keuangan lainnya memiliki suku bunga tetap atau tanpa suku bunga

c. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko dalam hal Perusahaan tidak memiliki sumber keuangan yang mencukupi untuk memenuhi liabilitasnya yang telah jatuh tempo.

Kebijakan Perusahaan adalah untuk memastikan bahwa Perusahaan selalu memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban ketika liabilitas tersebut jatuh tempo.

Berikut adalah adalah jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan:

	Nilai tercatat/ Carrying amount	Jumlah/ Total	Dalam 1 tahun/ Within 1 year	2-3 tahun/ year	4-5 tahun/ year	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years
31 Desember 2025						
Liabilitas keuangan						
Utang terkait pembiayaan	5.467.971.083	5.467.971.083	5.467.971.083	-	-	-
Utang lain-lain	1.794.666.174	1.794.666.174	1.794.666.174	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	48.709.788.697	48.709.788.697	48.709.788.697	-	-	-
Utang bank	100.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	-	-	-
	155.972.425.954	155.972.425.954	155.972.425.954	-	-	-
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Jumlah/ Total	Dalam 1 tahun/ Within 1 year	2-3 tahun/ year	4-5 tahun/ year	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years
31 Desember 2024						
Liabilitas keuangan						
Utang terkait pembiayaan	-	-	-	-	-	-
Utang lain-lain	13.889.791	13.889.791	13.889.791	-	-	-
Beban yang masih harus dibayar	10.205	10.205	10.205	-	-	-
Utang bank	-	-	-	-	-	-
	13.899.996	13.899.996	13.899.996	-	-	-

Analisis Sensitivitas

Untuk modal kerja, utang dan pinjaman investasi, Perusahaan berusaha dengan mengurangi risiko tingkat suku bunganya dengan cara mendapatkan struktur pinjaman dengan suku bunga kompetitif.

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of financial instruments fluctuate due to changes in market interest rates. At December 31, 2025 and 2024, the Company is exposed to changes in market interest rates through its bank loan, which are subject to variable interest rates (Notes 13). All other financial assets and liabilities have fixed interest rates or non-interest bearing.

c. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk whereby the Company does not have sufficient financial resources to discharge its matured liabilities.

The Company's policy is to ensure that the Company will always have capability to meet their liabilities when they become due.

The following are the contractual maturities of financial liabilities:

Sensitivity Analysis

For working capital, investment loans and borrowings, the Company may seek to mitigate its interest rate risk by obtaining loans structure with competitive interest rate.

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Lanjutan)

PT HYUNDAI CAPITAL FINANCE INDONESIA
NOTES TO FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2025 AND FOR THE YEAR
THEN ENDED (Continued)

Perbandingan liabilitas terhadap ekuitas Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar 9% (2024: nihil). Dalam hal perbandingan liabilitas terhadap jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar 9% (2024: nihil).

The comparison of the Company's liabilities to equity is 9% as of December 31, 2025 (2024: nil). Meanwhile, the ratio of liabilities to total assets is 9% as of December 31, 2025 (2024: nil).

Tabel berikut menggambarkan profil perbedaan jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

The following table shows the differences in the maturity profile of the Company's financial assets and liabilities as of December 31, 2025 and 2024:

2025											
	Sampai dengan 1 bulan/ Until 1 month	> 1 bulan s.d 3 bulan/ > 1 month until 3 months	> 3 bulan s.d 12 bulan/ > 3 months until 12 months	> 1 tahun s.d 5 tahun/ > 1 year until 5 years	Jumlah/ Total						
Aset keuangan						Financial assets					
Tanpa suku bunga:						Non bearing interest:					
Kas dan setara kas	78.282.869	-	-	-	78.282.869	Cash and cash equivalents					
Suku bunga variabel						Variable interest					
Kas dan setara kas	790.733.159.016	-	-	-	790.733.159.016	Cash and cash equivalents					
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	3.343.233.596	6.686.467.191	30.089.102.364	80.237.606.303	120.356.409.454	Consumer financing receivables - net					
Piutang sewa pembiayaan - bersih	124.950.701	249.901.402	1.124.556.307	2.998.816.817	4.498.225.227	Finance lease receivables - net					
Piutang pembiayaan diler - bersih	-	3.678.194.665	-	-	3.678.194.665	Dealer financing receivables - net					
Tagihan anjak piutang - bersih	135.632.800.000	-	-	-	135.632.800.000	Factoring receivables - net					
Jumlah	794.279.626.182	6.936.368.593	31.213.658.671	83.236.423.120	1.054.977.071.231	Total					
Liabilitas keuangan						Financial liabilities					
Tanpa suku bunga:						Without interest:					
Utang terkait pembiayaan	5.467.971.083	-	-	-	5.467.971.083	Financing related liabilities					
Utang lain-lain	1.794.666.174	-	-	-	1.794.666.174	Other payables					
Beban yang masih harus dibayar	48.709.788.697	-	-	-	48.709.788.697	Accrued expenses					
Suku bunga variabel:						Variable interest:					
Utang bank	100.000.000.000	-	-	-	100.000.000.000	Bank loan					
Jumlah	155.972.425.954	-	-	-	155.972.425.954	Total					
Bersih	638.307.200.228	6.936.368.593	31.213.658.671	83.236.423.120	899.004.645.277	Net					
2024											
	Sampai dengan 1 bulan/ Until 1 month	> 1 bulan s.d 3 bulan/ > 1 month until 3 months	> 3 bulan s.d 12 bulan/ > 3 months until 12 months	> 1 tahun s.d 5 tahun/ > 1 year until 5 years	Jumlah/ Total						
Aset keuangan						Financial assets					
Tanpa suku bunga:						Non bearing interest:					
Kas dan setara kas	-	-	-	-	-	Cash and cash equivalents					
Suku bunga variabel						Variable interest					
Kas dan setara kas	184.955.283.127	-	-	-	184.955.283.127	Cash and cash equivalents					
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	-	-	-	-	-	Consumer financing receivables - net					
Piutang sewa pembiayaan - bersih	8.720.036	17.440.071	78.480.321	104.640.428	209.280.856	Finance lease receivables - net					
Piutang pembiayaan diler - bersih	-	-	-	-	-	Dealer financing receivables - net					
Tagihan anjak piutang - bersih	-	-	-	-	-	Factoring receivables - net					
Jumlah	184.964.003.163	17.440.071	78.480.321	104.640.428	185.164.563.983	Total					
Liabilitas keuangan						Financial liabilities					
Tanpa suku bunga:						Without interest:					
Utang terkait pembiayaan	-	-	-	-	-	Financing related receivables					
Utang lain-lain	13.889.791	-	-	-	13.889.791	Other payables					
Beban yang masih harus dibayar	10.205	-	-	-	10.205	Accrued expenses					
Suku bunga variabel:						Variable interest:					
Utang bank	-	-	-	-	-	Bank loan					
Jumlah	13.899.996	-	-	-	13.899.996	Total					
Bersih	184.950.103.167	17.440.071	78.480.321	104.640.428	185.150.663.987	Net					

26. REKONSILIASI LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Tabel berikut menjelaskan perubahan pada liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, yang meliputi perubahan terkait kas dan non kas: Liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah liabilitas yang arus kas, atau arus kas masa depannya, diklasifikasikan dalam laporan arus kas Perusahaan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

	1 Januari/ Januari 1, 2025	Arus kas/ Cash flows	Perubahan transaksi non-kas/ Non-cash changes	31 Desember/ December 31, 2025	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aktivitas pendanaan					Financing activities
Utang bank	-	100.000.000.000	-	100.000.000.000	Bank loan
Liabilitas sewa	-	(2.636.640.720)	14.682.020.943	12.045.380.223	Lease liability
Jumlah	-	97.363.359.280	14.682.020.943	112.045.380.223	Total
	1 Januari/ Januari 1, 2024	Arus kas/ Cash flows	Perubahan transaksi non-kas/ Non-cash changes	31 Desember/ December 31, 2024	
	Rp	Rp	Rp	Rp	
Aktivitas pendanaan					Financing activity
Utang bank	194.985.500.000	(194.985.500.000)	-	-	Bank loan

27. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Susunan Komisaris dan Direksi untuk tanggal 31 Desember 2025 sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 1 telah dituangkan dalam Akta Notaris Yulia, S.H., No. 17 tanggal 9 Januari 2026. Akta tersebut telah disetujui dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia pada tanggal 5 Februari 2026 berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022501.AH.01.11.TAHUN 2026.

27. SUBSEQUENT EVENT

The composition of the Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2025 as disclosed in Note 1 was formalized in Notarial Deed No. 17 dated January 9, 2026 of Yulia, S.H. The deed was approved and recorded in the Legal Entity Administration System of the Ministry of Law of the Republic of Indonesia on February 5, 2026 pursuant to Decree No. AHU-0022501.AH.01.11.TAHUN 2026.

28. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan pada halaman 1 sampai dengan 51 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi Perusahaan untuk diterbitkan pada tanggal 25 Maret 2026.

28. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS

The preparation and fair presentation of the financial statements on pages 1 to 51 are the responsibilities of the management and are approved and authorized for issue by the Company's Directors on March 25, 2026.

INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN –
RASIO – RASIO KEUANGAN OTORITAS JASA
KEUANGAN

Berdasarkan POJK No. 35/POJK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan POJK No. 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan Dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan diharuskan untuk memenuhi sejumlah rasio keuangan tertentu. Rasio-rasio ini dibuat oleh Perusahaan berdasarkan formula sebagaimana ditentukan dalam peraturan OJK untuk tujuan kepatuhan terhadap peraturan, dimana rasio tersebut dapat berbeda jika rasio tersebut dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan Indonesia.

Berikut ini adalah rasio-rasio keuangan berdasarkan Peraturan OJK (tidak diaudit):

SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION –
FINANCIAL RATIO OF FINANCIAL SERVICES
AUTHORITY

Based on POJK No. 35/POJK.05/2018 dated December 31, 2018 regarding the Organization of Financing Company Business, as lastly amended by POJK No. 46 Year 2024 regarding the Development and Strengthening of Financing Companies, Infrastructure Financing Companies, and Venture Capital Companies, the Company is required to comply with several financial ratios. These ratios have been prepared by the Company based on the formula as prescribed in the said OJK regulation for regulatory compliance purposes, where such ratios may differ had the ratios been computed based on Indonesian financial accounting standards.

The following are the financial ratios based on OJK Regulation (unaudited):

	31 Desember/ December 31, 2025	31 Desember/ December 31, 2024	
<i>Financing to asset ratio</i>	22,81%	40,89%	<i>Financing to asset ratio</i>
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total pendanaan yang diterima	2,64	-	<i>Net financing receivables to funding ratio</i>
Rasio saldo piutang pembiayaan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dibandingkan dengan jumlah saldo piutang pembiayaan	54%	100,00%	<i>Net financing receivables for investment and working capital financing to total financing receivables ratio</i>
Rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPF) - gross	-	-	<i>Non-performing financing (NPF) ratio - gross</i>
Rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPF) - neto	-	-	<i>Non-performing financing (NPF) ratio - net</i>
Rasio permodalan	85,04%	99,82%	<i>Capital ratio</i>
<i>Gearing ratio</i>	0,10	-	<i>Gearing ratio</i>
Rasio ekuitas terhadap modal disetor	87,18%	93,07%	<i>Equity to paid up capital ratio</i>

Hyundai Capital

Hyundai Capital Finance Indonesia

Sequis Tower • 23rd Floor, Unit 1-7
Jl. Jend. Sudirman Kav.71 Senayan
Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12190

Call Center. +62 21 500 708

Email. info@hyundaicapital.co.id

hyundaicapital.co.id

